

JURNAL BUDGET

Isu dan Masalah Keuangan Negara



Peningkatan Peran Parlemen Dalam Transparansi Anggaran, Partisipasi Publik Dan Pengawasan Anggaran

Slamet Widodo

pp.1-22

Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Lansia: Evaluasi Dampak Empirik dan Implikasi Kebijakan

Martha Carolina dan Jesly Yuriati Panjaitan

pp.23-42

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Foreign Direct Investment, dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Per Kapita Negara-Negara ASEAN

Azzahra Mubyaring Putri Sayekti, Tiara Ayu Kusumaningtyas, dan Jordan Putra Cahyono

pp.43-59

Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

Anggara Putra Pratama dan Damia Liana

pp.60-75

Dampak Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Sektor Kesehatan Pada Provinsi di Indonesia

Rosalina Tineke Kusumawardhani dan Damia Liana

pp.76-94

Hubungan Dinamis Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kerentanan Makroekonomi di ASEAN 5

Jordan Putra Cahyono dan Mohtar Rasyid

pp.95-114

p-ISSN 2541-5557

e-ISSN 2985-8879

2025

Vol. 10 No. 1

JURNAL BUDGET

Isu dan Masalah Keuangan Negara



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

PA3KN

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Peningkatan Peran Parlemen Dalam Transparansi Anggaran, Partisipasi Publik Dan Pengawasan Anggaran

Slamet Widodo

pp.1-22

Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Lansia: Evaluasi Dampak Empirik dan Implikasi Kebijakan

Martha Carolina dan Jesly Yuriati Panjaitan

pp.23-42

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, *Foreign Direct Investment*, dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Per Kapita Negara-Negara ASEAN

Azzahra Mubyaring Putri Sayekti, Tiara Ayu Kusumaningtyas, dan Jordan Putra Cahyono

pp.43-59

Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

Anggara Putra Pratama dan Damia Liana

pp.60-75

Dampak Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Sektor Kesehatan Pada Provinsi di Indonesia

Rosalina Tineke Kusumawardhani dan Damia Liana

pp.76-94

Hubungan Dinamis Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kerentanan Makroekonomi di ASEAN 5

Jordan Putra Cahyono dan Mohtar Rasyid

pp.95-114

p-ISSN 2541-5557

e-ISSN 2985-8879

2025

Vol. 10 No. 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, jurnal ilmiah jabatan fungsional Analis APBN yang bernama “Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara” telah terbit dan memasuki volume kesepuluh. Jurnal Budget Volume 10 Edisi 1 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai pada awal tahun 2025 hingga terbit pada bulan Juni 2025.

Terbitan Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara ini merupakan hasil kerja redaksi dan tentunya Pimpinan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI beserta jajarannya. Mulai tahun 2023, redaksi memberlakukan penggunaan *open journal system* (OJS) dalam pengelolaan jurnal. Penggunaan OJS akan memudahkan penulis untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara.

Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara dalam setiap terbitan memuat materi yang membahas seputar isu bidang ekonomi, keuangan negara, dan kebijakan fiskal yang merupakan lingkup tugas dari jabatan fungsional Analis APBN. Diharapkan materi yang disajikan dalam jurnal ini, meskipun bersifat ilmiah dan akademik, tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data, hingga menjadi referensi rekomendasi bagi tugas dan kewenangan DPR RI, khususnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan.

Tim redaksi menyadari keterbatasan/kekurangan yang masih ada dalam terbitan ini. Oleh karenanya, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan kualitas Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara di masa mendatang.

Kami berharap semoga artikel yang dimuat dalam terbitan ini memberi manfaat bagi Analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.,
M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

OPEN ACCESS

Citation: Widodo, S. (2025). Peningkatan Peran Parlemen Dalam Transparansi Anggaran, Partisipasi Publik dan Pengawasan Anggaran: Review Atas Hasil Open Budget Survey Tahun 2023. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 10(1), 1–21.

Received: April 30, 2025
Accepted: May 10, 2025
Revised: June 18, 2025
Published: June 30, 2025

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENINGKATAN PERAN PARLEMEN DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN, PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGAWASAN ANGGARAN: REVIEW ATAS HASIL OPEN BUDGET SURVEY TAHUN 2023

Enhancing The Role of Parliament in Budget Transparency, Public Participation and Budget Oversight: Review of Open Budget Survey Results In 2023

Slamet Widodo¹

Abstract

The results of the Open Budget Survey (OBS) in 2023 conducted by the International Budget Partnership (IBP) showed that, the score for the transparency dimension did not change from the 2021 survey, which amounted to 70. The score for the public participation dimension increased from 24 in 2021, to 26 in 2023. The score for the budget oversight dimension decreased from 61 in 2021 to 59 in 2023 due to lack of evidence of session report of the committees both in areas of budget oversight and audit report from State Audit Institution (SAI). This article aims to discuss the results of OBS related to the Indonesian parliament and relate them to the mechanism of parliamentary work and the laws and regulations governing the implementation of parliamentary duties. The research method used is descriptive qualitative with the results of the 2023 OBS questionnaire as the main document used in this research. The results show that the parliament needs to improve its mechanisms for periodic monitoring of SAI audit reports, monitoring the implementation of the current fiscal year of 2025 and improving public participation mechanism in budget discussions within and outside the APBN cycle.

Keywords: Budget Transparency, Legislative Oversight, Open Budget Survey 2023, Public Participation.

JEL Classification: H61, H83

¹ Analis APBN Ahli Madya, PA3KN, eswidodo263@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam siklus anggaran menjadi isu penting di era pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks anggaran negara, prinsip akuntabilitas menjadi prioritas dalam mengelola penerimaan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Ungkapan setiap sen rupiah harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku mencerminkan adanya prinsip-prinsip transparansi dalam perumusan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, banyak pemerintah mulai mendorong penggunaan teknologi melalui penerapan *e-budgeting* dalam transparansi anggaran dan *e-musrenbang* dalam partisipasi publik. Studi Oktaviani et al. (2019) penerapan *e-budgeting* dan *e-musrenbang* ini telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Di parlemen, hal ini mengacu pada asas keterbukaan informasi dalam hal perencanaan, pembahasan, pengalokasian dan penggunaan dana publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan dan bagaimana dana tersebut dikelola secara efektif dan efisien. Di era digitalisasi informasi ini, tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas lembaga publik semakin meningkat. Beberapa contoh kasus seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara, penggunaan dana Covid-19, peningkatan belanja subsidi energi, Penempatan Modal Negara (PMN), dan peningkatan belanja barang dan perjalanan dinas telah memaksa pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih mendalam kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, namun juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan evaluasi anggaran (De Renzio & Wehner, 2017).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Manik Sukoco, 2011). Selain transparansi, partisipasi publik dalam tahapan siklus APBN juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prioritas anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil secara aktif, parlemen tidak hanya memperoleh masukan terkait isu yang menjadi perhatian masyarakat namun juga meningkatkan asas representatif parlemen terhadap konstituennya.

Transparansi anggaran yang efektif memungkinkan masyarakat memiliki akses informasi anggaran yang komprehensif dan dapat dipahami, serta terlibat dalam dialog yang bermakna, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan anggaran yang tepat. Kombinasi antara transparansi anggaran dan partisipasi publik di parlemen tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Peningkatan kualitas APBN tidak hanya bergantung pada peningkatan kualitas belanja dan transformasi ekonomi yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, namun juga dipengaruhi oleh efektivitas alokasi anggaran, evaluasi kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang transparan. Untuk itu diperlukan peningkatan akses informasi anggaran, pengawasan anggaran, dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan anggaran negara.

Partisipasi publik melibatkan keseluruhan tahapan pembahasan anggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga pengawasan anggaran. Partisipasi publik dilakukan

melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku antara lain melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja dan penyampaian aspirasi melalui lembaga yang dibentuk khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik, kebijakan anggaran yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi publik juga akan meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan kebijakan (Bobbio, 2019).

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Riyanto & Kovalenko, 2023). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Hamsinar, 2022). Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun sampel masyarakat (Manik Sukoco, 2011).

Aspek lain yang juga penting dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang efektif adalah pengawasan parlemen terhadap anggaran negara. Melalui fungsi penganggaran yang melekat pada parlemen dan sebagai bagian dari representasi berbagai kepentingan masyarakat yang diwakilinya, parlemen dapat mengambil kebijakan anggaran yang berbeda dengan tuntutan masyarakat. Studi mengenai koalisi di parlemen oleh Sitepu (2016) menemukan bahwa koalisi yang terbentuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran pendapatan pada APBN dan APBN-P, serta tingkat persetujuan anggaran belanja pada APBN-P.

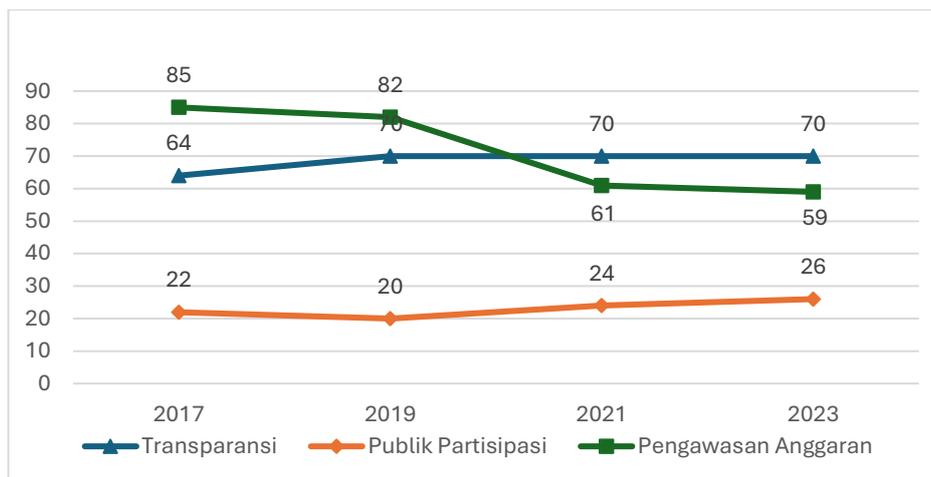
Terlepas dari berbagai kepentingan politik di parlemen, pengawasan anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan nasional melalui pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia. Kemampuan parlemen untuk mengawasi dan mengubah anggaran sangat penting untuk mensinkronkan pengeluaran pemerintah dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Namun hal ini juga bergantung pada peranan komisi dalam proses anggaran. Komisi harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengkaji proposal anggaran yang detail. Menurut Pelizzo & Stapenhurst (2022) untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan secara efektif komisi perlu mengalokasikan waktu minimum 60 hari untuk melakukan review anggaran, dengar pendapat dengan masyarakat dan pembahasan anggaran di komisi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan presiden. Dalam pelaksanaannya DPR memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU mengenai APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK.

Melalui fungsi pengawasannya, DPR mengawasi pelaksanaan anggaran pada mitra kerjanya dan memastikan program kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang dialokasikan. DPR juga memiliki pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang

disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu lembaga di dunia yang berinisiatif melakukan pengukuran terkait tata kelola anggaran adalah International Budget Partnership (IBP) yang melakukan *Open Budget Survey (OBS)* sekali dalam 2 tahun. Cakupan survey meliputi tingkat transparansi anggaran, partisipasi publik dalam siklus anggaran, pengawasan parlemen terhadap anggaran dan pengawasan anggaran oleh lembaga audit negara. Transparansi dapat membantu masyarakat memahami prioritas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dan turut berkontribusi dalam penyusunan prioritas tersebut melalui partisipasi publik, dan pengawasan parlemen dibutuhkan dalam memastikan tercapainya prioritas anggaran tersebut.



Gambar 1. Hasil *Open Budget Survey* Indonesia, 2017-2023

Sumber: International Budget Partnership

Dalam gambar 1 di atas, terlihat bahwa aspek pengawasan anggaran mengalami penurunan skor yang signifikan dari 85 di tahun 2017 menjadi 59 di tahun 2023. Transparansi anggaran cenderung stagnan dalam 3 periode survey yaitu berada di skor 70 pada tahun 2019, 2021, dan 2023. Sementara partisipasi publik dalam siklus penanggaran hanya meningkat 4 poin dari posisinya di tahun 2017 sebesar 22 menjadi 26 di tahun 2023. Secara umum hasil survey tersebut masih menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali dalam hal pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran oleh parlemen menurun dari 85 (2017) menjadi 59 (2023).

Penelitian terkait transparansi anggaran masih bersifat lokal dalam lingkup keuangan daerah. Penelitian Nurailah & Syamsul (2021) yang terfokus pada peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD) menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil OBS tahun 2019, yaitu bahwa secara umum tatakelola anggaran masih perlu diperbaiki agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peningkatan transparansi seperti yang dilaporkan dalam penelitian TPAD di daerah-daerah juga berkontribusi terhadap perbaikan tingkat transparansi nasional secara keseluruhan yang diukur oleh OBS 2019.

Di sisi lain terdapat perkembangan positif yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran terus mengalami perkembangan positif, meskipun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek partisipasi publik dan pengawasan parlemen. Menurut studi oleh Nugroho (2012), skor Indonesia dalam OBS 2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode survey pada tahun-tahun sebelumnya, dengan skor keterbukaan anggaran mencapai 70/100. Namun, partisipasi publik dalam proses anggaran tetap rendah, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara transparansi dokumen dan keterlibatan

masyarakat.

Partisipasi publik dalam dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan mendapatkan masukan-masukan dari publik terkait prioritas pembangunan daerah dan nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian Mahyani Nasution dan Lutfi (2022) menyatakan bahwa terdapat banyak tantangan yang perlu dipertimbangkan untuk mengakomodir partisipasi publik dalam pembahasan anggaran. Salah satu tantangannya adalah format anggaran yang terlalu rumit dan terbatasnya pemahaman publik terhadap dokumen anggaran. Proses Musrenbang dan tahapan lain dalam perencanaan anggaran sering kali terhambat oleh kepentingan elit dan politik kekuasaan, sehingga suasana partisipatif tidak berjalan secara substantif dan otoritas pemerintah tetap dominan (Salahudin et al., 2017).

Sementara itu, menurut studi oleh Putri dan Nugroho (2021), meskipun dokumen anggaran utama seperti Nota Keuangan dan APBN tersedia untuk publik, kualitas isi dokumen tersebut seringkali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memungkinkan keterlibatan publik yang bermakna. Informasi anggaran seringkali disajikan dalam format teknis yang sulit dipahami masyarakat awam.

Terkait dengan aspek pengawasan anggaran, penelitian Santiso (2015) mengungkapkan bahwa peningkatan akuntabilitas tidak hanya bersandar pada kewenangan formal yang dimiliki parlemen, tapi juga perlu dibangun mekanisme formal untuk secara sistematis untuk menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga audit. Parlemen atau sistem pendukung parlemen juga perlu meningkatkan kapasitas teknis dalam menganalisis laporan audit (Santiso, 2015).

Dari hasil penelitian diatas, masih belum banyak yang menggunakan hasil *Open Budget Survey* sebagai dokumen utama dalam penelitian terkait dengan transparansi anggaran, partisipasi publik dan pengawasan anggaran oleh parlemen. Oleh karena itu, penulis mencoba mengisi kekosongan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder resmi (International Budget Partnership, 2023b), dan fokus pada peran parlemen dalam tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, dan pengawasan anggaran dengan merujuk pada mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dasar teori yang mendukung analisis penelitian ini meliputi teori keagenan (*agency theory*), teori *good governance*, teori akuntabilitas fiskal dan teori demokrasi partisipatif. Digunakannya teori-teori tersebut didasarkan pertimbangan berikut:

1. Teori Agency

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pihak prinsipal (yang memberikan mandat) dan agen (yang menerima mandat) dalam konteks pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya. Dalam hubungan ini, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka. Namun, sering kali muncul konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak (Hendrastuti & Harahap, 2023). Permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh inefisiensi dan ketimpangan informasi. Ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan agen membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan prinsipal (Hendrastuti & Harahap, 2023). Untuk mengurangi risiko ini, prinsipal dapat menetapkan sistem pengawasan serta

pemberian insentif guna menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan mereka.

2. Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mencakup sejumlah prinsip utama, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Tujuan dari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan ini berperan dalam mencegah praktik korupsi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Rasul, 2009). Di sisi lain, prinsip akuntabilitas mengharuskan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, terutama jika terjadi penyimpangan kekuasaan.

Partisipasi ini dapat difasilitasi melalui berbagai cara, seperti forum konsultasi dan audiensi publik dalam rapat dengan pendapat umum, maupun inisiatif masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan publik sekaligus memperkuat sistem demokrasi.

3. Teori Akuntabilitas Fiskal

Teori Akuntabilitas Fiskal menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Konsep ini menuntut agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik, serta memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara efisien dan memberikan hasil yang optimal. Tujuan utama dari prinsip ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan anggaran negara (Mudhofar & Tahar, 2016)

Salah satu komponen kunci dari akuntabilitas fiskal adalah pelaporan keuangan yang jujur, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Komponen ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta pelaksanaan audit independen guna menjamin bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara faktual (Mudhofar & Tahar, 2016). Di samping itu, akuntabilitas fiskal juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, agar kebijakan fiskal yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga negara.

4. Teori Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan. Dalam sistem ini, peran warga negara tidak terbatas pada memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan langsung dalam forum diskusi publik, referendum, dan berbagai bentuk inisiatif masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Salah satu elemen krusial dalam demokrasi partisipatif adalah prinsip inklusivitas, yakni memberikan kesempatan setara kepada seluruh warga negara untuk turut serta dalam proses politik. Inklusivitas ini mencakup upaya aktif untuk melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti komunitas minoritas, perempuan, serta kelompok rentan lainnya. Dengan pendekatan ini, demokrasi partisipatif berupaya membangun

sistem pemerintahan yang lebih adil, setara, dan merepresentasikan keragaman suara dalam masyarakat (Nugroho, 2012).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis keterbukaan anggaran di Indonesia berdasarkan hasil *Open Budget Survey (OBS) 2023* yang dilakukan oleh International Budget Partnership (IBP). OBS memberikan indikator berbasis survei yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan anggaran telah berjalan di Indonesia. *Open Budget Survey (OBS)* dilaksanakan setiap dua tahun di 125 negara dengan tujuan menilai tiga aspek utama dalam pengelolaan anggaran, yaitu transparansi, keterlibatan publik, dan mekanisme pengawasan. Survei ini dilakukan melalui kolaborasi dengan lebih dari seratus organisasi masyarakat sipil dan institusi akademik dari berbagai negara, yang memiliki tujuan bersama untuk mendorong sistem penganggaran yang terbuka dan responsif di masing-masing wilayah. Dalam pelaksanaannya, OBS menggunakan 145 butir pertanyaan yang sebagian besar difokuskan pada praktik nyata di lapangan, bukan sekadar menilai aturan hukum yang berlaku. Instrumen survei ini disusun berdasarkan standar praktik terbaik internasional dalam tata kelola keuangan publik, termasuk *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* dari IMF, inisiatif *Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)*, *Best Practices for Fiscal Transparency* dari OECD, serta *Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts* dari International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Survei yang terdiri dari 145 pertanyaan tersebut menghasilkan skor yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan informasi anggaran kepada publik, ruang partisipasi masyarakat, serta peran pengawasan oleh lembaga legislatif dan badan audit tertinggi. Skor transparansi mengukur sejauh mana delapan dokumen anggaran utama tersedia bagi masyarakat secara daring, diterbitkan tepat waktu, serta memuat informasi yang lengkap dan relevan. Sementara itu, skor partisipasi mencerminkan tingkat keterlibatan publik yang difasilitasi oleh pihak eksekutif, legislatif, dan lembaga audit dalam berbagai tahap siklus penganggaran. Adapun skor pengawasan mengkaji efektivitas peran lembaga legislatif dan badan pemeriksa utama dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran negara, termasuk seberapa kuat kedua lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif sepanjang proses anggaran berlangsung.

Adapun delapan dokumen anggaran utama tersebut yaitu (International Budget Partnership, 2023b):

1. *Pre-Budget Statement (PBS)*

Pre-Budget Statement (PBS) sering disebut dengan Dokumen Strategi Fiskal, Dokumen Strategi Anggaran, atau Dokumen Kerangka Anggaran yang memuat strategi anggaran pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam konteks Indonesia, PBS adalah Dokumen **Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)** yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tanggal 20 Mei dalam rangka siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (PP RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran berikutnya.

2. *Executive's Budget Proposal (EBP)*

Executive's Budget Proposal (EBP) adalah dokumen usulan anggaran yang memuat proyeksi kondisi makro ekonomi dan kebijakan fiskal yang menjadi baseline dalam

merencanakan penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran negara pada tahun berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini adalah dokumen **RAPBN tahun anggaran berikutnya beserta Nota Keuangannya** yang disampaikan pemerintah pada setiap tanggal 16 Agustus.

3. *Enacted Budget (EB)*

Enacted Budget (EB) adalah rancangan anggaran pemerintah (EBP) yang telah melalui tahapan pembahasan di parlemen dan ditetapkan oleh parlemen. Dalam konteks Indonesia, ini adalah dokumen **RUU APBN** yang harus disahkan dalam rapat paripurna DPR, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

4. *Citizen Budget (CB)*

Citizen Budget (CB) adalah informasi anggaran yang sederhana, bersifat non teknis, memuat ringkasan kebijakan anggaran yang menjadi bagian dari dokumen anggaran serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia berupa **infografis APBN** yang menyajikan ringkasan informasi dari Nota Keuangan RAPBN dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas.

5. *In-Year Report (IYR)*

In-Year Report (IYR) informasi anggaran yang berisikan capaian pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan dan disampaikan secara periodik. Tujuannya adalah untuk memberikan pengukuran berkala mengenai tren total pendapatan dan pengeluaran hingga saat ini, idealnya disertai dengan penjelasan mengenai penyimpangan signifikan dari ekspektasi. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini adalah **majalah APBN Kita** yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI setiap bulannya yang memuat capaian postur APBN secara bulanan.

6. *Mid-Year Review (MYR)*

Mid-Year Review (MYR) adalah analisis anggaran berjalan yang diberikan sekitar pertengahan tahun anggaran. Di beberapa negara, tinjauan ini secara hukum diharuskan untuk dirilis paling lambat dalam waktu enam bulan sejak dimulainya tahun anggaran. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini berupa **Laporan Semester I APBN dan Prognosis Semester II APBN** tahun berjalan yang disampaikan dan dibahas oleh Badan Anggaran DPR pada bulan Juni setiap tahunnya.

7. *Year-End Report (YER)*

Year-End Report (YER) menyajikan pembahasan kinerja anggaran terhadap pagu anggaran awal dan anggaran belanja tambahan yang mungkin telah dikeluarkan selama tahun anggaran bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini berupa **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat** yang disampaikan pemerintah ke DPR paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini dilengkapi dengan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran bersangkutan.

8. *Audit Report (AR)*

Laporan Audit berupa laporan yang independen yang dilakukan oleh lembaga audit negara yang menyajikan berbagai informasi kinerja anggaran dan disampaikan kepada parlemen. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh BPK pada setiap bulan Mei yang memuat informasi mengenai **realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih (SAL)**,

laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk anggaran tahun bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi temuan dari skor berbagai kuesioner yang diperoleh melalui survei, serta mengidentifikasi poin-poin strategis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja lembaga legislatif di masa mendatang. Metode ini juga memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap data survei dan memberikan wawasan interpretatif yang tidak bisa diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata.

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi jawaban atas 145 pertanyaan yang mencakup dimensi transparansi, partisipasi publik dan pengawasan parlemen, dan mengidentifikasi poin-poin jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan skor ketiga dimensi tersebut.

Dalam dimensi transparansi, penulis menyoroti masih rendahnya skor untuk beberapa hal yang terkait dengan:

1. Penyajian data non finansial pada akhir tahun anggaran yang dimuat dalam usulan anggaran pemerintah (Q14)
2. Penyajian progres belanja negara berdasarkan program dalam In-Year Report (Q69).
3. Perkiraan belanja berdasarkan program dalam Year-End Report (Q86).

Dalam dimensi partisipasi publik, beberapa hal yang perlu dieksplorasi terkait hal sebagai berikut :

1. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perumusan usulan anggaran (Q125).
2. Keterlibatan masyarakat di parlemen dalam rapat dengar pendapat dalam rangka pembahasan anggaran (Q136).
3. Materi yang diangkat dalam pembahasan anggaran dengan mengikutsertakan partisipasi publik (Q137).

Dalam dimensi pengawasan parlemen, beberapa pertanyaan yang perlu dieksplorasi terkait terkait perlunya pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi (Q115), untuk melakukan pengeluaran diatas pagu yang ditetapkan (Q116), untuk melakukan dibawah diatas pagu yang ditetapkan (Q117), dan tindak lanjut parlemen atas hasil pemeriksaan BPK (Q118).

Selain mengeksplorasi beberapa pertanyaan survey yang terkait dengan parlemen, penelitian ini juga melakukan kajian terkait dengan delapan dokumen anggaran, khususnya yang terkait dengan mekanisme pembahasan dan pengawasan anggaran di parlemen.

Berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis melakukan kajian berlandaskan pada mekanisme kerja DPR, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPR dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang APBN. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPR untuk meningkatkan skor pada dimensi transparansi, partisipasi publik dan pengawasan. Kajian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga survey dalam merumuskan pertanyaan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Transparansi

Dalam konteks laporan OBS 2023, transparansi merujuk pada ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dan informasi terkait anggaran pemerintah kepada publik secara terbuka dan tepat waktu. Transparansi memungkinkan masyarakat memahami bagaimana dana publik dihasilkan dan digunakan, sehingga mendukung akuntabilitas pemerintah/parlemen dalam proses pengambilan keputusan anggaran (International Budget Partnership, 2023a).

Pada komponen transparansi anggaran, skor Indonesia dalam OBS tahun 2023 sebesar 70 dan berada di urutan kedua di antara negara-negara anggota ASEAN. Meskipun skornya meningkat dibandingkan tahun 2017, namun dalam 3 periode survey skor transparansi Indonesia tidak mengalami perubahan.

Tabel 1. Skor Transparansi OBS di Negara Anggota ASEAN

Transparansi	2017	2019	2021	2023
Filipina	67	76	68	75
Indonesia	64	70	70	70
Thailand	56	61	58	60
Vietnam	15	38	44	51
Malaysia	46	47	47	48
Kamboja	20	32	33	43
Timor Leste	40	40	52	37
Myanmar	7	28	30	3
Rata-rata Global	42	45	45	45

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*

Kenaikan skor pada dimensi transparansi disumbang oleh jawaban atas penyajian kewajiban kontinjensi dalam dokumen anggaran pemerintah (Q42), tindak lanjut hasil temuan BPK (Q101), ketersediaan dokumen LKPP untuk publik (YER-2), dan ketersediaan dokumen hasil pemeriksaan BPK untuk publik.

Dalam dimensi transparansi, penulis menyoroti masih rendahnya skor untuk beberapa pertanyaan yang terkait dengan:

- Penyajian dana non finansial pada akhir tahun anggaran (Q104)
- In-Year Report* yang menyajikan progres belanja negara berdasarkan program (Q69).
- Year-End Report* yang menyajikan perkiraan belanja berdasarkan program (Q86).

Penyajian data non finansial seperti jumlah penerima beasiswa pada kementerian/lembaga tertentu, jumlah penerima bantuan sosial, jumlah peningkatan akses internet merupakan data penunjang yang sangat dibutuhkan dalam pembahasan anggaran di parlemen. Data-data ini umumnya tersebar di berbagai dokumen seperti Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Kementerian/Lembaga yang disampaikan BPK kepada DPR pada bulan Mei. Dokumen tersebut tidak hanya memuat realisasi anggaran, namun juga mencantumkan informasi terkait dampak/hasil

dari program-program yang dijalankan oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pembahasan anggaran di DPR hanya sampai unit organisasi, fungsi dan program perlu dukungan kinerja anggaran berbasis program, baik yang dimuat dalam laporan anggaran tahun berjalan maupun dalam laporan realisasi anggaran di akhir tahun. Data capaian anggaran berdasarkan program tahun anggaran berjalan yang perlu dimuat dalam majalah APBNKita yang dipublikasikan setiap bulan oleh pemerintah. Data kinerja program ini dapat menjadi bagian penting dalam aspek pengawasan anggaran dan akuntabilitas sekaligus mendukung adanya transparansi anggaran oleh parlemen. Parlemen dapat menindaklanjuti melalui fungsi pengawasan atas kinerja program yang dilaksanakan pemerintah dan menjamin tercapainya target program dalam tahun anggaran berjalan. Evaluasi program pada akhir tahun anggaran juga dapat digunakan sebagai masukan oleh pemerintah dan parlemen dalam merumuskan program berikutnya.

Transparansi anggaran telah menjadi perhatian DPR, khususnya terkait dengan upaya menyediakan akses informasi anggaran bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mulai mengadopsi inisiatif *Open Parliament* sejak 2018. *Open Parliament* merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan parlemen yang lebih modern dan terbuka berdasarkan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas. *Open Parliament* merupakan bagian dari inisiatif global *Open Government Partnership* (OGP) yang mendorong negara-negara anggotanya agar lebih terbuka dan membangun kolaborasi publik dalam melaksanakan pembangunan. *Open Parliament* membuka ruang interaksi antara parlemen dan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses legislasi, anggaran dan pengawasan. Nilai inovasi dalam *Open Parliament* menghendaki adanya kemudahan yang menciptakan akses publik ke semua tahapan pembuatan keputusan, termasuk pembahasan anggaran. Inisiatif digitalisasi dokumen anggaran dan penyiaran langsung rapat yang bersifat terbuka di AKD telah diterapkan untuk meningkatkan nilai inovasi ini. Kehadiran mekanisme tersebut tidak hanya memperkaya informasi yang tersedia bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembahasan anggaran secara lebih substansial.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR memiliki wewenang untuk membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah. Fungsi ini mencakup pembahasan, perubahan dan penetapan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan tugas komisi di bidang anggaran antara lain membahas, mengusulkan perubahan dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

Fungsi pengawasan anggaran dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan atas kebijakan anggaran pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Melalui fungsi ini, DPR melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, penggunaan anggaran, serta kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-programnya. Pelaksanaan tugas dalam fungsi pengawasan diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib pada ayat (4) antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut dalam kegiatan DPR seringkali tidak didukung oleh bukti dukung yang memudahkan akses bagi masyarakat. Padahal, UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib telah mengatur mekanisme pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi. Lebih lanjut, UU tersebut juga mengatur ketentuan mengenai risalah rapat dan catatan rapat/laporan singkat yang harus dipublikasikan oleh komisi. Risalah rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat, sementara website DPR juga telah memberikan kanal bagi setiap komisi untuk mempublikasikan hasil rapat yang bersifat terbuka untuk kepentingan publik.

Untuk meningkatkan transparansi publik, hasil rapat-rapat dalam bentuk risalah rapat (untuk rapat yang bersifat terbuka) dan catatan rapat di alat kelengkapan dewan (AKD) perlu dipublikasikan kepada masyarakat melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh masing-masing AKD.

2. Dimensi Partisipasi Publik

Dalam konteks laporan OBS 2023, partisipasi publik merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait kebijakan publik dan perumusan anggaran negara. Melalui forum partisipasi ini, publik menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam memengaruhi arah kebijakan. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, inklusif, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan membangun hubungan yang erat antara pemerintah/parlemen dan masyarakat (International Budget Partnership, 2023a)

Parlemen menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat perannya dalam proses penyusunan anggaran, termasuk kurangnya partisipasi publik, campur tangan politik, dan sumber daya yang terbatas, serta tantangan lainnya. Partisipasi publik, berdasarkan definisi Quick dan Bryson (2016, 158–169), merujuk pada keterlibatan pihak-pihak penting seperti masyarakat, organisasi bisnis swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, rencana, dan program anggaran. Ini mendorong keterlibatan dan inklusi warga dengan memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan preferensi mereka (Kituyi & Moi, 2021).

Partisipasi publik dalam pembahasan anggaran diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas atas kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh DPR. Selama ini partisipasi publik dalam pembahasan anggaran masih belum optimal. Masyarakat masih menghadapi beberapa kendala seperti sulitnya mendapatkan akses informasi mengenai parlemen, tidak tersampainya aspirasi masyarakat dengan baik, kurangnya ruang komunikasi anggota dengan masyarakat, serta sulitnya mengetahui aktivitas anggota baik dalam masa sidang maupun masa reses (Sasmita & Rahaju, 2023).

Hasil survei OPI pada tahun 2021 terkait partisipasi publik dan kinerja DPR dalam mengakomodasi partisipasi dan aspirasi masyarakat juga menunjukkan bahwa dari 389

responden yang disurvei, sebanyak 86,1 persen menyatakan tidak pernah diundang menghadiri RDPU di DPR, dan penilaian responden pada kinerja DPR RI dalam mengakomodasi partisipasi dan aspirasi masyarakat dinilai mayoritas Sangat Buruk (34,8%) dan Buruk 46,34%. Hanya 17,8% menilai baik dan 1% menilai sangat baik (Open Parliament Indonesia (OPI), 2021).

Dalam dimensi partisipasi publik, skor Indonesia dalam OBS tahun 2023 sebesar 26 dan meningkat dibandingkan tahun 2021. Skor ini diperoleh dari jawaban atas 18 kuesioner yang disampaikan oleh IBP. Dibandingkan dengan tahun 2021, kuesioner terkait dengan apakah parlemen mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk memperoleh masukan baik dalam perumusan anggaran maupun dalam proses penetapan anggaran (Q136), skornya meningkat dari 0 menjadi 33.

Tabel 2. Skor Partisipasi Publik OBS di Negara Anggota ASEAN

Partisipasi Publik	2017	2019	2021	2023
Filipina	41	31	35	33
Thailand	7	13	11	28
Malaysia	22	17	26	28
Indonesia	22	20	24	26
Vietnam	7	11	17	19
Timor Leste	9	6	7	11
Kamboja	4	6	0	2
Myanmar	0	0	0	0
Rata-rata Global	12	14	14	15

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*

Namun demikian dalam partisipasi masyarakat dalam proses persetujuan anggaran di parlemen dinilai masih minim dalam OBS tahun 2023, dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan anggaran di pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam audit anggaran di BPK. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses persetujuan anggaran lebih bersifat teknis, antara lain disebabkan oleh kurangnya alokasi waktu yang tersedia.

Tabel 3. Partisipasi publik dalam proses anggaran

No	Proses Anggaran	OBS TAHUN 2019	OBS TAHUN 2021	OBS TAHUN 2023
1.	Perumumusan Anggaran (Pemerintah)	13	20	20
2.	Persetujuan Anggaran (Parlemen)	0	0	11
3.	Pelaksanaan Anggaran (Pemerintah)	25	33	33
4.	Audit Anggaran (BPK)	56	56	56

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*



Meskipun Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI (Pasal 243) telah mengatur partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses pembahasan rancangan Undang-undang mengenai APBN, namun masih terdapat kendala antara lain alokasi waktu yang terbatas bagi AKD dalam pembahasan anggaran sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Dalam APBN Tahun 2025, terdapat 116 Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja komisi I hingga komisi XIII. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 170 ayat (3) menyatakan bahwa komisi bersama mitra kerja membahas alokasi anggaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak disampaikan hasil pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh anggota Badan Anggaran dari komisi yang bersangkutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini Badan Keahlian sedang membahas mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pemenuhan *meaningful participation* harus sekurang-kurangnya dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan serta persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu: pertama, hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (Lubis et al., 2024). Mekanisme *meaningful participation* ini tentunya juga mencakup RUU APBN melalui penyusunan mekanisme pelibatan masyarakat secara *online* agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam persetujuan anggaran di parlemen.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan partisipasi publik dan kinerja DPR dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, pada tahun 2025 DPR juga telah membentuk alat kelengkapan dewan baru yaitu Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Badan ini dibentuk untuk menampung dan memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat diterima, ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan komisi terkait di DPR. Melalui pembentukan BAM dan mekanisme *meaningful participation* diharapkan DPR dapat meningkatkan pelibatan partisipasi publik dan tindak lanjut aspirasi publik.

3. Dimensi Pengawasan Legislatif

Dalam konteks laporan OBS 2023, pengawasan legislatif merupakan suatu mekanisme penting yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan anggaran oleh pemerintah. Kegiatannya mencakup telaahan atas dokumen anggaran, persetujuan anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, yang merupakan elemen penting dalam membangun sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (International Budget Partnership, 2023a).

Pengawasan parlemen mengalami penurunan signifikan pada OBS tahun 2023. Di bandingkan tahun 2021, penurunan skor ini terjadi pada Q114 terkait dengan pengawasan AKD terhadap pelaksanaan APBN secara berkala (bulanan atau triwulanan), meskipun skornya meningkat dibandingkan tahun 2021. Skor Indonesia dalam OBS tahun 2023 sebesar 59 dan berada di urutan kelima di antara negara-negara

anggota ASEAN.

Tabel 4. Skor Pengawasan Legislatif OBS di Negara Anggota ASEAN

Pengawasan Legislatif	2017	2019	2021	2023
Filipina	65	74	74	83
Vietnam	72	74	80	82
Timor Leste	56	48	56	68
Thailand	52	63	59	63
Indonesia	85	83	53	59
Malaysia	35	31	39	43
Kamboja	55	50	41	41
Myanmar	48	65	50	17
Rata-rata Global	48	49	47	46

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*

Nilai skor pengawasan parlemen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu Q114 yang menyoroati apakah komisi melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun berjalan. Nilai skor di tahun 2023 sebesar 33, menurun dari 100 di tahun 2021. Penyebabnya adalah komisi tidak mempublikasikan hasil rapat kerja pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun berjalan (*in-year review*).

Tabel 5. Pengawasan Anggaran

No	Pengawasan	OBS TAHUN 2019	OBS TAHUN 2021	OBS TAHUN 2023
1.	Pengawasan Parlemen	83	53	50
2.	Pengawasan Audit	78	78	78

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*

0-40 Minim
 41-60 Terbatas
 61-100 Memadai

Terkait dengan rendahnya nilai skor untuk kuesioner terkait perlunya pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi (Q115), untuk melakukan pengeluaran diatas pagu yang ditetapkan (Q116), dan untuk melakukan dibawah diatas pagu yang ditetapkan (Q117), sebagai bagian dari politik anggaran, UU APBN telah memberikan kewenangan kepada pemerintah, tanpa memerlukan persetujuan DPR, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran antar program dalam 1 Bagian Anggaran,
2. Perubahan dalam pembiayaan anggaran dan belanja negara
3. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum (BLU) sebagai tambahan pembiayaan

Mekanisme persetujuan DPR, hanya untuk penerbitan SBN, sementara untuk hal

lainnya hanya dilaporkan dalam LKPP. Penambahan dan pengurangan anggaran dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBN juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan signifikan pada postur APBN (penambahan atau penurunan dari pagu APBN) menjadi salah satu prasyarat bagi pemerintah dalam mengajukan perubahan APBN tahun berjalan. Perubahan signifikan tersebut mencakup (UU MD3,2014):

1. Penurunan pertumbuhan paling sedikit 1% dibawah asumsi yang telah ditetapkan
2. Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% dari asumsi yang telah ditetapkan
3. Perubahan postur APBN yang sangat signifikan berupa:
 - a. Penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
 - b. Kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
 - c. Kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau
 - d. Kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan memberi ruang kepada pemerintah agar lebih responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional dan global. UU MD3 telah mengatur bahwa dalam hal pemerintah mengajukan RUU APBN Perubahan, Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Perkembangan ekonomi global seringkali berdampak langsung pada perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi ketahanan fiskal. Dalam kondisi demikian, pemerintah dituntut lebih responsif untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kondisi ekonomi, tanpa harus terikat pada prosedural formal terkait dengan penggunaan anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR karena segala langkah kebijakan anggaran pemerintah akan dilaporkan dalam laporan pelaksanaan APBN untuk dibahas dengan DPR. Oleh karena itu, IBP selaku penyelenggara OBS perlu melakukan penyempurnaan atas pertanyaan terkait dengan persetujuan parlemen dalam hal tersebut di atas dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di setiap negara.

Untuk meningkatkan skor pengawasan parlemen, komisi perlu menyusun rencana kerja pengawasan anggaran APBN tahun berjalan dan mempublikasikan hasil pembahasannya kepada publik. Pengawasan berkala ini bertujuan untuk mengetahui tren perkembangan besaran APBN dan memantau seberapa besar/kecil deviasi anggaran yang terjadi dari yang telah ditetapkan, mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh kementerian/lembaga, dan menghindari terjadinya penumpukan anggaran di akhir tahun.

Sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi antara lain pengawasan terhadap

pelaksanaan APBN, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah lainnya.

Pelaksanaan tugas pengawasan ini umumnya dilaksanakan pada Masa Persidangan III dan IV atau mulai dari bulan Januari hingga April setiap tahunnya. Pada masa sidang tersebut, Komisi memiliki agenda terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kerja mitra kerja komisi pada tahun sebelumnya dan terkait dengan isu-isu tematik yang menjadi perhatian publik. Namun demikian, mengingat OBS didasarkan pada praktik baik, seringkali hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ini tidak tertuang dalam laporan singkat komisi yang mudah diakses oleh masyarakat. Padahal, tata tertib DPR telah mengatur bahwa sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Penyampaian laporan/dokumen secara digital melalui portal informasi perlu dilakukan untuk memudahkan akses publik.

4. Dokumen Anggaran Utama

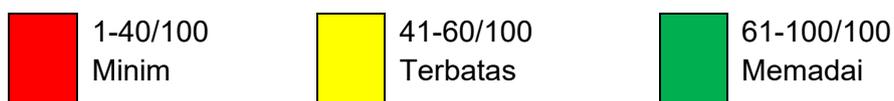
Dalam aspek seberapa lengkap dokumen anggaran yang tersedia bagi masyarakat, terdapat penurunan skor dari 8 dokumen anggaran utama.

Tabel 6. Perbandingan Skor Transparansi Anggaran dalam OBS Tahun 2021 dan 2023

No	Dokumen anggaran utama	Tujuan dan isi dokumen	OBS TAHUN 2019		OBS TAHUN 2021		OBS TAHUN 2023	
			Tahun Penilaian	Skor	Tahun Penilaian	Skor	Tahun Penilaian	Skor
1	<i>Pre Budget Statement</i> /PBS (KEM PPKF)	Mengungkapkan parameter umum kebijakan fiskal sebelum Usulan Anggaran Eksekutif; menguraikan perkiraan ekonomi pemerintah, pendapatan yang diantisipasi, pengeluaran, dan utang.	2019	50	2021	61	2023	50
2	<i>Executive Budget Proposal</i> //EBP (NK RAPBN)	Disampaikan pemerintah kepada DPR untuk disetujui; merinci sumber pendapatan, alokasi untuk kementerian, usulan perubahan kebijakan, dan informasi penting lainnya untuk memahami situasi keuangan negara.	2019	67	2021	65	2023	66
3	<i>Enacted Budget</i> /EB (UU APBN)	APBN yang telah disetujui oleh DPR	2019	89	2021	89	2023	83
4	<i>Citizen Budget</i> /CB (Infografis)	Informasi sederhana dan non-teknis dari RAPBN atau	2019	67	2021	67	2023	59

	APBN)	APBN yang telah disahkan, yang disediakan bagi masyarakat umum.						
5	<i>In-Year Report</i> (APBNKita)	Informasi tentang pendapatan aktual dan pengeluaran aktual yang dikumpulkan, dan utang yang timbul pada interval yang berbeda; diterbitkan setiap triwulan atau bulanan.	2018	74	2020	78	2022	74
6	<i>Mid-Year Review/MYR</i> (Lapsem I APBN)	Pemutakhiran menyeluruh atas pelaksanaan anggaran pada pertengahan tahun anggaran; mencakup tinjauan asumsi ekonomi dan perkiraan terkini atas capaian anggaran.	2018	89	2020	89	2022	89
7	<i>Year-End Report/YER</i> (LKPP)	Menjelaskan capaian APBN pada akhir tahun fiskal dan evaluasi capaian kinerja dalam mencapai tujuan kebijakan anggaran.	2017	64	2019	64	2021	64
8	Audit Report/AR (IHPS)	Audit BPK atas laporan keuangan akhir tahun fiskal.	2017	76	2019	81	2021	90

Sumber: *International Budget Partnership, 2023*



Dari survey terhadap 8 dokumen anggaran utama, penurunan skor terjadi pada dokumen PBS dan CB. Penurunan disebabkan belum adanya proyeksi penerimaan negara secara detil dalam PBS dan kurangnya kanal informasi terkait bagaimana masyarakat harus memberikan masukan dalam CB. Dokumen KEM dan PPKF yang disampaikan pemerintah pada setiap tanggal 20 Mei dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya menjadi dokumen rujukan penilaian ini. Kuesioner yang terkait dengan PBS ini adalah pertanyaan nomor 56 (Q56) yaitu “Apakah KEM-PPKF menyajikan informasi terkait kebijakan dan prioritas pendapatan negara yang menjadi pedoman pengembangan estimasi pendapatan negara dalam tahun anggaran mendatang”.

Dalam proses *peer review* yang dilakukan antara LSM yang menjadi mitra kerja OBS dengan Kementerian Keuangan dapat dirangkum bahwa pemerintah perlu menambahkan informasi terkait estimasi jumlah penerimaan negara dalam tahun anggaran berikutnya. Meskipun dokumen KEM-PPKF menyebutkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi, namun belum menggambarkan secara jelas angka proyeksi penerimaan negara di tahun anggaran berikutnya. Penyampaian informasi proyeksi

penerimaan negara, baik dari pajak maupun non pajak, menjadi bagian dari informasi inti yang harus dicakup dalam dokumen PBS.

Terkait dengan CB, pemerintah telah menerbitkan Informasi/advetorial APBN dalam bentuk infografis yang memuat kebijakan dan prioritas anggaran, proyeksi makroekonomi dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Menurunnya skor CB dalam OBS tahun 2023 dibandingkan tahun 2021, penyebabnya lebih pada hal-hal yang bersifat teknis, seperti tidak tersedianya alamat e-mail, nomor telepon atau layanan lain dalam CB yang memungkinkan masyarakat dapat menyampaikan tanggapannya.

V. KESIMPULAN

Hasil review atas OBS menunjukkan bahwa skor dimensi transparansi anggaran Indonesia tahun 2023 berada di urutan kedua di antara negara-negara anggota ASEAN. Skor ini tidak berubah sejak tahun 2017. Dalam dimensi Partisipasi Publik terjadi trend peningkatan pada tahun 2017, 2019, 2021, dan 2023. Dimensi pengawasan anggaran mengalami trend penurunan dari menurun signifikan pada tahun 2017, 2019, 2021 dan 2023.

Penurunan skor ini terkait dengan mekanisme persetujuan DPR dalam hal terjadi pergeseran anggaran dan pengeluaran yang melebihi atau kurang dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk menghindari Indonesia mendapat skor rendah, IBP selaku penyelenggara OBS perlu melakukan penyempurnaan terkait aspek persetujuan parlemen yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di negara peserta survey.

Untuk meningkatkan kinerja transparansi anggaran, partisipasi publik dan pengawasan anggaran, DPR perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dimensi Transparansi

- DPR perlu mendorong pemerintah untuk menyajikan data non finansial pada akhir tahun anggaran, untuk dapat mengetahui dampak/outcome dari program yang dibiayai oleh APBN.
- DPR perlu mendorong pemerintah agar dapat menyajikan progres belanja berdasarkan program dalam In-Year Report dan Year-End Report sebagai bahan evaluasi program dalam anggaran berikutnya.

2. Dimensi Partisipasi Publik

- DPR perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran baik di dalam siklus APBN maupun di luar siklus APBN untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan program yang melibatkan kepentingan masyarakat.
- Dalam hal aspirasi masyarakat disampaikan secara online, DPR perlu membentuk mekanisme penyampaian aspirasi dan *feedback* untuk memastikan bahwa aspirasi tersebut ditindaklanjuti.

3. Dimensi Pengawasan Parlemen

- Komisi perlu menyusun mekanisme pengawasan berkala atas anggaran APBN tahun berjalan
- Komisi mempublikasikan kepada publik hasil pengawasan berkala komisi/AKD berupa laporan singkat melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh masing-

masing AKD.

- Menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait dengan pelaksanaan APBN dan mempublikasikan hasilnya berupa laporan singkat hasil rapat melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh masing-masing AKD

Penulis berterima kasih kepada tim editor dan reviewer yang telah memberikan saran kritis dan konstruktif untuk penyempurnaan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) atas publikasi akses terbuka ini.

Daftar Pustaka

- Bobbio, L. (2019). Designing effective public participation. *Policy and Society*, 38(1), 41–57. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>
- Hamsinar, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- International Budget Partnership. (2023a). *Open Budget Survey 2023* (No. 9th Edition). International Budget Partnership. <https://internationalbudget.org/open-budget-survey-2023/>
- International Budget Partnership. (2023b). *Open Budget Survey 2023 Methodology*. International Budget Partnership. <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-OBS-Methodology-Note-2023.pdf>
- Kituyi, O., & Moi, E. (2021). Determinant of Of Public Participation In Budget Making Process In Devolved Governments In Kenya: A Case Of Trans Nzoia County. *Journal of International Business, Innovation and Strategic Management*, 5(1).
- Lubis, M. A., Hamdani, A., Harahap, M., & Munthe, G. E. (2024). Harmonisasi Hukum Terhadap Meaningful Participation Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Manik Sukoco. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah Kota Malang*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34062.77124>
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). Public Involvement in Budget Transparency in terms of Opportunities and Challenges. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 12(2), 171–179. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1.

<https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>

- Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 180–195. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Oktaviani, R. F., Faeni, D. P., & Meidiyustiani, R. (2019). E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2S4), 854–857. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1170.0782S419>
- Open Parliament Indonesia (OPI). (2021). *Hasil Baseline Survei Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI)*. Open Parliament Indonesia (OPI). <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/07/2.1-Paparan-Hasil-Baseline-Survei-OPI.pdf>
- Putri, Y., & Nugroho, R. (2021). Public Budget Transparency in Indonesia: Analysis of the Accessibility and Understandability of Fiscal Documents. *Asian Journal of Political Science*, 29(2), 174–191.
- Quick, K. S., & Bryson, J. M. (2016). *Public participation*. Edward Elgar Publishing. <https://china.elgaronline.com/display/edcoll/9781782548492/9781782548492.00022.xml>
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *MIMBAR HUKUM*, 21(03), 409–628.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Jainuri, J. (2017). Is There Civic Groups Participation in Budget Planning? A Study Budget Planning in Malang City, Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 8(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0049.228-253>
- Santiso, C. (2015). Why budget accountability fails? The elusive links between parliaments and audit agencies in the oversight of the budget. *Brazilian Journal of Political Economy*, 35(3), 601–621. <https://doi.org/10.1590/0101-31572015v35n03a12>
- Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Publika*, 11(02), 1723–1734.
- Sitepu, B. (2016). Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 28–43. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.03>

OPEN ACCESS

Citation: Carolina, M., & Panjaitan, J. (2025). Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Lansia: Evaluasi Dampak Empirik Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 10(1), 22–41.

Received: April 30, 2025
Accepted: May 10, 2025
Revised: June 18, 2025
Published: June 30, 2025

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA LANSIA: EVALUASI DAMPAK EMPIRIK DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Assessing Poverty In Elderly Households: Empirical Evaluation And Policy Implications

Martha Carolina¹, Jesly Panjaitan²

Abstract

Indonesia is undergoing a demographic transition marked by a rising proportion of elderly populations, presenting significant challenges to its economic system and social welfare policies. This study aims to assess poverty levels among elderly households and examine key determinants, including education, health insurance coverage, social assistance programs, and household structure. Utilizing 2024 Susenas data and Probit regression analysis, the findings reveal that higher education and health insurance ownership significantly reduce the likelihood of elderly poverty. Conversely, participation in social assistance programs such as the Program Keluarga Harapan (PKH) and Atensi Lansia is positively associated with poverty status—indicating accurate targeting, yet also underscoring persistent economic vulnerability. Additionally, larger household sizes increase poverty risk, while a greater number of working household members reduces it. These results highlight the need for holistic policy interventions—particularly in education, social protection expansion, and economic empowerment for the elderly—to mitigate the impact of population ageing and build a more inclusive and sustainable social protection system.

Keywords: elderly poverty; aging population; social protection; health insurance; education; household vulnerability

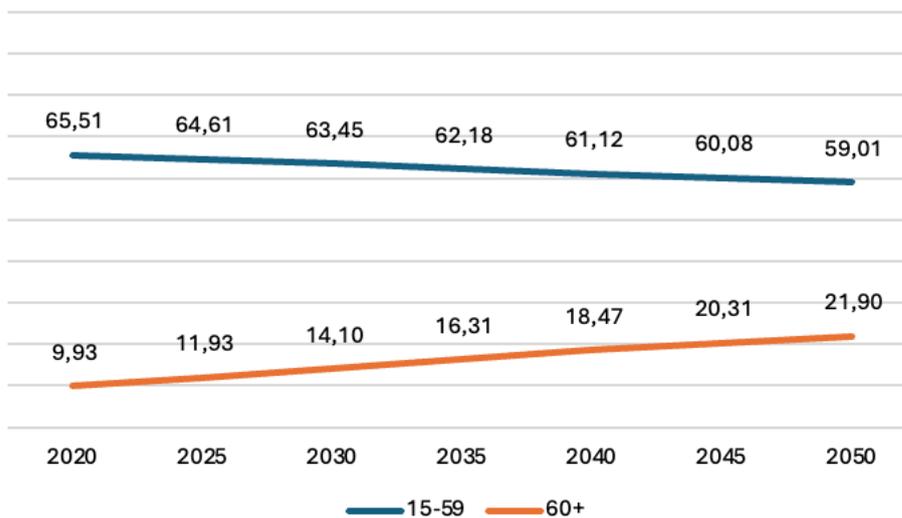
JEL Classification: J14; H53; I13; I28; I38

¹ Badan Keahlian DPR, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl. Gatot Subroto, martha.carolina@dpr.go.id

² Badan Keahlian DPR, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl. Gatot Subroto, jesok007@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah menghadapi fenomena transisi demografi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi Penduduk Lanjut Usia (Lansia). Lansia didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia di Indonesia pada skenario optimis diperkirakan akan meningkat secara signifikan, dari 9,93% pada tahun 2020 kemudian diperkirakan menjadi 21,90% pada tahun 2050 (BPS, 2023). Proporsi penduduk usia produktif (15–59 tahun) mulai menurun secara gradual setelah tahun 2030, sementara proporsi lansia (>60 tahun) meningkat secara konsisten (Gambar 1). Hal ini menunjukkan beban ekonomi dan fiskal yang semakin besar terhadap kelompok usia kerja. Pada akhirnya, peningkatan populasi lansia akan menambah tekanan signifikan terhadap sistem kesehatan dan fiskal negara-negara berkembang seperti Indonesia (Alperin et al., 2024; Cho & Lee, 2025; Kallestrup-Lamb et al., 2024; Zhao et al., 2024). Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia tidak hanya akan keluar dari masa bonus demografi pertama, tetapi juga memasuki masa bonus demografi kedua atau masa era dominasi penduduk lansia.



Gambar 1. Proyeksi Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (2020–2050)

Sumber: BPS, 2023

Bonus demografi kedua dipandang sebagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berbeda dari bonus demografi pertama yang bergantung pada dominasi usia produktif, bonus demografi kedua bergantung pada penduduk lanjut usia sehat dan tetap produktif. Namun, peluang ini hanya dapat dimaksimalkan melalui perencanaan kebijakan jangka panjang yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan struktur umur penduduk. Studi Woetzel et al. (2014) menekankan bahwa keberhasilan dalam mengelola bonus demografi sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan negara dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di semua kelompok umur. Pemanfaatan bonus demografi kedua juga memerlukan dukungan sistem proteksi sosial yang kuat, literasi keuangan yang baik, serta kesiapan lansia dalam menyesuaikan pola konsumsi, tabungan, dan peran dalam keluarga. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, maka peningkatan proporsi lansia justru dapat memperbesar rasio ketergantungan dan memperberat beban fiskal negara, terutama dalam pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial dan pensiun.

Kegagalan dalam merespons tantangan penuaan penduduk berisiko memperburuk ketimpangan kesejahteraan antar generasi dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang (Barsukov, 2019). Bonus demografi kedua juga berisiko terkait keterbatasan kesehatan, menurunnya kualitas hidup, serta rentan terhadap kemiskinan (Basrowi et al., 2021; Panjawa & Triyanto, 2020). Peningkatan lansia menjadi tantangan tersendiri karena lansia dianggap kurang produktif akibat kesehatan dan kualitas hidup (Basrowi et al., 2021). Permasalahan utama lansia antara lain faktor kesehatan, dimana terjadi adanya gangguan kesehatan fisik maupun psikis sebanyak 42,81% (BPS, 2024). Permasalahan kesehatan tersebut disebabkan penambahan usia yang mengakibatkan perubahan fungsional, fisiologis sosial dan menurunnya kemampuan lansia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari (Aguiar & Macário, 2017). Bertambahnya usia lansia mengakibatkan kondisi fisik menurun sehingga rentan sakit. Oleh karena itu, lansia membutuhkan biaya kesehatan yang lebih tinggi (Mooventhana & Nivethitha, 2017).

Permasalahan lansia lainnya yaitu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi lansia di Indonesia adalah rendahnya pendapatan akibat menurunnya produktivitas kerja, yang membuat mereka rentan terhadap kemiskinan dan belum sepenuhnya terlindungi oleh program perlindungan sosial yang tersedia (TNP2K, 2020). Sekitar 45% lansia tinggal dalam rumah tangga yang termasuk kelompok 40% berstatus sosial ekonomi terendah (TNP2K, 2017). Kondisi tersebut memaksa lansia tetap harus bekerja. Bahkan dalam kondisi tertentu, lansia yang masih bekerja berat akan berdampak pada kondisi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa beban ekonomi masih harus ditanggung oleh lansia, meskipun mereka berada dalam kondisi fisik yang semakin menurun.

Kemiskinan lansia menjadi topik menarik untuk diteliti. Pengukuran tingkat kemiskinan tidak cukup untuk menjelaskan penyebab kemiskinan (Khan et al., 2017). Beberapa faktor penyebab lansia miskin antara lain wilayah, etnis, pendidikan, dan komposisi usia (Vu & Nguyen, 2021). Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan lansia telah menerbitkan berbagai peraturan, kebijakan dan program. Kebijakan dan program lansia perlu memperhatikan kualitas hidup lansia yang layak sepanjang kehidupan lansia (Dobrokhleb & Barsukov, 2017). Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait lansia yaitu pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Nomor 13 Tahun 1998), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia potensial, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pemerintah memberikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan bagi rumah tangga lansia miskin. Kebijakan dan program bansos pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Atensi LU), pemakaman lansia, sekolah lansia Tangguh, Bina Keluarga Lansia, Pos Layanan Terpadu Lansia. Lansia juga mendapatkan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) lainnya seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako. Lansia yang mendapatkan bansos merupakan lansia yang masuk dalam daftar penerima bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk penanggulangan kemiskinan agar bansos lebih efektif dan tepat sasaran yang diberikan kepada penduduk 40% dengan kesejahteraan sosial terendah.

Cakupan penerima perlinsos lansia masih sangat kecil baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cakupan lansia penerima perlinsos dari APBN diantaranya lansia penerima PKH 6,94% rumah tangga

lansia, Atensi LU sebesar 6%, program sembako sebesar 25,89% dan peserta JKN sebesar 77,75% (BPS, 2024). Cakupan lansia penerima perlinsos dari APBD misalnya program ASLURETI (Asistensi Untuk Lanjut Usia Dengan Resiko Tinggi). ASLURETI merupakan program provinsi Aceh untuk lansia 70 tahun ke atas sebesar Rp200.000. Provinsi Jakarta menyelenggarakan program Kartu Lansia Jakarta nominal bantuan Rp600.000 untuk lansia miskin dan terlantar usia 60 tahun ke atas. Cakupan lansia penerima jaminan sosial pensiun di Indonesia juga masih sedikit dibandingkan negara lain seperti Argentina, Brazil, Cabo Verde, China, Kyrgyzstan, dan Maldives (Desvigne, 2018).

Cakupan penerima perlinsos untuk lansia diharapkan terus mengalami peningkatan untuk mengurangi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan lansia adalah masalah multi dimensi (Vu & Nguyen, 2021). Jumlah lansia sebanyak 9,7% hidup di bawah garis kemiskinan. 45% lansia masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Kemiskinan lansia disebabkan juga karena permasalahan ekonomi, keluarga, hutang, kurangnya pendidikan dan permasalahan kesehatan (Southern & McLeod, 2015). Kemiskinan lansia juga disebabkan karena kurangnya dukungan anak, perawatan kesehatan yang mahal dan tidak ada program pensiun (Kim & Mah, 2021; (TNP2K, 2020). Permasalahan lansia lainnya adalah masih adanya lansia yang buta huruf (Indrawati, 2020). Data BPS (2024) menunjukkan bahwa sekitar 60% lansia di Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar atau tidak menyelesaikan sekolah dasar, yang dapat berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam merencanakan keuangan untuk usia lanjut tua. Selain faktor ekonomi dan kesehatan, dukungan sosial juga menjadi aspek penting dalam kesejahteraan lansia (Feby et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan pemberian bansos pada lansia memberikan dampak positif terhadap lansia. Bansos berdampak terhadap kesehatan lansia (Pak, 2021). Penelitian Ma & Oshio (2020) menyatakan bahwa jaminan kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan lansia di pedesaan China. Penelitian ini menggunakan metode *dynamic fixed effect regression* dengan menggunakan data longitudinal 3 titik waktu. Penelitian ini mencoba membandingkan bagaimana dampak pemberian perlinsos terhadap perubahan kondisi kesehatan. Putra & Sahara (2015) melakukan penelitian tentang dampak program bantuan sosial dari pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Lindiasari & Ramadhani (2019) melakukan penelitian mengenai efektivitas perlindungan sosial pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melambat. Tampubolon & Hanandita (2014) mencoba mengetahui perubahan kondisi kesehatan mental apakah disebabkan oleh kemiskinan dengan menggunakan analisis regresi *Poisson* dan variabel instrumen. (Muis et al., 2020) melakukan analisis kualitatif mengenai keadaan sosial demografi, distribusi pekerjaan, permasalahan kesehatan dan perlindungan sosial di Makassar. Zainudin & Kamarudin (2015) mencari dampak kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan kemiskinan di Malaysia dan Indonesia. Moertiningsih et al. (2014) melakukan analisis dampak dari pelaksanaan program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) terhadap peningkatan kesejahteraan lansia miskin. Hasil penelitian Styawan (2019) menyatakan lansia miskin sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Rolindrawan (2015) mencoba mengevaluasi dampak JKN terhadap kecenderungan penggunaan fasilitas kesehatan. Penelitian Viryamitha & Purwanti (2020) menyatakan tingkat pendidikan, status perkawinan, usia, pendapatan dan jenis kelamin di kota Denpasar berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kesejahteraan lansia dan tingkat pendidikan, Pendapatan, dan Status perkawinan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan lansia, Usia berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan lansia dan Jenis kelamin berpengaruh negatif tidak signifikan. (Kartini & Kartika, 2020) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan lansia di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Hasil dari penelitian ini adalah semakin tinggi

tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, Status perkawinan dan ketersediaan kesehatan, maka kesejahteraan lansia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung semakin meningkat.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi lansia dan menunjukkan dampak positif dari program bansos terhadap kesejahteraan lansia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kesehatan atau dilakukan dalam pendekatan deskriptif dan kualitatif yang terbatas secara generalisasi. Di sisi lain, masih sedikit penelitian empiris berbasis data kuantitatif nasional yang secara khusus mengukur dan mengevaluasi tingkat kemiskinan rumah tangga lansia serta menganalisis keterkaitan antara karakteristik sosio-demografis dan akses terhadap perlindungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris dalam mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga lansia di Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya yaitu pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan lansia, pengaruh jaminan sosial terhadap kemiskinan lansia, pengaruh atensi lansia terhadap kemiskinan lansia, pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap kemiskinan lansia, dan pengaruh jumlah anggota rumah tangga lansia yang bekerja terhadap kemiskinan. Penelitian ini berguna untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan penuaan penduduk

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Transisi Demografi

Teori transisi demografi pertama kali diperkenalkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Frank W. Notestein pada pertengahan abad ke-20 (Menike, 2016). Teori transisi demografi menjelaskan perubahan struktur populasi yang terjadi akibat penurunan angka kelahiran dan kematian seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Perubahan struktur dimulai dari tahap antara lain:

a. Pra-Modern (Tahap Pra-Industri)

Tahap ini adalah tahap awal pembangunan yang ditandai dengan tingkat kematian dan kelahiran yang tinggi. Pada tahap pendapatan masih kecil dan berasal dari sektor pertanian, maka tingkat kelahiran dan kematian kasar seimbang, dan berada pada tingkat tinggi. Kenaikan tingkat kematian dikarenakan pencegahan penyakit dan program keluarga berencana tidak dilakukan pada tahap ini. Hal ini terjadi karena pada saat itu ilmu pengetahuan belum maju. Oleh karena itu, tingkat kelahiran dan kematian berada pada tingkat yang lebih tinggi sehingga pertumbuhan penduduk rendah pada tahap ini.

b. Tahap Transisi

Dibandingkan dengan tahap pra-industri, industrialisasi telah dimulai pada tahap ini, yang mengakibatkan penurunan tingkat kematian. Selama periode ini, tingkat kelahiran masih tinggi, yang memungkinkan pertumbuhan penduduk mencapai titik tertinggi. Pada saat transisi ini, ekonomi menjadi khusus karena peningkatan ilmu pengetahuan, perbaikan kondisi hidup, produksi output yang lebih canggih, dan penurunan tajam tingkat kematian. Karena itu, kenaikan populasi yang signifikan belum terjadi pada saat ini karena perubahan ekonomi dan sosial belum terjadi dan tingkat kelahiran belum berubah.

c. Transisi Akhir (Tahap Industri)

Modernisasi, penurunan tingkat kematian, dan penurunan tingkat kelahiran dimulai selama fase perkembangan ini. Hal ini disebabkan oleh banyak perubahan sosial yang

terjadi selama periode ini, yang mengurangi tingkat kelahiran dan kematian. Pembangunan pertanian, kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi adalah semua aspek transisi, terutama pada tahap akhir. Karena perubahan sikap sosial, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran. Tetapi tingkat kelahiran turun lebih cepat daripada tingkat kematian. Tingkat pertumbuhan penduduk menurun seiring dengan penurunan tingkat kematian dan kelahiran.

d. Modern (Tahap Pasca-Industri)

Tingkat kelahiran dan kematian terus berkurang selama fase perkembangan ini. Tingkat kematian kasar dan kelahiran kasar saat ini tidak dapat dikurangi karena pertumbuhan alami populasi kurang dari 1%. Sebagian besar negara-negara Eropa telah mencapai tahap ini. Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan banyak negara industri telah mencapai tahap ini, tetapi negara-negara berkembang masih belum bisa mencapainya. Sebagian besar negara maju saat ini menghadapi masalah penuaan populasi.

Berdasarkan teori tersebut, negara berkembang seperti Indonesia saat ini berada dalam tahap ketiga, di mana angka kelahiran mulai menurun tetapi populasi usia produktif masih mendominasi. Kondisi di mana penduduk usia kerja menjadi bagian terbesar dari total populasi dikenal dengan istilah bonus demografi atau *dividen demographic*. Namun dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia diproyeksi akan memasuki tahap keempat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

Transisi demografi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya tenaga kerja produktif sehingga menuntut kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial, dan optimalisasi sektor ekonomi berbasis lansia. (Bloom et al., 2011). Tanpa strategi yang tepat, peningkatan jumlah 'lansia dapat menjadi beban ekonomi yang besar bagi negara.

2. Kemiskinan Lansia

Kemiskinan dapat menghambat akses pada sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan lansia memiliki banyak aspek seperti pendapatan, ketidakberdayaan ekonomi antar generasi, hutang, dll (Southern & McLeod, 2015). Pendapatan lansia berhubungan erat dengan pendidikan, pekerjaan dan kesenjangan rumah tangga (Nguyen & Nguyen, 2019). Penyebab kemiskinan lainnya yaitu pengangguran, pendidikan rendah, program pensiun yang tidak memadai dan mahalnya perawatan Kesehatan (Kim & Mah, 2021). BPS menganut konsep garis kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Lansia yang pengeluaran per kapita per bulanan lebih rendah dari garis kemiskinan adalah lansia miskin.

3. Bansos Lansia

Bantuan sosial dapat mengurangi kemiskinan lansia (Vu & Nguyen, 2021). Bansos lansia digunakan sebagai sistem perlinsos lansia yang menjamin pendapatan minimal tertentu. Bansos lansia di gunakan oleh negara berpendapatan tinggi, menengah dan negara miskin. Sebagai contoh Nepal sebagai salah satu negara termiskin di Asia mengalokasikan 1,3% dari Produk Domestik Bruto untuk bansos lansia usia 65 tahun ke atas dan lansia perempuan usia 60 tahun yang hidup sendiri. Negara berpendapatan menengah telah mengalokasikan bansos lansia sekitar 14,6% dari PDB per kapitanya (TNP2K, 2020). Penelitian tentang pemberian bantuan sosial kepada lansia di Indonesia masih sangat terbatas. Pratiwi et al. (2021) menemukan bahwa secara agregat belanja kesehatan *out-of-pocket* tertinggi berada

di wilayah dimana klaim asuransinya paling tinggi, yaitu Jawa dan Bali lebih besar 180% dibanding provinsi-provinsi yang ada di bagian timur. Luthfi & Hanri (2024) menyatakan bahwa hanya 72% yang menggunakan jaminan kesehatan dari total lansia yang menerima bantuan sosial lansia dan sedang rawat jalan, sementara 28% tidak menggunakan jaminan kesehatannya. Padahal data menunjukkan 89,5% dari kelompok penerima bantuan memiliki jaminan kesehatan. Kementerian sosial (Kemensos) sudah memiliki sejumlah program bansos untuk lansia. Program bansos lansia dari Kemensos diantaranya:

a. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Atensi LU)

Program ATENSI LU dimulai sejak tahun 2021. Program Atensi LU dalam bentuk ATENSI LU oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial lansia. Sasaran ATENSI LU meliputi lansia, keluarga, dan masyarakat. Kriteria lansia penerima ATENSI LU adalah lansia yang mengalami kerentanan masalah sosial dan diskriminasi serta lansia yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Tahap mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan penyaluran langsung kepada lansia dan penyaluran melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial. Rumah tangga lansia yang memperoleh Atensi LU jumlahnya masih sedikit hanya 6% (BPS, 2024).

b. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako

Program Sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat miskin dan rentan untuk mengurangi beban pengeluaran. Program sembako mulai tahun 2020 yang merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non-Tunai, Program Beras untuk Keluarga Prasejahtera (Rastra)/Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)/Operasi Pasar Khusus (OPK). Indeks bantuan program semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp200.000/KPM/bulan. %tase rumah tangga lansia yang mendapat program sembako hanya sebesar 25,89% (BPS, 2024).

c. Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia

Program perlinsos PKH komponen lansia adalah yang paling banyak diterima kelompok lansia. PKH merupakan program bansos bersyarat terdaftar dalam DTKS Kemensos serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miskin/rentan. KPM mendapatkan dana tunai yang bervariasi besarnya sesuai dengan kriteria komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat, yang disalurkan setiap tiga bulan. Seluruh KPM PKH juga berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial komplementer di bidang kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, pangan melalui Program Sembako, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Lansia penerima manfaat harus memenuhi beberapa kewajiban, yaitu minimal sekali dalam satu tahun melakukan pemeriksaan kesehatan dan menggunakan layanan Puskesmas Santun Lanjut Usia, mengakses layanan *home care* (pengurus merawat, memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia), dan mengakses layanan *day care* (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya). Kebijakan PKH terhadap komponen lansia mengalami perubahan, seperti cakupan usia, jumlah lansia dalam satu KPM, jumlah bantuan, dan unit sasaran. Cakupan program yang pada 2016-2018 dan 2020 hanya mencakup lansia berusia 70 tahun ke atas, pada 2019 sempat berubah menjadi lansia berusia 60 tahun ke atas. Jumlah lansia per KPM yang pada 2016 maksimal dua lansia, pada 2020-2024 maksimal

hanya satu lansia.

Persentase rumah tangga lansia di Indonesia masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun cakupannya. %tase lansia yang menerima PKH sebesar 16,94%. %tase lansia yang menerima Atensi LU sebesar 6%, BPNT/ Program Sembako sebanyak 25,89%, Kartu Keluarga Sejahtera sebesar 19,85%.

Menurut penelitian Kemensos, PKH telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga 2,2% (Kemensos, 2025). Hasil penelitian Waluyo & Khoirunurrofik (2021) menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia untuk daerah tertinggal pengaruhnya lebih kecil dibanding daerah non tertinggal. Hal ini dapat terjadi karena kondisi kedalaman kemiskinan daerah tertinggal lebih tinggi dengan faktor aksesibilitas yang sulit, faktor *inclusion error* dan *exclusion error* yang cukup tinggi, pendidikan yang rendah dibanding daerah non tertinggal. Di sisi lain, %tase penerima PKH lansia yang meningkat tidak diikuti selalu dengan penurunan kemiskinan. Penerima PKH lansia pada tahun 2017 sebesar 5,22% dengan tingkat kemiskinan lansia sebesar 9,03%. Penerima PKH lansia tahun 2021 pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,81% namun kemiskinan lansia juga meningkat menjadi 11,1% (BPS, 2024).

4. Jaminan Kesehatan Lansia

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tetap sehat untuk beraktivitas. Pembangunan kesehatan adalah salah satu tujuan *Sustainable Development Goals*. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia, termasuk lansia. Sebagian besar negara di seluruh dunia (termasuk Indonesia) masih memperkirakan bonus demografi, yaitu kelompok usia produktif yang cukup untuk meningkatkan produktivitas negara, karena populasi lansia diperkirakan telah mencapai 456 juta tahun 2025, yang merupakan 10% dari populasi di Asia. Jumlah lansia di Indonesia berusia 60 tahun atau lebih atau lebih mencapai 25,7 juta orang, atau sekitar 9,6% dari total penduduk, menurut Susenas 2019 (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan lansia yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan lansia 2020–2024 sebagai bentuk dukungan kesehatan terhadap lansia supaya lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif secara sosial dan ekonomi. RAN lansia 2020-2024 Kesehatan lansia 2020–2024 memberikan strategi bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan lansia jangka panjang (Djamhari et al., 2021).

Program Jaminan Kesehatan lansia di Indonesia melalui program JKN merupakan upaya menjalankan amanah SDG, yaitu Universal Health Coverage. Menurut Susenas 2024, jumlah lansia sebanyak 77,75% telah memiliki JKN guna memenuhi kesehatan. Jumlah lansia tua memiliki JKN mengalami penurunan sebanyak 73,82% padahal lansia tua akan mengalami gangguan kesehatan yang bertambah seiring bertambahnya usia. JKN membantu lansia untuk pengobatan hal ini dapat dilihat dari 56,10% pasien lansia rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan, 84,01% pasien rawat inap memanfaatkan jaminan kesehatan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan BPJS non PBI, Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), serta asuransi lainnya (BPS, 2024). Keberadaan asuransi kesehatan seperti jaminan kesehatan perlu diperkuat bagi Lansia untuk tidak jatuh pada jurang kemiskinan, termasuk di desa (Lai et al., 2025; Zhang & Wu, 2024). Selain itu juga, jaminan kesehatan dapat menurunkan depresi

pada lansia (Liao et al., 2025).

5. Rumah Tangga Lansia

Rumah tangga lansia dapat dikategorikan menjadi rumah tangga tunggal atau bukan tunggal. Pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu lansia merasa lebih baik (Prahastiwi & Jatmiko, 2023). Penggunaan jumlah anggota rumah tangga (ART) sebagai pembagi pengeluaran per kapita juga memengaruhi ukuran kemiskinan menurut Parwodiwiyono (2022). Hasil akan berbeda jika ART diperlakukan dengan cara yang tidak sama atau setara. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil simulasi berbagai ukuran garis kemiskinan dan tingkat ART proporsional untuk menghitung tingkat kemiskinan pada orang tua. Penggunaan berbagai garis kemiskinan dan tindakan *antiretroviral* proporsional menunjukkan sejauh mana kerentanan mempengaruhi jumlah lansia dan tingkat kemiskinan. Kemiskinan lansia berhubungan dengan jumlah rumah tangga (Adisa, 2019). Rumah tangga yang memiliki banyak anggota lebih rentan terhadap kemiskinan (Ruslan, 2017). Penelitian ini juga menyatakan bahwa nilai koefisien regresi logistik sebesar 0,208 dan nilai *odds ratio* sebesar 1,231, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga berkorelasi positif dengan status kemiskinan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan lansia lebih sering terjadi dalam rumah tangga dengan lebih banyak anggota daripada rumah tangga dengan anggota lebih sedikit. Jumlah lansia di setiap rumah tangga dapat mempengaruhi kebutuhan dasar untuk lansia di setiap rumah tangga dan berpotensi memiskinkan mereka.

6. Anggota Rumah Tangga Lansia Bekerja

Indonesia memiliki program kesejahteraan lanjut usia yang sangat terbatas dari pemerintah. Dengan demikian, mayoritas lansia di Indonesia bergantung pada keterlibatan mereka di pasar tenaga kerja. Keluarga, bagaimanapun, sangat penting dalam memberikan dukungan informal kepada lansia, terutama mereka yang sakit dan lemah. Kondisi di mana orang tua tinggal bersama anak-anak yang sudah dewasa adalah salah satu contoh dukungan informal yang diberikan. (Kochar, 2000).

Pemerintah telah menetapkan bahwa tanggung jawab keluarga untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada lansia. Meskipun demikian, pemerintah harus membantu melalui kebijakan publik yang efektif untuk melindungi kesejahteraan lansia bukan menyamaratakan kemiskinan lansia dengan kemiskinan secara umum. Laporan dari BPS menunjukkan bahwa 83,74% lansia bergantung pada penghasilan anggota rumah tangga yang bekerja; 10,97% bergantung pada kiriman dari pihak lain; 5,01% bergantung pada uang pensiun dan sedikit yang bergantung pada investasi (BPS, 2024).

Kebutuhan hidup lansia kerap dibebankan kepada anggota keluarga sebagai *caregiver* (Setiyoko & Nurchayati, 2021). Anggota keluarga, khususnya anak, diharapkan dapat merawat dan memenuhi kebutuhan lansia ketika memasuki masa pensiun. Kondisi ini sejalan dengan konsep *dependency ratio* yang menyebabkan beban tanggungan penduduk produktif akan semakin tinggi. Transfer dari keluarga dapat dianggap sebagai pengganti dari pendapatan yang diperoleh lansia sehingga mereka dapat menikmati masa pensiunnya tanpa harus bekerja, atau setidaknya dapat mengurangi jam kerja mereka (Huda, 2020). Transfer uang antar generasi memiliki peran penting untuk mengurangi partisipasi angkatan kerja lansia (Febriani, 2013). Berbeda dengan hasil penelitian Nguyen et al., (2012) menunjukkan bahwa transfer finansial yang diberikan anak mempengaruhi kebutuhan untuk bekerja lansia perempuan, tetapi tidak dengan lansia laki-laki. Hasil yang berbeda ini menunjukkan terdapat perbedaan preferensi antara *leisure* dan *labor* antara lansia laki-laki dan perempuan. Hasil lain oleh Cameron & Cobb-Clark (2008) adalah transfer finansial

antargenerasi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan finansial lansia dan bukan sebagai pengganti sumber pendapatan, sehingga lansia yang menerima transfer masih tetap bekerja karena jumlah transfer yang diterima tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya (Cameron & Cobb-Clark, 2008). Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda dalam meneliti pengaruh transfer finansial keluarga terhadap partisipasi tenaga kerja lansia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utomo et al., (2019). bahwa lansia tinggal bersama anak dapat menurunkan jam bekerja lansia.

Penelitian Kinasih & Rini, (2023). menunjukkan bahwa transfer finansial berdampak negatif pada partisipasi kerja lansia. Keinginan lansia untuk bekerja akan berkurang jika mereka menerima lebih banyak transfer finansial. Dengan koefisien -0.067 , variabel transfer finansial berdampak negatif terhadap status bekerja lansia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak transfer finansial yang diberikan akan mengurangi kemungkinan lansia untuk bekerja.

7. Pendidikan Lansia

Pendidikan merupakan salah satu determinan penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu, termasuk pada kelompok lansia. Akses terhadap pendidikan yang memadai tidak hanya relevan pada masa usia produktif, tetapi juga berdampak jangka panjang hingga usia tua. Pendidikan berperan dalam membentuk kapasitas seseorang dalam merencanakan keuangan, menjaga kesehatan, serta meningkatkan literasi sosial dan teknologi yang semakin dibutuhkan di era modern. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Hal ini tercermin dari temuan Vicerra et al., (2023) yang menekankan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap performa kognitif lansia, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan kemampuan lansia dalam mengakses layanan kesehatan dan memanfaatkan peluang ekonomi, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan inferensial untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi status kemiskinan pada rumah tangga yang memiliki anggota lansia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan terukur berdasarkan data statistik, sehingga dapat menggambarkan kondisi demografi serta kesejahteraan lansia secara akurat (Creswell, 2017). Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang memiliki anggota lansia, sebagaimana tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia yang tercatat dalam data Susenas 2024. Namun, untuk kepentingan penelitian ini, dilakukan penyaringan data dengan mengambil sub-populasi rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anggota lansia. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menyoroti kondisi sosial-ekonomi rumah tangga lansia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status kemiskinan rumah tangga yang dikodekan dalam bentuk biner, yaitu 1 untuk kategori prasejahtera/miskin dan 0 untuk kategori sejahtera/tidak miskin. Penentuan status kemiskinan ini merujuk pada klasifikasi internal kesejahteraan dalam data Susenas. Sementara itu, variabel independen yang digunakan terdiri dari beberapa indikator sosial-ekonomi utama. Pertama, tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang dikelompokkan secara ordinal (tidak bersekolah, 1–6 tahun, 7–9 tahun, 10–12 tahun, dan >12 tahun) untuk mengukur pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kondisi ekonomi

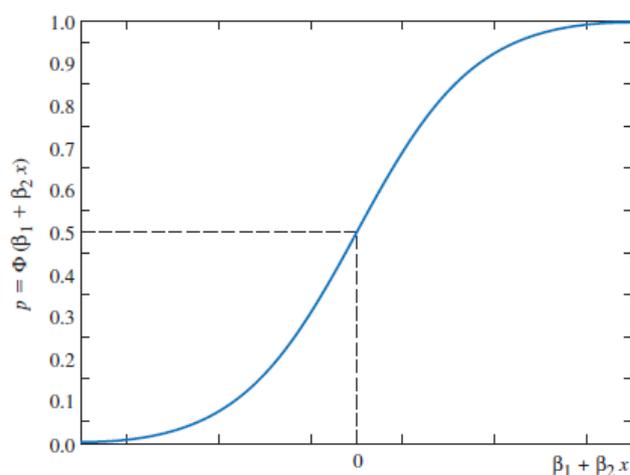
rumah tangga. Kedua, kepemilikan jaminan kesehatan (jamkes), yang merupakan variabel dummy untuk mencerminkan keberadaan akses terhadap perlindungan kesehatan formal. Ketiga, partisipasi dalam program bantuan sosial, yakni penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lansia (*atensi_lansia*), untuk melihat peran intervensi pemerintah dalam memitigasi kemiskinan rumah tangga lansia. Selain itu, digunakan pula jumlah anggota rumah tangga (*n_art*) dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (*n_art_bekerja*) untuk merepresentasikan kapasitas produktif internal rumah tangga.

Metode analisis yang digunakan terdiri dari dua tahap. Pertama, analisis deskriptif lansia di Indonesia serta kondisi kesejahteraan mereka dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kedua, analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan regresi Probit, yang sesuai untuk model dengan variabel dependen berskala biner. Dalam konteks ini, variabel dependen adalah status kemiskinan (1 = miskin, 0 = tidak miskin), sementara variabel independen meliputi pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota yang bekerja, status kepesertaan dalam program bantuan sosial, serta keberadaan lansia dalam rumah tangga.

Proses pengolahan dan analisis data melalui beberapa tahapan utama:

1. Pembersihan dan penyaringan data (*data cleaning*): mencakup seleksi observasi yang hanya mencakup rumah tangga dengan lansia, serta transformasi variabel menjadi bentuk yang sesuai (biner atau numerik).
2. Analisis deskriptif: untuk menggambarkan profil karakteristik rumah tangga lansia berdasarkan variabel-variabel utama, menggunakan distribusi frekuensi dan proporsi.
3. Analisis inferensial: menggunakan model regresi Probit untuk mengestimasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemungkinan kemiskinan rumah tangga.

Model Probit digunakan untuk mengestimasi *binary dependent variable*. Pendekatan pendekatan model probit lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan OLS bila mengestimasi *binary dependent variable* sebab model OLS akan memunculkan beberapa masalah seperti adanya heteroskedastisitas dan tidak terdistribusi normal (Opić, 2020). Pada model probit, menjamin probabilitas dari suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1.



Gambar 2. Standard normal cumulative distribution function

Sumber: Hill et al., 2018

Persamaan model ekonometrika yang digunakan antara lain:

$$Kemiskinan_i = \beta_0 + \beta_1 pendidikan_i + \beta_2 jamkes_i + \beta_3 atensi_lansia_i + \beta_4 pkh_catat_i + \beta_5 n_art_i + \beta_6 n_art_bekerja_i + a_i + u_{it}$$

Dimana

Kemiskinan_i : 1 bila lansia berada dalam kategori pra sejahtera/miskin, 0 lainnya

jamkes_{it} : lamanya pendidikan (tahun)

jamkes_{it} : 1 bila mendapatkan salah satu jaminan kesehatan, 0 lainnya

atensi_lansia_{it} : 1 bila mendapatkan atensi lansia, 0 lainnya

pkh_catat_{it} : 1 bila tercatat sebagai penerima PKH, 0 lainnya

n_art_{it} : jumlah anggota rumah tangga

n_art_bekerja_{it}: jumlah anggota rumah tangga bekerja

a_i : *unobserved heterogeneity*

u_{it} : *idiosyncratic error*

Estimasi dilakukan dalam dua tahap: pertama, estimasi koefisien dari model Probit; dan kedua, perhitungan efek marginal (*marginal effects*) untuk memudahkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel terhadap probabilitas kemiskinan. Validitas dan konsistensi data diperiksa melalui triangulasi berbagai sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman mengenai determinan kemiskinan di kalangan rumah tangga lansia, serta menyajikan dasar bukti yang kuat bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan penuaan penduduk di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan analisis inferensial, dilakukan terlebih dahulu analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga yang memiliki anggota lansia. Tabel di bawah ini menyajikan distribusi frekuensi dengan menggunakan penimbang populasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Rumah Tangga Yang Memiliki Lansia (>60 th)

Variabel	Kategori	Persentase (%)
Kemiskinan	Pra Sejahtera/ Miskin	11,03
	Sejahtera/Tidak Miskin	88,97
pendidikan	Tidak Bersekolah	13,49
	1-6 tahun	32,57
	7-9 tahun	17,94
	10-12 tahun	25,94

Variabel	Kategori	Persentase (%)
	>12 tahun	10,08
jamkes	Ada	75,42
	Tidak ada	24,58
atensi_lansia	Ada	2,10
	Tidak ada	97,90
pkh_catat	324,452	17,34
		82,66
n_art	1-5	69,55
	6-10	29,69
	>10	0,76
art_bekerj~h	0	3,45
	1-5	95,89
	6-10	0,65
	>10	0,00

Sumber : Susenas 2024

Berdasarkan status kemiskinan, sebanyak 11,03% rumah tangga termasuk dalam kategori prasejahtera atau miskin, sementara mayoritas (88,97%) berada dalam kategori sejahtera atau tidak miskin. Dari sisi pendidikan kepala rumah tangga, proporsi terbesar memiliki lama pendidikan 1–6 tahun (32,57%), disusul oleh kelompok 10–12 tahun (25,94%) dan 7–9 tahun (17,94%). Hanya sekitar 10,08% responden yang menempuh pendidikan lebih dari 12 tahun, sedangkan 13,49% tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Dalam hal kepemilikan jaminan kesehatan, 75,42% rumah tangga tercatat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan seperti BPJS, jamkesda, asuransi swasta, Perusahaan/ kantor. Sementara terdapat 24,58% tidak memiliki akses tersebut. Variabel *atensi_lansia*, yang mencerminkan perhatian khusus terhadap anggota lansia dalam rumah tangga melalui program sosial, hanya dimiliki oleh 2,10% rumah tangga, menunjukkan bahwa cakupan intervensi masih sangat terbatas. Demikian pula, hanya 17,34% rumah tangga yang tercatat dalam data penerima PKH, sedangkan 82,66% tidak tercatat sebagai penerima.

Dari sisi struktur rumah tangga, sebagian besar memiliki anggota 1–5 orang (69,55%), dan sekitar 29,69% beranggotakan 6–10 orang. Hanya 0,76% yang memiliki lebih dari 10 anggota. Mengenai komposisi tenaga kerja dalam rumah tangga, mayoritas memiliki 1–5 anggota yang bekerja (95,89%), dan hanya sebagian kecil yang memiliki 6–10 anggota bekerja (4,05%).

4.2. Pembahasan Hasil

Hasil estimasi menggunakan probit model menunjukkan bahwa variabel-variabel sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, partisipasi dalam program bantuan sosial, dan struktur rumah tangga secara signifikan memengaruhi probabilitas seorang penduduk lansia tergolong miskin. Temuan ini memberikan gambaran yang kuat bahwa intervensi yang berfokus pada peningkatan pendidikan, perluasan cakupan jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga memiliki potensi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan lansia di Indonesia. Efek marginal yang diperoleh dari model ini memberikan

informasi praktis yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Tabel 2 Hasil Estimasi Terhadap Kemiskinan Lansia

VARIABLES	(1) Probit	(2) Margins
pendidikan	-0.0420*** (0.000684)	-0.00705*** (0.000114)
jamkes	-0.273*** (0.00716)	-0.0459*** (0.00120)
atensi_lansia	0.0487*** (0.0120)	0.00818*** (0.00201)
pkh_catat	0.311*** (0.00728)	0.0523*** (0.00122)
n_art	0.236*** (0.00194)	0.0397*** (0.000319)
art_bekerja_jumlah	-0.165*** (0.00365)	-0.0278*** (0.000611)
Constant	-1.650*** (0.00992)	
Observations	324,452	324,452

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berdasarkan hasil tersebut, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas lansia berada dalam kemiskinan. Koefisien marginal sebesar -0,00705 menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan menurunkan kemungkinan individu menjadi miskin sebesar 0,70 poin persentase. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan membuka akses terhadap peluang kerja yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan lansia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Bintang & Woyanti (2018) dimana adanya pengaruh signifikan antara lama sekolah lansia terhadap kemiskinan lansia. Hasil penelitian Faritz & Soejoto, (2020) menyatakan bahwa lama sekolah juga berpengaruh terhadap kemiskinan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan mengakibatkan perubahan pada kemiskinan. Hasil penelitian Sholeh (2022) analisis determinan tingkat kemiskinan perempuan lansia Provinsi DI Yogyakarta Variabel Lama Sekolah (X!) memiliki nilai *odds ratio* sebesar 60%. Itu artinya bahwa semakin tinggi semangat belajar dan tingkat pendidikan perempuan lansia maka akan berdampak pada probabilitas kemiskinan perempuan lansia sebesar 60% dengan asumsi hal-hal lain tetap. Pada hasil estimasi diketahui bahwa variabel lama sekolah berkorelasi positif dan signifikan, sehingga variabel lama sekolah berpotensi untuk mempengaruhi kemiskinan perempuan lansia di Provinsi DI Yogyakarta.

Kepemilikan jaminan kesehatan (jamkes) juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, dengan nilai efek marginal -0,0459. Artinya, individu yang memiliki jaminan kesehatan

memiliki kemungkinan 4,46 poin persentase lebih rendah untuk hidup dalam kemiskinan, yang dapat mencerminkan peran protektif dari jaminan kesehatan terhadap pengeluaran tak terduga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wibowo & Handayani (2024) yang menggunakan data sekunder berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 yang dianalisis menggunakan metode regresi logistik biner. Penelitian menunjukkan hasil bahwa kepemilikan jaminan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap partisipasi kerja lansia

Atensi lansia menunjukkan hubungan positif terhadap status kemiskinan rumah tangga lansia. Efek marginal sebesar 0,00818 mengindikasikan bahwa keberadaan lansia yang memperoleh perhatian khusus dalam rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin sebesar 0,82 poin persentase. Hubungan positif ini dimungkinkan karena program atensi lansia umumnya menyasar kelompok lansia yang tergolong tidak sejahtera, sehingga keberadaannya sekaligus merepresentasikan kondisi ekonomi rumah tangga yang rentan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hakim et al. (2024) yang menyatakan bahwa program Atensi Lansia menunjukkan dampak positif terhadap kemiskinan lansia.

Variabel *pkh_catat* mencerminkan pencatatan rumah tangga sebagai penerima PKH. PKH menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap status kemiskinan. Efek marginal sebesar 0,0523 mengindikasikan bahwa rumah tangga yang tercatat sebagai penerima PKH memiliki kemungkinan 5,23 poin persentase lebih tinggi untuk tergolong miskin. Temuan ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa program PKH berhasil menyasar rumah tangga yang memang berada dalam kondisi ekonomi rentan atau tidak sejahtera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliana et al. (2024) menunjukkan terdapat pengaruh positif secara simultan antara PKH terhadap kemiskinan di Kecamatan Ingin Jaya.

Hasil penelitian Jumlah anggota rumah tangga (*n_art*) turut memberikan kontribusi positif terhadap kemiskinan. Efek marginal sebesar 0,0397 menunjukkan bahwa setiap tambahan satu anggota rumah tangga meningkatkan probabilitas kemiskinan sebesar 3,97 poin persentase. Hal ini dapat dipahami karena semakin besar jumlah tanggungan dalam rumah tangga, semakin besar pula tekanan terhadap pendapatan yang tersedia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sholeh (2022) menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, jumlah anggota rumah tangga lansia yang bekerja (*art_bekerja_jumlah*) justru menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap status kemiskinan. Efek marginal sebesar -0,0278 menunjukkan bahwa setiap tambahan satu anggota yang bekerja dapat mengurangi probabilitas rumah tangga menjadi miskin sebesar 2,78 poin persentase, mencerminkan peran penting partisipasi tenaga kerja dalam mengurangi kerentanan ekonomi. Hasil penelitian Hermawan & Purbadharmaja (2024) menunjukkan bahwa lansia yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan lansia di Desa Melinggih. Secara umum, hasil ini memperkuat argumentasi bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi langsung, tetapi juga oleh faktor sosial, struktural, dan programatik. Pendidikan, perlindungan sosial, struktur rumah tangga, dan partisipasi tenaga kerja merupakan determinan penting dalam menjelaskan kerentanan kemiskinan di Indonesia. Efek marginal dari masing-masing variabel memberikan gambaran yang konkret bagi perancang kebijakan untuk menyasar intervensi yang tepat dan efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pada rumah tangga yang memiliki lansia.

V. PENUTUP

Indonesia saat ini berada dalam tahap di mana angka kelahiran mulai menurun tetapi

populasi usia produktif masih mendominasi, namun dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia diproyeksi akan memasuki tahap selanjutnya yakni peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Tanpa strategi yang tepat, peningkatan jumlah lansia dapat menjadi beban ekonomi yang besar bagi negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu pemberian bantuan sosial kepada lansia. Dengan bantuan sosial tersebut, lansia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat mengurangi kemiskinan lansia.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi probabilitas kemiskinan, khususnya pada rumah tangga yang memiliki anggota lansia, dengan menggunakan pendekatan regresi Probit terhadap data Susenas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap status kemiskinan, menandakan bahwa peningkatan jenjang pendidikan mampu memperkuat kapasitas individu dan rumah tangga untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kepemilikan jaminan kesehatan juga terbukti menurunkan probabilitas kemiskinan, mencerminkan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan sebagai instrumen proteksi ekonomi. Sebaliknya, perhatian terhadap anggota lansia dalam rumah tangga dan status kepesertaan dalam program bantuan sosial seperti PKH berasosiasi positif dengan probabilitas kemiskinan, yang dapat mengindikasikan beban ekonomi tambahan maupun ketepatan sasaran program bantuan. Selain itu, struktur rumah tangga juga memainkan peran penting: rumah tangga dengan jumlah anggota yang lebih besar cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan, sementara peningkatan jumlah anggota yang bekerja menurunkan risiko tersebut.

Temuan ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, peningkatan investasi pada sektor pendidikan, termasuk pendidikan lansia atau orang dewasa dan pelatihan vokasional, sangat penting untuk mendorong mobilitas sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Kedua, perluasan cakupan dan akses jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat miskin, harus menjadi prioritas untuk melindungi rumah tangga dari risiko kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Ketiga, program perlindungan sosial seperti PKH perlu terus diperkuat dengan sistem targeting yang lebih presisi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar bantuan tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Keempat, dukungan terhadap partisipasi ekonomi anggota rumah tangga, termasuk lansia yang masih produktif, dapat menjadi strategi tambahan dalam memperkuat kesejahteraan keluarga. Terakhir, kolaborasi lintas sektor dan pelibatan pemerintah daerah serta komunitas dalam merancang program dukungan lansia perlu diintensifkan, guna menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi era penuaan penduduk.

Kebijakan yang menyeluruh dan berbasis bukti, Indonesia dapat mengantisipasi transisi demografi menuju era dominasi lansia secara lebih adil dan inklusif, serta memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok usia produktif, tetapi juga oleh seluruh warga negara sepanjang siklus hidupnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk: (1) menganalisis kemiskinan lansia dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan lansia; (2) mengembangkan model kemiskinan lansia yang lebih akurat; dan melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan alternatif yang diusulkan.

Saran perbaikan untuk penelitian berikutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan data dimana hanya menggunakan data SUSENAS tahun 2024. Penelitian ini belum menunjukkan perubahan antar tahun atau antar data Susenas sebelumnya dalam data set longitudinal. Selain itu, jumlah variabel yang diteliti hanya data Susenas tahun 2024 yang merupakan sampel penduduk Indonesia dan variabel pendidikan serta anggaran pemerintah seperti anggaran jaminan kesehatan, anggaran PKH dan anggaran atensi lansia. Oleh karena itu, penelitian

selanjutnya dapat menambahkan Susenas tahun-tahun sebelumnya dan atau menambahkan variabel-variabel penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, O. (2019). Why Are Some Older Persons Economically Vulnerable And Others Not? The Role Of Socio-Demographic Factors And Economic Resources In The Nigerian Context. *Ageing International*, 44(2), 202–222.
- Aguiar, B., & Macário, R. (2017). The need for an Elderly centred mobility policy. *Transportation Research Procedia*, 25, 4355–4369. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.309>
- Alperin, M. N. P., Perquin, M., & Giordana, G. A. (2024). Population ageing and public finance burden of dementia: Micro-simulations evaluating risk factors, treatments and comorbidities in Luxembourg. *Journal of the Economics of Ageing*, 28(May). <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2024.100517>
- Barsukov, V. N. (2019). From The Demographic Dividend To Population Ageing: World Trends In The System-Wide Transition. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, 12(4), 167–182.
- Basrowi, R. W., Rahayu, E. M., Khoe, L. C., Wasito, E., & Sundjaya, T. (2021). The road to healthy ageing: what has Indonesia achieved so far? *Nutrients*, 13(10), 3441.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh pdrb, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1).
- Bloom, D. E., Canning, D., & Fink, G. (2011). Implications Of Population Aging For Economic Growth. *NBER Working Paper Series*.
- BPS. (2023). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2024). Statistik Penduduk Lanjut Usia. *Badan Pusat Statistik*.
- Cameron, L. A., & Cobb-Clark, D. (2008). Do Coresidency And Financial Transfers From The Children Reduce The Need For Elderly Parents To Works In Developing Countries? *Journal of Population Economics*.
- Cho, D., & Lee, K. woo. (2025). Pension Sustainability And Government Effectiveness In The Presence Of Population Aging. *Economic Modelling, Elsevier*, 147(C). <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107048>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Desvigne. (2018). Social Protection For Older Persons: Policy Trends And Statistics 2017- 19. *Social Protection Department International Labour Office*.
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia. *PRAKARSA*.
- Dobrokhleb, V., & Barsukov, V. (2017). Demographic Theories and the Regional Aspect of Population Ageing. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, 10(6 (54)), 89–103. <https://doi.org/10.15838/esc.2017.6.54.6>
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 15–21.
- Febriani, R. E. (2013). Dapatkah Transfer Uang Antar Generasi Menjelaskan Trend Partisipasi Angkatan Kerja Lanjut Usia Di Indonesia? *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 119–128.
- Feby, C. A. D., Afina, K. N., & Mahes, Z. A. (2025). Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lansia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 958–964.
- Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, Putra, R. R., & Afryadi. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Hermawan, K., & Purbadharmaja, I. B. P. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kesejahteraan Lansia Di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 685–700.
- Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2018). *Principles of econometrics*. John Wiley & Sons.
- Huda, C. E. (2020). Family Transfers, Coresidency, Elderly Labor Supply And Welfare Perspective: Evidence From Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(1), 47–63.
- Indrawati, S. M. (2020). Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kallestrup-Lamb, M., Marin, A. O. K., Menon, S., & Sogaard, J. (2024). Aging populations and expenditures on health. *Journal of the Economics of Ageing*, 29(June), 100518. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2024.100518>
- Kartini, P. Y. L., & Kartika, I. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Lansia Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 435–470.
- Kemensos. (2025). Program Keluarga Harapan Bantu Turunkan Angka Kemiskinan hingga 2,2%. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. <https://kemensos.go.id/infografis/sekretariat-jenderal/pkh-bantu-turunkan-angka-kemiskinan-hingga-22>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69.
- Khan, N., Khan, S., Tan Swee Leng, O., Booi Chen, T., & Gale Vergara, R. (2017). Explore the Factors that Influence Elderly Poverty. *Journal of Southeast Asian Research*, 2017, 1–13.
- Kim, S. W., & Mah, J. S. (2021). Poverty of the elderly in Korea. *Res World Econ*, 12(146), 10–5430.
- Kinasih, L. S., & Rini, A. N. (2023). Pengaruh Transfer Finansial Anak terhadap Partisipasi Kerja Orang Tua Lansia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Kochar, A. (2000). Parental benefits from intergenerational coresidence: empirical evidence from rural Pakistan. *Journal of Political Economy*, 108(6), 1184–1209.
- Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 5.
- Lai, Y., Chen, R., Liu, X., Tian, W., Wu, B., Zhang, Y., Zhang, X., Yang, H., Yin, F., Xu, Y., Miao, W., Shan, L., Wu, Q., Shi, B., Leng, F., & Li, Y. (2025). Health poverty reduction effect of medical insurance in China's middle-aged and elderly populations: a cross-sectional study. *BMJ Open*, 15(4), e085226. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-085226>
- Liao, Z., Zhou, R., Huang, J., Wang, Q., & Xu, J. (2025). The impact of participating in basic medical insurance on depression scores of rural middle-aged and older adults—an empirical analysis based on CFPS data. *Frontiers in Public Health*, 13(April), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1583822>
- Lindiasari, P., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Luthfi, N. A., & Hanri, M. (2024). Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja Out-Of-Pocket Lansia: Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 5(2), 146–158.
- Ma, X., & Oshio, T. (2020). The impact of social insurance on health among middle- aged and older adults in rural China: a longitudinal study using a three-wave nationwide survey. *BMC Public Health*, 20(1), 1–9.
- Menike, H. R. A. (2016). Impact of demographic dividend on the economy of developed and developing countries. *Department of Economics, University of Kelaniya*, Pp. 170-176, *Kelaniya, Sri Lanka*.
- Moertiningsih, A. S., Fiona, H., & Jan, P. (2014). Social Assistance for The Elderly: The Role of The Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Programme in Fighting Old Age Poverty. *TNP2K Working Paper*.
- Mooventhan, A., & Nivethitha, L. (2017). Evidence based effects of yoga practice on various health related problems of elderly people: A review. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 21(4), 1028–1032. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.01.004>
- Muis, I., Agustang, A., & Adam, A. (2020). Lansia Miskin: Demografi Sosial, Distribusi Pekerjaan,

- Masalah Kesehatan & Perlindungan Sosial. *Asian Journal of Social Sciences & Humanities*, 9(September), 40–48.
- Nguyen, H. M., & Nguyen, T. A. (2019). Investigating the determinants of household welfare in the Central Highland, Vietnam. *Cogent Economics & Finance*, 7(1), 1684179.
- Nguyen, Liu, A. Y. C., & Booth, A. L. (2012). Monetary transfers from children and the labour supply of elderly parents: Evidence from Vietnam. *Journal of Development Studies*, 48(8), 1177–1191.
- Opić, S. (2020). Specifics of logit and probit regression in education sciences - Why wouldn't we use it? *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(6), 1557–1568. <https://doi.org/10.18844/CJES.V15I6.5305>
- Pak, T. Y. (2021). What are the effects of expanding social pension on health? Evidence from the Basic Pension in South Korea. *Journal of the Economics of Ageing*.
- Panjawa, J. L., & Triyanto, J. (2020). Determinan Keterlibatan Lansia Dalam Pasar Kerja Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati*.
- Parwodiwiyono, S. (2022). Determinan Penduduk Lanjut Usia Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(3), 468553.
- Prahastiwi, D. P., & Jatmiko, Y. A. (2023). Partisipasi Kerja Lansia Pada Rumah Tangga Tunggal Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(1), 118–128.
- Pratiwi, A. B., Setyaningsih, H., Kok, M. O., Hoekstra, T., Mukti, A. G., & Pisani, E. (2021). Is Indonesia Achieving Universal Health Coverage? Secondary Analysis of National Data On Insurance Coverage, Health Spending and Service Availability. *BMJ Open*, 11(10), e050565.
- Putra, P., & Sahara. (2015). DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL The effect Of Social Aid To Economic Growth And Poverty. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(3), 161–171.
- Rolindrawan, D. (2015). The Impact of BPJS Health Implementation for the Poor and Near Poor on the Use of Health Facility. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 550–559.
- Ruslan, I. (2017). "Nilai Anak" dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik dan Agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(2), 18–33.
- Setiyoko, L. O., & Nurchayati, N. (2021). Gratitude Pada Caregiver Keluarga Yang Merawat Lansia. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(3), 151–164.
- Sholeh, M. (2022). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1), 61–72.
- Southern, E., & McLeod, A. (2015). Is cardiac rehabilitation effective in improving quality of life post cardiac event? *British Journal of Cardiac Nursing*, 10(12), 595–602.
- Styawan, D. A. (2019). Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi SDG's*, 573–582.
- Tampubolon, G., & Hanandita, W. (2014). Poverty and mental health in indonesia. *Social Science and Medicine*, 106, 20–27.
- TNP2K. (2017). Penduduk Lanjut Usia (Lansia) dan Keterjangkauan Program Perlindungan Sosial bagi Lansia. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- TNP2K. (2020). Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & The SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/file/4893/download?token=n6pi7yNM>
- TNP2K & SMERU. (2020). Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & The SMERU Research Institute*.
- Utomo, A., Mcdonald, P., Utomo, I., Cahyadi, N., & Sparrow, R. (2019). Social engagement and the elderly in rural Indonesia. *Social Science & Medicine*, 229, 22–31.
- Vicerra, P. M. M., Wu, J., & Wu, Y. (2023). Speed of aging of populations by socioeconomic subgroups in China: A cross-sectional study of cognitive performance. *SSM - Population Health*, 24(September). <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101515>
- Viryamitha, M. D., & Purwanti, P. A. P. (2020). Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi Dan Demografi Terhadap Kesejahteraan Lansia Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(9), 2065–2092.
- Vu, L. H., & Nguyen, T.-A. (2021). Elderly poverty in Vietnam: Trends and determinants. *Journal*

of *Population and Social Studies [JPSS]*, 29, 526–543.

- Wahyuni, E. T. (2020). Hubungan Sosiodemografi (Pendidikan, Pekerjaan Dan Penghasilan) Dengan Kualitas Hidup Lansia. *MOTORIK Journal Kesehatan*. <https://media.neliti.com/media/publications/515759-none-743d6f8a.pdf>
- Waluyo, B., & Khoirunurrofik, K. (2021). Hubungan program keluarga harapan (PKH) dengan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan non tertinggal di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*.
- Wibowo, E. F., & Handayani, D. (2024). Asosiasi Jaminan Sosial dengan Partisipasi Kerja Penduduk Asosiasi Jaminan Sosial dengan Partisipasi Kerja Lansia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Kelua*.
- Woetzel, J., Tonby, O., Thompson, F., Burtt, P., & Lee, G. (2014). Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity. *McKinsey Global Institute*.
- Yuliana, Y., Adamy, Y., Darnelly, D., Saputra, E., & Rahmayanti, S. (2024). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Aceh Besar Di Kecamatan Ingin Jaya. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains Dan Humaniora*.
- Zainudin, M. Z., & Kamarudin, M. F. (2015). Impacts on the implementation of social policy: Comparative study in Malaysia and Indonesia. *Asian Social Science*, 11(17), 48.
- Zhang, M., & Wu, M. (2024). The impact of rural health insurance on vulnerability to chronic poverty among rural residents in China: analysis using Probit and IVprobit models. *Frontiers in Public Health*, 12(October), 1481019. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1481019>
- Zhao, Y., Said, R., Ismail, N. W., Haris, A., & Hamzah, H. Z. (2024). Impact of population ageing on the application of industrial robots: Evidence from China. *Journal of the Economics of Ageing*, 29(August), 100529. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2024.100529>

OPEN ACCESS

Citation:

Azzahra M. Putri Sayekti,
Kusumaningtyas, T. A., & Cahyono,
J. P. (2025). Pengaruh Keterbukaan
Perdagangan, Foreign Direct
Investment, dan Tenaga Kerja
Terhadap PDB Per Kapita Negara-
Negara ASEAN. *Jurnal Budget: Isu
Dan Masalah Keuangan Negara*,
10(1), 42–57

Received: April 30, 2025

Accepted: May 10, 2025

Revised: June 18, 2025

Published: June 30, 2025

© The Author(s)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

PENGARUH KETERBUKAAN PERDAGANGAN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDB PER KAPITA NEGARA-NEGARA ASEAN

Effect of Trade Openness, Foreign Direct Investment, and Labor on GDP Per Capita of ASEAN Countries

Azzahra Mubyaring Putri Sayekti¹,
Tiara Ayu Kusumaningtyas²,
Jordan Putra Cahyono³

Abstract

Trade openness has been widely studied for its impact on economic growth, yet its specific role in ASEAN countries, with diverse levels of integration and trade policies, remains underexplored. This study examines the effects of trade openness, foreign direct investment (FDI), and labor on GDP per capita in ASEAN countries using panel data from 2008 to 2022. Employing a fixed-effect regression model with Driscoll-Kraay standard errors, the findings reveal that trade openness has a significant yet negative impact on GDP per capita, while FDI and labor exhibit significant positive effects. This study recommends ASEAN countries to diversify exports, reduce dependency on foreign inputs, strengthen local industries, attract high-quality FDI, and improve labor capacity through education and vocational training. Strengthening intraregional trade cooperation is also crucial to reduce development disparities and promoting inclusive growth.

Keywords: ASEAN, Foreign Direct Investment, GDP Per Capita, Labor, Trade Openness

JEL Classification: E22, E24, F13, F16

¹ Universitas Airlangga, Surabaya dan azzahra.mubyaring.putri-2023@feb.unair.ac.id

² Universitas Airlangga, Surabaya dan tiara.ayu.kusumaningtyas-2023@feb.unair.ac.id

³ Universitas Airlangga, Surabaya dan jordan.putra.cahyono-2023@feb.unair.ac.id

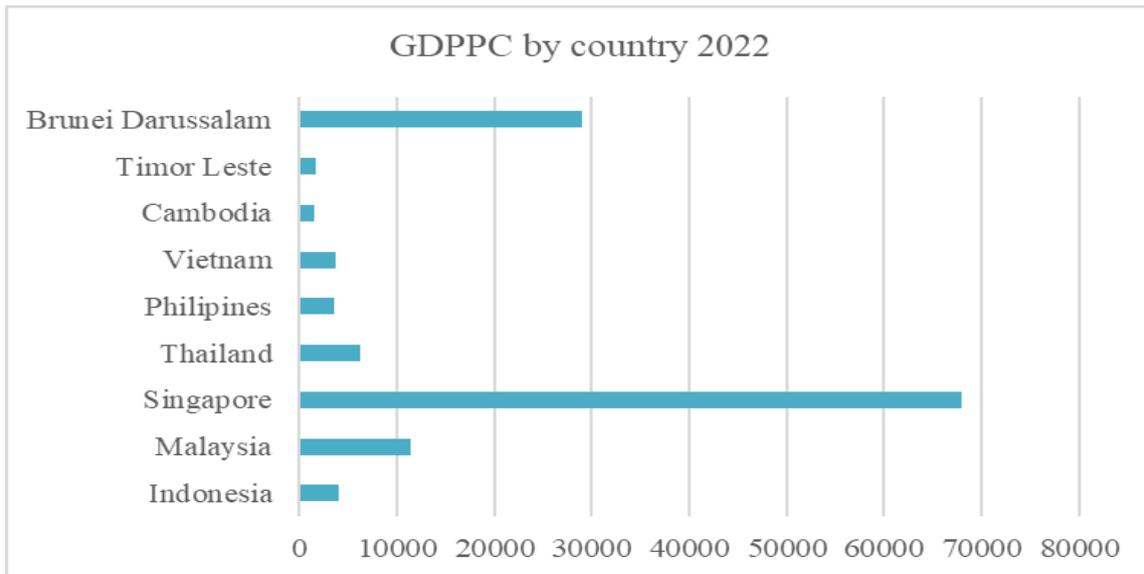
I. PENDAHULUAN

Keterbukaan perdagangan telah lama diakui sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai literatur yang menunjukkan adanya hubungan positif antara liberalisasi perdagangan dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN (de Almeida et al., 2024; Monyela & Saba, 2024). Banyak studi dalam bidang ekonomi menyimpulkan bahwa liberalisasi atau keterbukaan perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (de Almeida et al., 2024). Negara yang membuka diri terhadap perdagangan internasional cenderung memiliki akses lebih luas terhadap pasar global, teknologi, serta arus investasi asing yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa negara berkembang yang menerapkan kebijakan perdagangan terbuka dapat memperoleh manfaat signifikan berupa peningkatan ekspor, efisiensi ekonomi, dan alokasi sumber daya yang lebih optimal (Chen, 2024). Secara khusus, di kawasan ASEAN, keterbukaan perdagangan telah menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya, terutama pasca pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Banyak negara anggota telah mengurangi hambatan perdagangan guna mendorong arus barang dan jasa antarnegara yang lebih bebas dan efisien.

Investasi Asing Langsung (FDI) memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pasar tenaga kerja, khususnya di negara-negara berkembang. Bukti empiris menunjukkan bahwa arus masuk FDI dapat berdampak signifikan terhadap kondisi tenaga kerja melalui berbagai saluran transmisi, seperti limpahan upah, alih keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja (Liu et al., 2020). Perusahaan multinasional umumnya menawarkan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan domestik, sehingga berpotensi menetapkan standar baru di pasar tenaga kerja. Namun, besarnya manfaat tersebut bersifat heterogen dan bergantung pada sektor ekonomi serta tingkat keterampilan tenaga kerja.

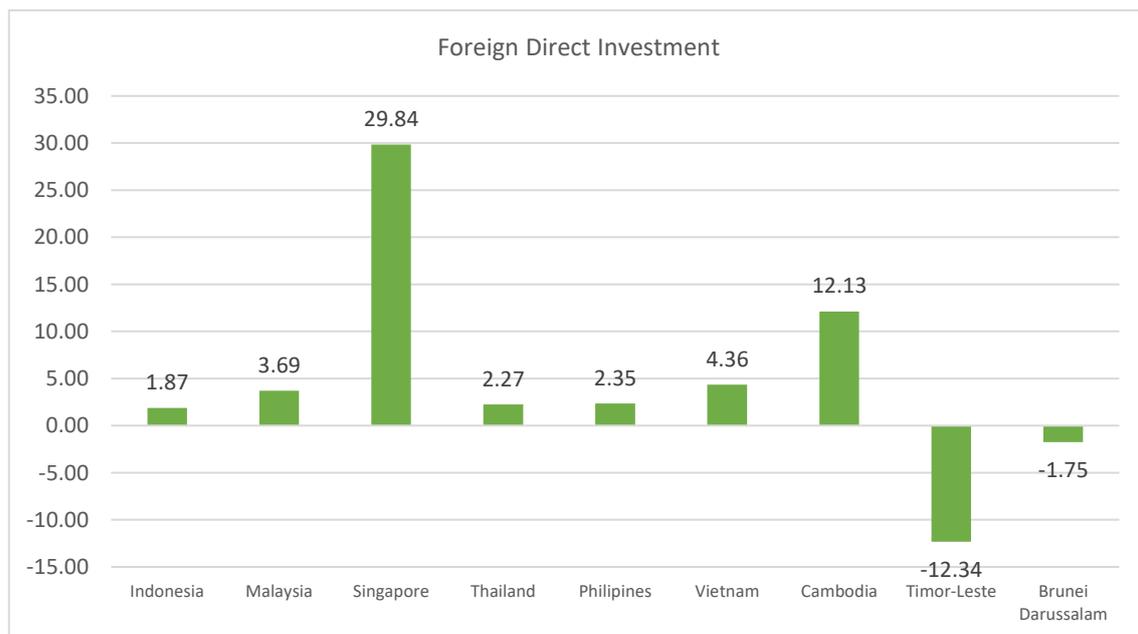
Meta-analisis terbaru mengungkap bahwa dampak FDI terhadap pasar tenaga kerja domestik sangat dipengaruhi oleh kapasitas absorpsi, kualitas institusi, dan kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik (López-Cabarcos et al., 2022). Selain itu, peningkatan teknologi yang didorong oleh FDI dapat memicu perubahan teknologi yang cenderung berpihak pada tenaga kerja terampil, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil. Dalam perspektif teori Keynes, investasi merupakan salah satu komponen penting dalam *output* nasional, di mana salah satu bentuknya adalah FDI. Sementara itu, dalam Teori Pertumbuhan Neoklasik, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang direpresentasikan dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, sehingga kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting (Ifa, dkk, 2020).



Gambar 1. GDP Per Kapita di ASEAN (USD)

Sumber: World Bank (2024)

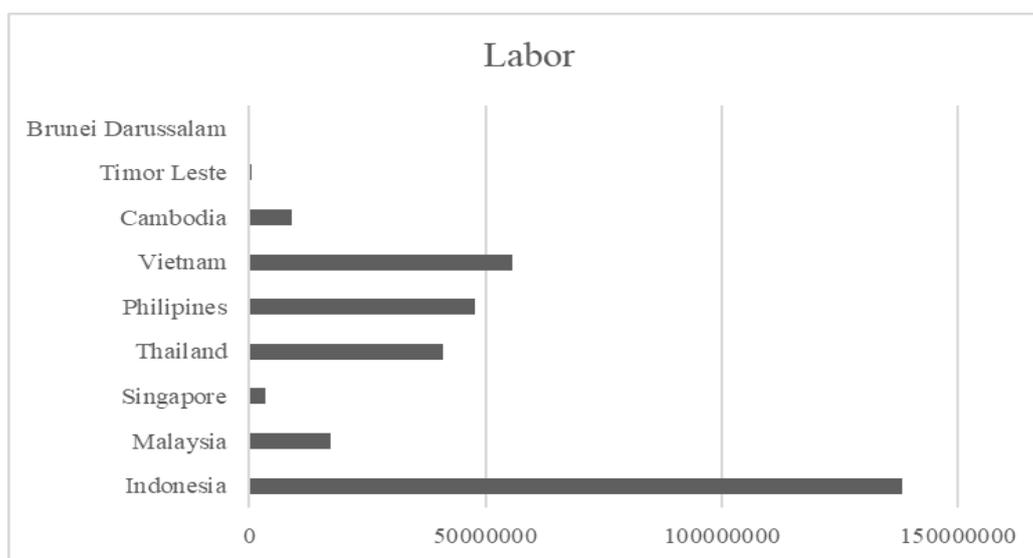
Gambar 1 menunjukkan perekonomian Asia Tenggara menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal PDB per kapita, yang mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi dan produktivitas yang berbeda-beda antar negara anggota. Sebagai contoh, Singapura mencatatkan PDB per kapita tertinggi pada tahun 2022 sebesar USD 67.948,89, yang mencerminkan posisinya sebagai pusat keuangan global. Sebaliknya, Kamboja mencatatkan angka terendah, yakni USD 1.488,81, menunjukkan tantangan dalam infrastruktur ekonomi dan pertumbuhan industrinya. Negara-negara seperti Indonesia (USD 4.073,56) dan Filipina (USD 3.528,33) tergolong negara berpendapatan menengah yang sedang dalam proses industrialisasi. Kesenjangan ini menunjukkan kompleksitas dinamika ekonomi di ASEAN, yang menuntut strategi berbeda dalam upaya integrasi dan pertumbuhan yang merata di kawasan.



Gambar 2. FDI di ASEAN (% dari GDP)

Sumber: World Bank (2024)

Pada gambar 2, aliran FDI juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan di kawasan ASEAN. Singapura menjadi penerima terbesar dengan FDI sebesar 29,84% terhadap PDB, diikuti oleh Kamboja (12,13%) dan Vietnam (4,36%). Sementara itu, Malaysia menerima 3,69%, dan negara-negara lain seperti Filipina (2,35%), Thailand (2,27%), serta Indonesia (1,87%) mencatat angka yang lebih rendah. Beberapa negara bahkan mengalami arus keluar FDI, seperti Brunei Darussalam (-1,75%) dan Timor Leste (-12,34%). Perbedaan ini mencerminkan pengaruh dari kebijakan ekonomi, kematangan pasar, serta iklim investasi yang bervariasi antar negara.



Gambar 3. Tenaga Kerja di ASEAN (Jiwa)

Sumber: World Bank (2024)

Distribusi tenaga kerja di negara-negara ASEAN mencerminkan perbedaan demografi dan kapasitas ekonomi yang nyata yang ditunjukkan pada gambar 3. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 138 juta orang, menjadikannya pasar tenaga kerja terbesar di kawasan. Vietnam dan Filipina menyusul dengan jumlah masing-masing 55,7 juta dan 47,9 juta, sementara Thailand memiliki 40,9 juta tenaga kerja. Malaysia memiliki tenaga kerja sekitar 17,1 juta, menempatkannya di posisi menengah. Sebaliknya, negara-negara dengan skala ekonomi yang lebih kecil seperti Kamboja (9,1 juta), Singapura (3,5 juta), Timor Leste (580.820), dan Brunei Darussalam (225.294) menunjukkan jumlah tenaga kerja yang jauh lebih kecil.



Gambar 4. Keterbukaan Perdagangan di ASEAN (% dari GDP)

Sumber: World Bank (2024)

Gambar 4 menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan juga sangat bervariasi. Singapura mencatat angka tertinggi sebesar 332,98%, mencerminkan integrasinya yang mendalam dengan pasar internasional. Disusul oleh Vietnam (183,79%), Brunei Darussalam (146,97%), dan Malaysia (146,66%). Negara lain seperti Thailand (132,86%), Kamboja (123,19%), dan Timor Leste (97,64%) mencatat keterbukaan perdagangan menengah, sedangkan Filipina (72,43%) dan Indonesia (45,47%) berada pada tingkat yang relatif rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya peluang dan tantangan dalam integrasi perdagangan di kawasan.

Meskipun banyak studi telah mengkaji pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis peran keterbukaan perdagangan di negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat integrasi dan kebijakan perdagangan yang beragam (Nam & Ryu, 2024; Adha et al., 2024). Sebagian besar kajian sebelumnya mengadopsi skala global atau memusatkan analisis pada kelompok negara dengan tingkat integrasi perdagangan yang seragam, sehingga kurang mengeksplorasi keragaman kebijakan, kapasitas absorpsi teknologi, dan struktur pasar tenaga kerja di tiap anggota ASEAN (Breuer & Dehaan, 2024; Emami et al., 2024; Nam & Ryu, 2024). Padahal, perbedaan tajam dalam PDB per kapita (misalnya antara Singapura USD 67.949 dan Kamboja USD 1.489 pada 2022), rasio FDI terhadap PDB, serta komposisi tenaga kerja menunjukkan bahwa mekanisme transmisi manfaat keterbukaan perdagangan dan FDI dapat berbeda secara substantif antar negara. Dengan menggunakan model regresi efek tetap yang mampu menangkap perbedaan tidak teramati antarnegara, studi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di ASEAN.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan regresi efek tetap untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap perbedaan yang tidak teramati antar negara, mengurangi bias, serta menitikberatkan pada dinamika internal masing-masing negara dari waktu ke waktu (Breuer & Dehaan, 2024). Kajian ini menjadi penting mengingat peran strategis negara-negara ASEAN dalam perdagangan global dan dampak potensial kebijakan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: *Apakah keterbukaan perdagangan, FDI, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita di negara-negara ASEAN?* Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi perumusan strategi perdagangan dan pembangunan yang lebih kontekstual dan efektif bagi masing-masing negara anggota.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kerangka neoklasik, fungsi produksi Cobb–Douglas menjelaskan bahwa output nasional (Y) merupakan fungsi tenaga kerja (L), modal (K), dan kemajuan teknologi (A) sebagai variabel eksogen. Peningkatan akumulasi modal per pekerja dan kemajuan teknologi akan mendorong kenaikan PDB per kapita, mencerminkan efisiensi alokasi faktor produksi.

Sebaliknya, pendekatan Keynesian menekankan peran permintaan agregat ($AD = C + I + G + [X - M]$) dalam menentukan Y , di mana investasi (I)—termasuk arus FDI—berfungsi sebagai penggerak utama dalam jangka pendek (Karahen & Bayir, 2022).

2.2 Teori Perdagangan Internasional

Teori keunggulan komparatif Ricardo berargumen bahwa spesialisasi produksi berdasarkan biaya peluang terendah mengoptimalkan alokasi sumber daya antarnegara dan meningkatkan output total. Dari perspektif Keynesian, selisih perdagangan neto ($X - M$) menjadi komponen permintaan agregat yang memperkuat pendapatan nasional, sehingga peningkatan ekspor relatif terhadap impor akan mendorong pertumbuhan (Costinot, dkk. 2024).

2.3 Teori Penanaman Modal Asing Langsung (FDI)

Dalam kerangka Keynesian, FDI dipandang sebagai bagian dari investasi yang meningkatkan stok modal domestik, membuka lapangan kerja, dan memacu konsumsi serta pendapatan jangka pendek. Teori neoklasik menambahkan bahwa FDI juga mentransfer teknologi baru (A) kepada perusahaan domestik, meningkatkan produktivitas modal (K) dan tenaga kerja (L), sehingga memperkuat pertumbuhan jangka panjang (Kumar & Pradan, 2020).

2.4 Teori Tenaga Kerja

Meskipun model Keynesian tidak secara eksplisit memasukkan tenaga kerja dalam permintaan agregat, variabel ini memengaruhi komponen konsumsi (C) dan kapasitas produksi ekspor (X). Dalam fungsi Cobb–Douglas, tenaga kerja (L) adalah input utama bersama modal (K) dan teknologi (A) untuk menghasilkan output; peningkatan kuantitas maupun kualitas tenaga kerja akan meningkatkan PDB per kapita (Müller 2023).

2.5 Studi Empiris Global dan Non-ASEAN

Analisis panel global oleh de Almeida et al. (2024) mengonfirmasi bahwa liberalisasi perdagangan secara sistematis meningkatkan PDB per kapita di banyak negara, menunjukkan manfaat statis dan dinamis integrasi pasar. Namun, beberapa studi di negara berkembang non-ASEAN menunjukkan hasil yang berbeda: Chibalamula et al. (2023) dan Adu-Gyamfi et al. (2020) melaporkan bahwa keterbukaan perdagangan justru menekan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Afrika, menandakan bahwa struktur ekonomi lokal dan daya saing sektor domestik memoderasi efek tersebut. Di sisi FDI, Abdallah (2024) dan Hafizhy & Sukarniati (2024) menemukan bahwa arus masuk FDI mendorong pertumbuhan jangka panjang di kawasan MENA, tetapi meta-analisis López-Cabarcos et al. (2022) menegaskan bahwa manfaat spillover FDI sangat bergantung pada kualitas institusi dan kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik. Sebagian besar studi ini menggunakan regresi cross-country sederhana tanpa menangkap heterogenitas kebijakan dan struktur pasar tenaga kerja.

2.6 Studi Empiris Berbasis ASEAN

Penelitian khusus ASEAN masih relatif terbatas dan seringkali hanya menguji satu variabel kunci. Nguyen & Tran (2023) menggunakan data panel Vietnam dan menunjukkan bahwa efek positif FDI terhadap PDB per kapita semakin kuat pada provinsi dengan kualitas institusi tinggi, menegaskan peran kelembagaan dalam teori neoklasik. Widodo & Prasetyo (2022) menerapkan model fixed-effects di Indonesia dan menemukan variasi signifikan efek keterbukaan perdagangan antar sektor, di mana sektor manufaktur mendapat manfaat lebih besar dibanding sektor jasa. Sementara itu, Suriya & Thanaporn (2023) mendokumentasikan bahwa di Thailand, spillover FDI ke pasar tenaga kerja berdampak lebih besar pada pekerja

terampil dibanding tidak terampil, menggambarkan heterogenitas respon pasar tenaga kerja ASEAN terhadap globalisasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada filosofi positivisme, dengan tujuan untuk menyelidiki suatu populasi atau sampel tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yaitu total PDB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dan dinyatakan dalam nilai dolar Amerika Serikat tetap tahun 2015. Adapun variabel independen mencakup keterbukaan perdagangan, penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), dan tenaga kerja.

Keterbukaan perdagangan didefinisikan sebagai jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai persentase terhadap PDB. FDI diukur berdasarkan arus masuk bersih (*net inflows*), yaitu investasi baru dikurangi divestasi, ke dalam perekonomian negara pelapor dari investor asing dan dinyatakan sebagai persentase terhadap PDB. Tenaga kerja mencakup jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu.

3. Data dan Teknik Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan untuk memenuhi jenis data panel dengan rentang waktu tahunan. Sumber data diperoleh dari World Bank dan mencakup sembilan negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Rentang waktu yang dianalisis mencakup periode selama 15 tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2022.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, diawali dengan pengujian pemilihan model. Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan antara model *common effect* dan *fixed effect* dalam estimasi data panel. Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *random effect*. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk memastikan validitas model regresi, yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lebih lanjut, metode *Driscoll-Kraay Standard Errors* digunakan untuk mengoreksi galat baku dalam regresi data panel apabila terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, autokorelasi serial, dan ketergantungan antar unit panel (*cross-sectional dependence*).

4. Model Regresi

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$gdppc_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 trade_{it} + \beta_3 fdi_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- $gdppc_{it}$ = The dependent variable of GDP per capita for unit i at time t .
 β_0 = Intercept or constant
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Regression coefficient
 $\beta_1 \cdot trade_{it}$ = Trade openness of unit i in year t
 $\beta_2 \cdot labor_{it}$ = Labor of unit i in year t
 $\beta_3 \cdot fdi_{it}$ = FDI of unit i year t
 e_{it} = Error term

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Produk Domestik Bruto per kapita (*GDP per capita*) mencerminkan rata-rata pendapatan per individu dalam suatu perekonomian. Berdasarkan Tabel 1, rata-rata GDP per kapita ($gdppc$) dari sembilan negara ASEAN selama periode 2008 hingga 2022 adalah sebesar USD 12.631,07. Nilai minimum sebesar USD 851,20 menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat rendah pada salah satu negara ASEAN pada salah satu tahun observasi. Sementara itu, nilai maksimum mencapai USD 67.948,89 yang mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Dengan standar deviasi sebesar USD 17.878,89, terlihat adanya variasi yang cukup besar antarnegara dan antarwaktu di kawasan ASEAN terkait GDP per kapita.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
gdppc	135	12631.07	17878.79	851.203	67948.89
trade	135	133.1944	85.44488	32.97218	437.3267
fdi	135	5.405346	8.076788	-32.9552	31.62074
labor	135	3.20E+07	3.86E+07	187518	1.38E+08

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Rata-rata keterbukaan perdagangan yang dihitung melalui total ekspor dan impor sebagai persentase dari PDB adalah sebesar 133,19%, yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional memegang peranan penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Nilai minimum sebesar 32,97% menunjukkan bahwa terdapat negara dengan aktivitas perdagangan relatif rendah terhadap PDB-nya, sedangkan nilai maksimum sebesar 437,33% mencerminkan keterbukaan perdagangan yang sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 85,44% menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat keterbukaan perdagangan antarnegara ASEAN.

Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI), yang diukur melalui aliran masuk bersih sebagai persentase terhadap PDB, memiliki nilai rata-rata sebesar 5,41%. Nilai minimum sebesar -32,96% menunjukkan adanya aliran keluar investasi yang signifikan pada beberapa negara atau tahun tertentu, sedangkan nilai maksimum sebesar 31,62% menunjukkan arus masuk FDI yang sangat besar. Standar deviasi sebesar 8,08% menggambarkan tingkat variasi yang tinggi dalam arus FDI di kawasan ASEAN.

Angkatan kerja di negara-negara ASEAN memiliki rata-rata sebesar 32 juta orang. Nilai minimum sebesar 187.518 orang menunjukkan adanya negara dengan jumlah penduduk usia kerja yang sangat kecil, sementara nilai maksimum sebesar 138 juta orang mencerminkan negara dengan jumlah tenaga kerja terbesar di kawasan ASEAN. Standar deviasi sebesar 38,6 juta menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah tenaga kerja antarnegara ASEAN, yang dipengaruhi oleh ukuran populasi masing-masing negara.

2. Uji Pemilihan Model

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Model Selection Test	Decision Making Criteria	Test Result	Selected Model
Chow Test	H0 : Common-Effect Model H1 : Fixed-Effect Model	Prob > F = 0.0000 smaller than 0.05 H0 rejected, H1 accepted	Fixed-Effect Model
Hausman Test	H0 : Random-Effect Model H1 : Fixed-Effect Model	Prob > Chi2 = 0.0015 smaller than 0.05 H0 rejected, H1 accepted	Fixed-Effect Model

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Berdasarkan Tabel 2, hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman secara konsisten menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Model Fixed Effect*. Selanjutnya, model ini diuji terhadap asumsi klasik untuk memastikan validitas regresi.

3. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
trade	2.91	0.343478
fdi	2.65	0.377254
labor	1.17	0.857415
Mean VIF	2.24	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Berdasarkan Tabel 3, nilai VIF dari seluruh variabel independen kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji	df	χ^2	p-value
Modified Wald test	9	43272.91	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Uji Modified Wald seperti pada gambar 6 digunakan untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi panel, khususnya pada pendekatan *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000 < 0,05$ sehingga H_0 yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas ditolak. Dengan demikian, terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Statistik	Nilai
F(1, 8)	1252.936
Prob > F	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Pada gambar 7, Uji Wooldridge digunakan untuk mendeteksi autokorelasi serial dalam model regresi data panel. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai $\text{Prob} > F = 0.0000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak. Dengan demikian, terdapat masalah autokorelasi dalam model ini.

4. Hasil Regresi *Fixed Effect* dengan Standar Error Driscoll-Kraay

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan menggunakan metode Driscoll-Kraay Standard Errors.

Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect Model dengan Driscoll-Kraay Standard Error

Regression with Driscoll-Kraay standard errors						
		Number of obs	=			135
Method: Fixed-effects regression		Number of groups	=			9
Group variable (i): id		F(3,14)	=			33.93
maximum lag: 2		Prob>F	=			0.0000
		within R-squared	=			0.3309
gdppc	Coefficient	Drisc/ Kraay std. err.	t	P>t	[95% conf. interval]	
trade	-48.84528	11.50015	-4.25	0.001	-	-24.17991 73.51065
fdi	219.5987	95.32324	2.30	0.037	15.1507	424.0467
labor	0.0001055	0.0000179	5.88	0.000	0.000067	0.000143 9
_cons	14574.54	2091.833	6.97	0.000	10088	19061.07

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata 17 (2024)

Driscoll-Kraay Standard Errors merupakan metode yang digunakan untuk mengoreksi standar error dalam regresi data panel ketika terdapat pelanggaran asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, autokorelasi serial, dan dependensi silang. Metode ini memperbaiki

matriks kovarians varians dengan pendekatan HAC sehingga menghasilkan standar error yang konsisten dan andal. Estimasi koefisien regresi tetap tidak berubah, namun uji statistik menjadi lebih valid.

$$gdppc = 14,547.54 - 48.84528.trade + 219.5987.fdi + 0.0001055.labor \dots\dots\dots (2)$$

5. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4, variabel *trade openness* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto per kapita (GDP per kapita) pada tingkat signifikansi 1%. Variabel *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,037 yang menunjukkan bahwa FDI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap GDP per kapita pada tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, variabel tenaga kerja (*labor*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000, yang berarti secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap GDP per kapita pada tingkat signifikansi 1%.

6. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai Prob > F sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari α (0,05) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu keterbukaan perdagangan, investasi langsung asing, dan jumlah tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen GDP per kapita.

7. Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien determinasi menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai *R-squared* sebesar 0,3303 menunjukkan bahwa sebesar 33,03% variasi dari variabel dependen, yaitu GDP per kapita, dapat dijelaskan oleh variabel keterbukaan perdagangan, investasi langsung asing, dan jumlah tenaga kerja. Adapun sisanya sebesar 66,97% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

8. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap GDP per Kapita

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap GDP per kapita, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Namun, koefisien regresi dari keterbukaan perdagangan menunjukkan nilai negatif. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang berlawanan arah, di mana peningkatan keterbukaan perdagangan justru menurunkan GDP per kapita. Temuan ini bertentangan dengan teori pendapatan nasional Keynes yang menyatakan bahwa perdagangan internasional berkontribusi positif terhadap *output* nasional, serta teori keunggulan komparatif David Ricardo yang menyatakan bahwa negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan dengan spesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif.

Namun demikian, temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Chibalamula et al. (2023) dan Adu-Gyamfi et al. (2020) yang juga menemukan dampak negatif signifikan dari keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan GDP. Dalam konteks negara-negara ASEAN, keterbukaan perdagangan dapat berdampak negatif terhadap GDP atau pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan. *Trade and Development Report 2022* oleh UNCTAD (2022) menjelaskan bahwa ekspor ASEAN memiliki kandungan nilai tambah domestik yang terbatas. Meskipun ekspor ASEAN didominasi oleh sektor

manufaktur, namun kandungan lokalnya rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap *input* asing. Selain itu, terdapat faktor heterogenitas antar negara ASEAN, di mana beberapa negara seperti Brunei dan Kamboja masih sangat bergantung pada ekspor energi dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketergantungan ASEAN pada perdagangan intra-kawasan juga dapat menimbulkan ketimpangan akibat perbedaan tingkat pembangunan antar negara anggota.

Negara-negara dengan kapasitas produksi yang lebih rendah seperti Kamboja cenderung memperoleh manfaat yang lebih kecil dibanding negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia (Lee & Park, 2021; Sok & Ouch, 2020). Ketimpangan ekonomi regional ini dapat memperlebar kesenjangan dan mengurangi dampak positif perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam studi konvergensi ekonomi ASEAN yang menunjukkan lambatnya penyerapan keuntungan oleh negara kurang berkembang (Nguyen & Suryadarma, 2024). Penurunan ekspor ASEAN ke negara maju—yang biasanya memiliki permintaan stabil dan harga produk tinggi—berpotensi menurunkan pendapatan perdagangan berkelanjutan, terutama pasca-krisis global ketika permintaan dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa melemah (Athukorala & Kohpaiboon, 2018). Sebaliknya, peningkatan perdagangan ke negara berkembang seperti Tiongkok umumnya hanya didasarkan pada permintaan bahan mentah atau setengah jadi, yang cenderung memiliki nilai tambah ekonomi rendah dan memperkuat ketergantungan pada sektor ekstraktif (Zhang, 2015).

9. Pengaruh Investasi Langsung Asing (FDI) terhadap GDP per Kapita

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh signifikan terhadap GDP per kapita, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Koefisien regresi dari FDI juga bernilai positif, yang berarti bahwa peningkatan FDI akan mendorong peningkatan GDP per kapita. Temuan ini selaras dengan teori Keynes, khususnya dalam teori pendapatan nasional yang menyatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat, sehingga peningkatan investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan FDI dapat memberikan dampak berganda seperti transfer modal, teknologi, pengetahuan, dan kemampuan manajerial dari negara maju ke negara berkembang. Selain itu, peningkatan FDI juga akan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak atas keuntungan perusahaan asing yang berinvestasi di negara penerima, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi (Hafizhy & Sukarniati, 2024). Beberapa bukti empiris juga mendukung temuan ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari & Dawood (2024), Abdallah (2024), Chibalamula et al. (2023), Belloumi & Alshehry (2020), serta Hafizhy & Sukarniati (2024) yang menemukan bahwa FDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap GDP atau pertumbuhan ekonomi.

10. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap GDP per Kapita

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap GDP per kapita, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima (Mankiw et al., 1992; Temple, 1999). Koefisien regresi dari variabel tenaga kerja juga bernilai positif, yang berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong peningkatan GDP per kapita (Hoang & Le, 2024). Temuan ini sesuai dengan Neoclassical Growth Theory yang direpresentasikan melalui fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam proses produksi yang secara aktif mengolah sumber daya lainnya. Oleh karena

itu, peningkatan tenaga kerja akan mendorong peningkatan output produksi atau dalam hal ini GDP.

Bukti empiris mengenai pengaruh signifikan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditemukan. Hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2022) di negara berkembang Asia, Ifa et al. (2020) di konteks Afrika Sub-Sahara, dan Agrawal & Khan (2011) di India, yang secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan GDP per kapita. Studi Herrendorf & Schoellman (2015) juga menegaskan bahwa produktivitas tenaga kerja menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama di negara dengan struktur industri padat karya.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan perdagangan, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto per kapita (GDP per kapita), meskipun dengan arah pengaruh yang berbeda. Keterbukaan perdagangan menunjukkan pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap GDP per kapita, yang mengindikasikan bahwa peningkatan keterbukaan perdagangan justru menurunkan GDP per kapita di kawasan ASEAN. Temuan ini bertentangan dengan teori pendapatan nasional Keynes dan teori keunggulan komparatif David Ricardo yang memprediksi adanya dampak positif dari perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dari hasil tersebut antara lain adalah dominasi ekspor manufaktur dengan nilai tambah domestik yang rendah, heterogenitas antar negara anggota ASEAN, serta ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan akibat perbedaan tingkat pembangunan.

Sebaliknya, FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap GDP per kapita. Hal ini mendukung pandangan Keynes yang menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, akumulasi stok modal, serta efek berganda dalam bentuk alih teknologi, transfer pengetahuan, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, tenaga kerja juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap GDP per kapita. Temuan ini sejalan dengan *Neoclassical Growth Theory* yang menempatkan tenaga kerja sebagai *input* utama dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong peningkatan *output* ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Berbagai fasilitas seperti akses literatur ilmiah, koleksi buku di perpustakaan, layanan akses internet yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menunjang kelancaran penelitian ini. Dukungan institusional ini menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya proses ilmiah yang sistematis dan mendalam. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus atas segala bantuan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. B. (2024). The relationship between trade openness, foreign direct investment inflows, and economic growth in Middle East and North of Africa region: Autoregressive distributed lag model vs. vector error correction model. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 1118–1141. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01099-x>
- Adha, R., Hong, C. Y., Yang, S. F., & Muzayyanah, S. (2024). Re-unveiling the energy efficiency impact: Paving the way for sustainable growth in ASEAN countries. *Sustainable Development*, 32(5), 5812–5824. <https://doi.org/10.1002/sd.3005>
- Agrawal, G., & Khan, M. A. (2011). Impact of FDI on GDP: A comparative study of China and India. *International Journal of Business and Management*, 6(10). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n10p71>
- Alam, A., Arshad, M. U., & Rajput, W. (2013). Relationship of labor productivity, foreign direct investment and economic growth: Evidence from OECD countries. *Journal of Business and Management Sciences*, 1(6), 133–138. <https://doi.org/10.12691/jbms-1-6-3>
- Athukorala, P., & Kohpaiboon, A. (2018). Global value chains and export performance in the crisis era: Evidence from ASEAN countries. *The World Economy*, 41(3), 656–670.
- Adu-Gyamfi, G., Nketiah, E., Obuobi, B., & Adjei, M. (2020). Trade openness, inflation and GDP growth: Panel data evidence from nine West Africa countries. *Open Journal of Business and Management*, 8(1), 314–328. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2020.81019>
- Belloumi, M., & Alshehry, A. (2020). The impact of international trade on sustainable development in Saudi Arabia. *Sustainability*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/su12135421>
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. RAND Corporation.
- Breuer, M., & Dehaan, E. (2024). Using and interpreting fixed effects models. *Journal of Accounting Research*, 62(4), 1183–1226. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12559>
- Chen, S. (2024). The impact of green trade barriers on China's photovoltaic products exports to ASEAN. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1459950. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1459950>
- Chibalamula, H. C., Evans, Y., Kachelo, M., & Bamwesigye, D. (2023). The effect of foreign direct investment and trade openness on economic growth: Evidence from five African countries. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 15(1), 35–46. <https://doi.org/10.7160/aol.2023.150103>
- Costinot, A., Donaldson, D., & Komunjer, I. (2024). Revisiting Ricardo: Comparative Advantage in Global Value Chains. *Journal of International Economics*, 145, 103–122.
- de Almeida, E. O., Cateia, J. V., Barbosa, W., & de Freitas, C. A. (2024). Trade liberalization and total factor productivity in Brazil: A VECM modeling. *PLOS ONE*, 19(11), e0312599. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312599>
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560. <http://www.jstor.org/stable/2646837>
- Emami, N., Miatto, A., Gheewala, S., Soonsawad, N., Nguyen, T. C., Chiu, A. S. F., Gue, I. H., Martinico-Perez, M. F., Vilaysouk, X., & Schandl, H. (2024). Measuring progress toward a circular economy of the ASEAN Community. *Journal of Industrial Ecology*. <https://doi.org/10.1111/jiec.13597>

- Hafizhy, M. N., & Sukarniati, L. (2024). Determinasi pertumbuhan ekonomi di 8 negara ASEAN [Determinants of economic growth in 8 ASEAN countries]. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13348755>
- Herrendorf, B., & Schoellman, T. (2015). Why is measured productivity so low in agriculture? *Review of Economic Dynamics*, 18(4), 1003–1028.
- Hoang, T. K., & Le, Q. H. (2024). The impact of technical change on income inequality in Vietnam. *Journal of Economics and Development*, 26(4), 329–345. <https://doi.org/10.1108/JED-03-2024-0087>
- Ifa, K., Indrianasari, N. T., & Liyundira, F. S. (2020). Keterbukaan perdagangan, inflasi, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia [Trade openness, inflation, labor force, and economic growth in Indonesia]. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.10-23>
- Islam, M. S., Alsaif, S. S., & Alsaif, T. (2022). Trade openness, government consumption, and economic growth nexus in Saudi Arabia: ARDL cointegration approach. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221096661>
- Karahan, Ö., & Bayır, M. (2022). The effects of monetary policies on foreign direct investment inflows in emerging economies: Some policy implications for post-COVID-19. *Future Business Journal*, 8, Article 39. <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00152-6>
- Kumar, N., & Pradhan, J. P. (2020). FDI, Employment Generation, and Output Growth: Evidence from Manufacturing Industries in India. (*jurnal tidak disebutkan volume/issue halaman; tambahkan bila tersedia*)
- Lee, J., & Park, D. (2021). ASEAN economic integration: Divergent outcomes for member states. *Journal of Asian Economics*, 74, 101303.
- Liu, H., Islam, M. A., Khan, M. A., Hossain, M. I., & Pervaiz, K. (2020). Does financial deepening attract foreign direct investment? Fresh evidence from panel threshold analysis. *Research in International Business and Finance*, 53, 101198. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101198>
- López-Cabarcos, M. Á., Vázquez-Rodríguez, P., & Quiñoá-Piñeiro, L. M. (2022). An approach to employees' job performance through work environmental variables and leadership behaviours. *Journal of Business Research*, 140, 361–369. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.006>
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
- Müller, S. (2023). Human Capital Elasticity in Post-Pandemic Production Functions. *Economic Modelling*, 118, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.106122>
- Monyela, M. N., & Saba, C. S. (2024). Trade openness, economic growth and economic development nexus in South Africa: A pre- and post-BRICS analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03604-2>
- Nam, H. J., & Ryu, D. (2024). Does trade openness promote economic growth in developing countries? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 93, 101985. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2024.101985>
- Nguyen, T. & Tran, L. (2023). “FDI, Institutional Quality, and Economic Growth in Vietnam: A Panel Data Approach.” *Journal of Southeast Asian Economies*, 40(2), 115–130.

- Nguyen, T. A., & Suryadarma, D. (2024). Regional disparities in ASEAN trade-led growth: The convergence paradox. *Journal of Southeast Asian Economies*, 41(2), 215–234. <https://doi.org/10.1355/jae.41.2.215>
- Nygård, O. E., & Thoresen, T. O. (2023). Controlling for fixed effects in studies of income underreporting. *European Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10657-023-09769-6>
- Oladimeji, M. S., & Ibrahim, O. M. (2017). The effect of international business on SMEs growth in Nigeria. *Journal of Competitiveness*, 9(3), 67–80. <https://doi.org/10.7441/joc.2017.03.05>
- Sari, F., & Dawood, T. C. (2022). Pengaruh foreign direct investment, remitansi, kredit, keterbukaan perdagangan dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB ASEAN [The effect of FDI, remittances, credit, trade openness, and government consumption on ASEAN GDP]. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 7, 287–296.
- Sok, S., & Ouch, C. (2020). Cambodia's economic integration in ASEAN: Challenges and opportunities. *Journal of Southeast Asian Economies*, 37(2), 189–205.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* [Quantitative, qualitative, and R&D research methods]. Alfabeta.
- Suriya, P. & Thanaporn, C. (2023). “FDI Spillovers to Skilled and Unskilled Labor Markets in Thailand.” *Asian Journal of Economic Modelling*, 11(3), 202–220.
- Temple, J. (1999). The new growth evidence. *Journal of Economic Literature*, 37(1), 112–156.
- UNCTAD. (2022). *Trade and development report 2022*. <https://unctad.org/publication/trade-and-development-report-2022>
- Widodo, R. & Prasetyo, A. (2022). “Trade Openness and Sectoral Growth in Indonesia: Evidence from a Fixed-Effects Model.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 45–63.
- Zhang, Y. (2015). ASEAN-China trade relations: Opportunities and challenges. *Journal of Contemporary Asia*, 45(4), 654–677.

OPEN ACCESS

Citation:

Azzahra M. Putri Sayekti,
Kusumaningtyas, T. A., & Cahyono,
J. P. (2025). Pengaruh Keterbukaan
Perdagangan, Foreign Direct
Investment, dan Tenaga Kerja
Terhadap PDB Per Kapita Negara-
Negara ASEAN. *Jurnal Budget: Isu
Dan Masalah Keuangan Negara*,
10(1), 58-74

Received: April 30, 2025
Accepted: May 10, 2025
Revised: June 18, 2025
Published: June 30, 2025

© The Author(s)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BENGKULU

*Analysis of Income Inequality Between Regencies and Cities in
Bengkulu*

Anggara Putra Pratama ¹

Damia Liana ²

Abstract

This study aims to analyze income disparities between districts and cities in Bengkulu Province and identify the influence of variables such as GRDP, population, and HDI on these income disparities. Income disparities are measured using the Williamson Index, while the factors influencing income disparities are analyzed using panel data regression methods with the assistance of EViews 12 software. Based on the results of the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test, the random effect model was selected as the most appropriate model. The research results indicate that income inequality in Bengkulu Province is relatively low, influenced by differences in natural resources, human resources, and the allocation of development funds across regions. The regression analysis results show that the GRDP variable has a negative and significant effect on income inequality, while population size has a positive and significant effect on income inequality. On the other hand, the HDI also has a negative and significant effect, indicating that improving the quality of life through education and health can reduce income inequality. These findings support development theories that emphasize the importance of economic justice through improving the quality of human resources. Based on the results of this study, policies that support GRDP growth, population control, and HDI improvement are highly recommended to reduce income inequality in Bengkulu Province.

Keywords: *Income Inequality, GRDP, Population, HDI, Bengkulu*

JEL Classification: *O15; R11*

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, anggara.pratama.putra-2023@feb.unair.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, damia.liana-2023@feb.unair.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah proses yang kompleks yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita secara konsisten dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan dalam aspek struktur ekonomi, distribusi kekayaan, dan kualitas hidup masyarakat (Mustika dkk., 2023), (Sinaga, 2020). Pembangunan yang merata, yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi secara bersamaan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam konteks ketimpangan yang masih ada di berbagai wilayah.

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhannya. Menurut penelitian, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Novianti & Panjaitan, 2022). Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, ketimpangan pendapatan antar wilayah seringkali menghambat pemerataan manfaat pembangunan. Sebuah studi di China menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan pendapatan dan kesehatan tetap menjadi masalah besar yang memperburuk kualitas hidup masyarakat, dengan efek negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan (Wei, 2015) (Shi dkk., 2021).

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi tidak selalu terjadi secara merata, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di suatu provinsi merupakan isu yang sering kali menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, ketimpangan pendapatan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan akses terhadap pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota menjadi sangat penting, salah satunya dengan memastikan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Studi oleh Sofilda dkk. (2015) menunjukkan bahwa adanya disparitas ini sering kali berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Faktor lain yang turut memperparah ketimpangan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk bertambah, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan akses layanan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko ketimpangan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperburuk ketimpangan ekonomi (Rahayu dkk, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan di China, di mana ketimpangan pendapatan juga terkait erat dengan ketidakseimbangan distribusi sumber daya, termasuk di sektor pendidikan yang berperan penting dalam mengurangi ketimpangan tersebut (Bloom dkk., 2017) (Cai & Wu, 2019).

Ketimpangan ini juga disoroti dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Yogyakarta, di mana ditemukan bahwa IPM memiliki dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kualitas hidup yang tinggi melalui pendidikan dan kesehatan dalam meminimalkan ketimpangan pendapatan antar wilayah

(Rachmawatie & Prakoso, 2023). Temuan ini didukung oleh studi global yang menunjukkan bahwa IPM menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan mengurangi disparitas regional (Permanyar & Smits, 2019).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu membawa dampak merata pada seluruh lapisan masyarakat, yang berarti bahwa pendapatan tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Misalnya, kajian pada ketimpangan ekonomi di Jawa menunjukkan adanya korelasi spasial antara PDRB dan ketimpangan pendapatan, yang mengisyaratkan bahwa pemerataan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan besar (Suseno, 2023).

Ketimpangan juga terlihat jelas pada disparitas antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, dengan wilayah Barat yang memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Studi oleh Murthi (2023) di Bali menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh disparitas gender, yang memperburuk ketimpangan yang ada. Dalam kajian di berbagai negara, ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan ketegangan sosial dan masalah kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi di tingkat wilayah (Wildman dkk., 2023).

Faktor lainnya adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Daerah dengan IPM tinggi umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan IPM dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut (Fidella, 2021).

Ketidakmerataan dalam PDRB, jumlah penduduk, dan IPM menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi. Ketimpangan yang terus meningkat dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan masalah sosial yang berkepanjangan (Simbolon dkk, 2023). Selain itu, pembangunan yang tidak merata mengakibatkan sebagian wilayah tertinggal dari segi perkembangan ekonomi, yang memperparah ketimpangan. Studi Fitrawaty dkk. (2020) menyebutkan bahwa ketidakmerataan dana alokasi umum dan IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah (Alawiyah dkk, 2020).

Studi lain juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat di suatu wilayah tidak selalu menghasilkan pemerataan pendapatan. Menurut Puspa dkk. (2019), intervensi pemerintah dapat membantu mengurangi ketimpangan melalui kebijakan alokasi anggaran yang tepat. Pada wilayah Jawa, ketimpangan pendapatan masih terlihat cukup tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa IPM dan PDRB per kapita menjadi faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan secara signifikan (Kartiasih dkk, 2022).

Di sisi lain, penelitian oleh Janah (2022) menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki efek negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang menandakan pentingnya pembangunan ekonomi yang lebih merata untuk mengatasi ketimpangan. Ketimpangan dalam aspek ekonomi ini menjadi lebih parah dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, khususnya di daerah yang memiliki akses terbatas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan (Fajriah, 2021).

Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik dan jarang dieksplorasi dalam kajian ketimpangan pendapatan. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Bengkulu masih signifikan. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam literatur yang lebih sering berfokus pada daerah besar lainnya, serta menawarkan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika ketimpangan di wilayah yang kurang mendapat perhatian dalam penelitian sejenis.

Penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai proksi untuk mengukur ketimpangan pendapatan, karena indeks ini memberikan pendekatan yang lebih terperinci dalam menganalisis ketimpangan antar wilayah dibandingkan dengan Indeks Gini. Indeks Williamson memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pola distribusi pendapatan yang lebih kompleks, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan mengintegrasikan variabel-variabel seperti PDRB, jumlah penduduk, dan IPM, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di Provinsi Bengkulu. Meskipun Indeks Gini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, Indeks Williamson menawarkan keunggulan dalam memberikan wawasan yang lebih rinci, terutama dalam konteks analisis ketimpangan antar wilayah atau sektor yang berbeda. Oleh karena itu, Indeks Williamson lebih relevan untuk studi ketimpangan pendapatan pada skala regional atau sektoral yang lebih kompleks.

Pentingnya analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, tetapi juga dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN dan alokasi dana perimbangan. Ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan ketergantungan beberapa daerah terhadap dana transfer pusat, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal daerah, dan berkontribusi pada disparitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti PDRB, jumlah penduduk, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai penyebab dan dampak ketimpangan pendapatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang program-program pembangunan yang lebih merata. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi regional, khususnya dalam konteks pengelolaan ketimpangan pendapatan, serta memperkaya pemahaman tentang hubungan antara indikator ekonomi dan sosial dalam pembangunan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat pendapatan per kapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Berbagai penelitian mengenai ketimpangan antar daerah telah dilakukan, dengan Kuznets (1964) sebagai salah satu peneliti awal yang mempelajarinya. Ia melakukan studi ketimpangan antar negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola berbentuk U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pada tahap awal perkembangan negara, pendapatan per kapita masih sangat rendah dan tingkat ketimpangan juga rendah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan rata-rata, ketimpangan cenderung meningkat. Namun, ketika pendapatan rata-rata terus meningkat, ketimpangan akan menurun kembali.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai bersih dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau daerah (BPS, 2023). Pertumbuhan

ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi ketimpangan regional. Ketimpangan pendapatan mencerminkan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah di suatu wilayah, yang juga dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat pendapatan per kapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbeda antara daerah satu dengan yang lain, tergantung pada kapasitas dan potensi sumber daya alam masing-masing. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB dapat didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, atau sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita, PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, semakin tinggi PDRB suatu daerah, biasanya semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut.

3. Jumlah Penduduk

Populasi penduduk merujuk pada jumlah individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Perubahan dalam struktur demografis dapat memperburuk persaingan untuk memperoleh pekerjaan, di mana pasokan tenaga kerja melebihi permintaan, menyebabkan banyak pekerja menerima upah rendah dan bersedia bekerja dengan gaji di bawah standar. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Di sub-Sahara Afrika, salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan populasi yang pesat (Odusanya, 2020).

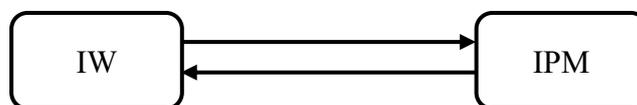
Ada tiga ciri utama yang menggambarkan perkembangan serta permasalahan kependudukan di Indonesia, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu dikendalikan, distribusi penduduk yang tidak merata antar daerah, dan kualitas hidup penduduk yang perlu ditingkatkan. Di Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini karena sebagian besar angka kelahiran berasal dari kalangan miskin, yang sering kali tidak mampu memberikan pendidikan atau kualitas hidup yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Selain faktor kelahiran, peningkatan jumlah penduduk juga dapat disebabkan oleh proses migrasi.

Kegiatan migrasi akan meningkatkan jumlah penduduk, dan para imigran sering kali tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk berkembang di lokasi baru mereka. Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Memahami aspek-aspek demografi seperti migrasi, fertilitas, dan mortalitas dapat sangat berguna dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengembangkan strategi pembangunan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2004).

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ketimpangan yang ada dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan pendapatan saling terkait, seperti yang digambarkan dalam Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan, yang diukur menggunakan Indeks Williamson, dan kesejahteraan masyarakat, yang dinilai berdasarkan nilai IPM.

Gambar 1. Keterkaitan IW dan IPM



Sumber: Fitriyah dan Rachmawati, 2012

Keterangan:

Iw = Indeks Williamson

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

\longleftrightarrow = Keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Todaro dan Smith (2004), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara jelas menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan lebih signifikan dibandingkan dengan kesenjangan dalam indikator pembangunan lainnya, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. IPM juga menekankan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai pembangunan manusia secara menyeluruh, bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan. Kesehatan dan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai input dalam proses produksi, tetapi juga merupakan tujuan dasar dari pembangunan itu sendiri.

5. Ekonomi Antar Kabupaten dan Kota

Analisis ketimpangan ekonomi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota dalam sebuah provinsi. Untuk menganalisis ketimpangan antar kabupaten dan kota, data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk masing-masing daerah digunakan. Namun, penting untuk diingat bahwa struktur ekonomi kabupaten dan kota sangat berbeda. Ekonomi kota umumnya lebih fokus pada industri, perdagangan, dan jasa, sedangkan ekonomi kabupaten lebih dominan pada sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oleh karena itu, sebaiknya pengukuran ketimpangan pendapatan dilakukan secara terpisah untuk kabupaten dan kota, sehingga perbedaannya dapat dipahami dengan lebih jelas (Syafrizal, 2018).

6. Pengembangan Hipotesis

- Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.
- Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.
- Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan terdiri dari data tahunan mulai dari tahun 2010-2023. Sementara data *cross section* yang digunakan merupakan data 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu. Dalam konteks penelitian ini, ketimpangan pendapatan berfungsi sebagai variabel terikat (Y), sementara variabel independen yang diteliti meliputi Produk Domestik Regional Bruto (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan informasi yang relevan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur-literatur terkait yang mendukung penelitian ini. Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya disparitas pendapatan di suatu daerah (Kuncoro, 2003). Untuk menggambarkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah menggunakan perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{Y}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- V_w = Nilai indeks Williamson
- Y_i = Pendapatan perkapita masing-masing Kabupaten i
- Y = Pendapatan perkapita seluruh Kabupaten i
- f_i = Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten i
- n = Jumlah penduduk seluruh Kabupaten i

Hasil pengujian Indeks Williamson akan berada dalam rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai Indeks Williamson yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar antarwilayah, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih kecil antar daerah. Proses pembentukan data panel adalah dengan cara mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat lintang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Jika jumlah periode observasi sama banyaknya untuk tiap-tiap unit *cross-section* maka dinamakan balanced panel. Sebaliknya jika jumlah periode observasi tidak sama untuk tiap-tiap unit *cross-section* maka disebut unbalanced panel (Widarjono, 2013). Kemudian penelitian ini menggunakan analisis regresi metode panel. Adapun model persamaan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

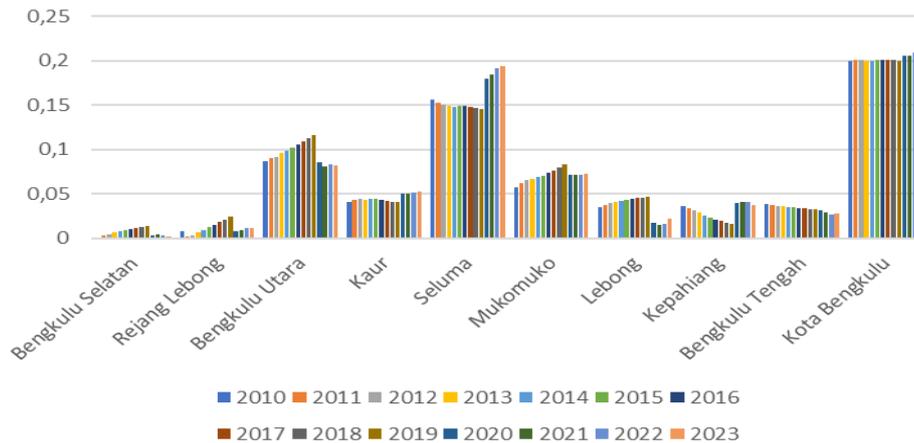
$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + X_{2it} + X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- Y_{it} = Ketimpangan pendapatan (IW)
- X_1 = Produk Domestik Bruto (PDRB)
- X_2 = Jumlah Penduduk
- X_3 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- B = Konstanta
- β_{123} = Koefisien Regresi
- e = Error Term
- i = Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bengkulu
- t = Waktu (tahun 2010-2023).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

H. T. Oshima, seperti yang dikutip dalam Sutawijaya (2004), menetapkan kriteria untuk menilai tingkat ketimpangan sosial berdasarkan Indeks Williamson. Menurut standar tersebut, jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35, maka ketimpangan dianggap rendah; jika nilainya berada antara 0,35 hingga 0,50, ketimpangan dianggap sedang; dan jika nilainya lebih dari 0,50, ketimpangan dianggap tinggi. Hasil analisis ketimpangan pendapatan 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Indeks Williamson Antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu

Sumber: diolah penulis, 2025

Selama kurun waktu 2010-2023, untuk gambaran Indeks Williamson antar Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan standar ketimpangan pendapatan menurut H.T Oshima dalam Sutawijaya, (2004) *Indeks Williamson* antar Kabupaten dan Kota masuk dalam kategori rendah karena *indeks Williamson* kurang dari 0,35.

Ketimpangan yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga perbedaan alokasi dana yang dipergunakan untuk pembangunan di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

Hasil Pemilihan Estimasi Model Untuk menentukan model terbaik yang dapat digunakan, peneliti melakukan uji pemilihan teknik estimasi regresi yaitu :

1. Pemilihan Model Regresi

a. Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect Model*.

H_1 : memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect Model*.

Tabel 1: Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	659.661088	(9,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	541.230138	9	0.0000

Sumber: diolah penulis, 2025

Pada Tabel 1 hasil regresi dengan menggunakan *Eviews 12* maka didapatkan nilai hasil probabilitas = 0.0000, yang berarti probabilitas = $0.0000 < \alpha = 5\%$, kesimpulan dari Uji *Chow* adalah menolak H_0 sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: memilih menggunakan model estimasi *Random Effect Model*.

H₁: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect Model*.

Tabel 2 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.462752	3	0.6909

Sumber: diolah penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 2 hasil regresi dengan menggunakan *Eviews 9* maka didapatkan nilai hasil probabilitas = 0.6909, yang berarti probabilitas = 0.6909 > α = 5%, kesimpulan dari Uji *Hausman* adalah menerima H₀ sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect Model* (REM).

c. Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect Model*.

H₁: memilih menggunakan model estimasi *Random Effect Model*.

Tabel 3: Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	826.9412 (0.0000)	6.292327 (0.0121)	833.2335 (0.0000)

Sumber: diolah penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 3 hasil regresi dengan menggunakan *Eviews 9* maka didapatkan nilai hasil LM hitung = 0.0000, yang LM hitung = 0.0000 < α = 5%, kesimpulan dari *Langrange Multiplier* adalah menolak H₀ sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect Model* (REM).

d. Hasil Uji Random Effect

Dalam *Random Effect Model* mengasumsikan bahwa dalam data panel terdapat variabel gangguan yang mana nilainya berbeda antar individu. *Random Effect Model* hampir memiliki kesamaan dengan *Common Effect Model* (CEM) tetapi pada *Random Effect Model* (REM) ditambah nilai *residu*. Maka pada model estimasi *Random Effect Model* (REM) dapat diasumsikan bahwa *intersep* ataupun *slope* adalah sama baik antar waktu ataupun individu, dan ditambah nilai *residu* yang berbeda antar waktu.

Tabel 4: Uji Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.046597	0.023287	-2.001014	0.0474
X1	-0.683856	0.132125	-5.175828	0.0000
X2	0.753557	0.096729	7.790416	0.0000
X3	-3.17E-06	6.16E-07	-5.148212	0.0000

Sumber: diolah penulis, 2025

$$Y_{it} = -0.046597 - 0.683856 + 0.753557 - 3.17E-06 + e_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan Tabel 4 di atas yang di mana menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) didapatkan hasil persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat ditarik kesimpulan Pertama, jika variabel-variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka besarnya tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu secara keseluruhan adalah sebesar -0.046597 dalam satuan indeks. Kedua, nilai koefisien regresi variabel PDRB sebesar (-0.683856) yang berarti setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 dalam satuan indeks maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu sebesar -0.683856 dalam satuan indeks. Berdasarkan Tabel 4 di atas yang di mana menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) didapatkan hasil persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ketiga, nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk sebesar (0.753557), artinya setiap terjadi peningkatan Jumlah Penduduk sebesar 1 dalam satuan indeks maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu sebesar 0.753557 dalam satuan indeks. Terakhir, nilai koefisien regresi variabel IPM sebesar (-3.17E-06) yang berarti setiap terjadi peningkatan IPM sebesar 1 dalam satuan Indeks maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu sebesar -3.17E-06 dalam satuan indeks.

2. Analisis Uji Hipotesis

a. Uji T-Statistik

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain adalah konstan. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Uji T-Statistik

Variabel	t-statistik	Prob	Keterangan
PDRB	-0.683856	0.0000	Signifikan
Jumlah Penduduk	0.753557	0.0000	Signifikan
IPM	-3.17E-06	0.0000	Signifikan

Sumber: diolah penulis, 2025

Dari hasil t-statistik menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dengan hasil uji ini maka dapat dinyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023.

Pada hasil t-statistik pada variabel Jumlah Penduduk menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023. Sedangkan variabel IPM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023

b. Uji F-Statistik

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2), IPM (X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan wilayah (Y).

Tabel 6: Uji T-Statistik

Variabel	t-statistik	Prob	Keterangan
PDRB			
Jumlah Penduduk	31.34044	0.000000	Signifikan
IPM			

Sumber: diolah penulis, 2025

Dari hasil regresi tersebut pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan IPM ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023 diperoleh F-statistik pada tabel 6 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.000000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, Jumlah Penduduk, dan IPM ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Hasil nilai *R-squared* sebesar 0.408750 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023 mampu dijelaskan oleh tiga variabel independen PDRB, Jumlah Penduduk dan IPM sebesar 40,88% sedangkan sisanya sebesar 59,12% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

3. Analisis Ketimpangan Disparitas Pendapatan

Berdasarkan standar Ketimpangan pendapatan menurut *H.T Oshima* (dalam Sutawijaya, 2004) Indeks Williamson antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori rendah karena *Indeks Williamson* kurang dari 0,35. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan

adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga perbedaan alokasi dana yang dipergunakan untuk pembangunan di setiap Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu.

4. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan *Random Effect Model* (REM). Metode *Random Effect Model* (REM) adalah metode yang mempertimbangkan adanya variabel pengganggu (*error*) yang saling berhubungan baik antar waktu maupun antar individu yang dicerminkan lewat intercept yang diakomodasi lewat *error* yang mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Dari hasil pengujian model estimasi *Random Effect Model* (REM) disimpulkan bahwa :

- a. Pengaruh PDRB Terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi, ditemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 hingga 2023. Dalam hasil uji regresi menggunakan *software* Eviews 12, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita berhubungan negatif dan signifikan dengan ketimpangan pendapatan, sehingga setiap kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah sebesar 0.683856 juta rupiah.

Besarnya PDRB tiap daerah berbeda, tergantung pada kapasitas ekonomi dan potensi sumber daya alam yang tersedia. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau total nilai barang dan jasa akhir dari seluruh unit ekonomi di daerah tersebut. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga daerah dengan PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata dapat memperkecil disparitas pendapatan karena peningkatan PDRB menciptakan lebih banyak peluang ekonomi yang terdistribusi di berbagai sektor (Tamrin dkk., 2023), (Sendouw dkk., 2022).

Penelitian sebelumnya oleh Yuliani dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita di wilayah Yogyakarta berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendapatan, meskipun dampaknya dapat bervariasi antar wilayah tergantung pada struktur ekonomi dan distribusi sektor pekerjaan di tiap daerah. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan PDRB memiliki peran penting dalam meratakan distribusi pendapatan karena daerah dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki lebih banyak kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang inklusif, sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan.

Selain itu, studi oleh Tamrin dkk. (2023) menemukan bahwa dana penyeimbang dan lama sekolah juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui PDRB per kapita, mengindikasikan pentingnya investasi sumber daya manusia dan distribusi fiskal yang tepat dalam meratakan ekonomi regional. Analisis ini menyiratkan bahwa peningkatan PDRB harus diiringi dengan kebijakan distribusi ekonomi yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan secara signifikan di berbagai wilayah.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten Dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2023

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi, ditemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 hingga 2023. Dari hasil analisis menggunakan Eviews 12, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan, di mana setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1.000 jiwa akan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar wilayah sebesar 0.753557 ribu jiwa.

Hasil ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan di daerah berkembang, di mana peningkatan populasi menyebabkan persaingan kerja yang lebih ketat dan meningkatkan pengangguran, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas regional dan mengurangi pendapatan per kapita secara agregat (Sari & Purwono., 2021), (Istanti dkk, 2021).

Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa peningkatan penduduk di daerah perkotaan sering kali diiringi oleh peningkatan kesenjangan pendapatan, karena populasi yang padat memperberat ketimpangan akibat terbatasnya akses pekerjaan dan layanan sosial bagi masyarakat bawah (Prawoto & Cahyani, 2020). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi efek negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan, termasuk pengembangan program pelatihan kerja dan perluasan akses pekerjaan guna mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah.

c. Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2023.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi, diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu pada periode 2010 hingga 2023. Dari hasil output Eviews 12, nilai t-hitung untuk variabel IPM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut, yang mana setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar $-3.17E-06$ persen. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi berdampak pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyadi dkk. (2022), yang menemukan bahwa peningkatan IPM secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia, terutama melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan kesehatan yang lebih baik, yang memperkuat kompetensi tenaga kerja di berbagai daerah. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian Ghifara dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di kota-kota besar Indonesia, mencerminkan pentingnya investasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Secara keseluruhan,

temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung pengembangan IPM, seperti program pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah Provinsi Bengkulu dan memperkuat stabilitas ekonomi di berbagai kabupaten dan kota.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tergolong rendah, namun tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti PDRB, jumlah penduduk, dan IPM. Analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa peningkatan PDRB di suatu daerah cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, mengindikasikan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Sebaliknya, jumlah penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tanpa pemerataan ekonomi dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan. Di sisi lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mempertegas bahwa perbaikan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan berperan dalam meratakan distribusi pendapatan antar wilayah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara merata, pengelolaan jumlah penduduk yang efektif, serta pelaksanaan program-program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna menekan ketimpangan pendapatan. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi disparitas sosial ekonomi antar kabupaten dan kota.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan IPM, padahal terdapat faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan. Kedua, hasil yang diperoleh bersifat umum sehingga belum mampu menjelaskan secara rinci penyebab ketimpangan pendapatan pada masing-masing kabupaten dan kota.

Rekomendasi Penelitian

Penelitian di masa mendatang, disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi, infrastruktur, dan distribusi anggaran daerah guna memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penggunaan model ekonometrika alternatif, seperti analisis spasial atau model non-linear, dapat menggali lebih dalam hubungan antara variabel. Penelitian juga dapat memperpanjang periode studi untuk memantau tren jangka panjang atau melakukan studi perbandingan dengan provinsi lain untuk melihat pola ketimpangan yang berbeda. Melibatkan kebijakan pemerintah, seperti program bantuan sosial atau insentif investasi, juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas intervensi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam mengatasi ketimpangan di berbagai wilayah

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, K., & Manulang, R. (2020, March). Analysis of Economic Inequality in Indonesia. In *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (pp. 391-397). Atlantis Press.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Indonesia 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Bloom, D. E., Kuhn, M., & Prettnner, K. (2017). Africa's prospects for enjoying a demographic dividend. *Journal of Demographic Economics*, 83(1), 63-76.
- Fajriah, N. A. (2021). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product, Number of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 171-187.
- Fidella, R. (2021). The factors affecting HDI Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 4099, 160-167.
- Fitriyah, L dan Rachmawati, L.(2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Ghifara, A. S., Iman, A. N., Wardhana, A. K., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). The effect of economic growth, government spending, and human development index toward inequality of income distribution in the metropolitan cities in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 529-536.
- Istanti, E., Negoro, B. K., & GS, A. D. (2021). Analysis of Factors Affecting Income Distribution Inequality in Indonesia 2009-2013 Period. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 4(02), 157-163.
- Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat pdrb perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia periode tahun 2019-2021. *Profit: jurnal manajemen, bisnis dan akuntansi*, 1(4), 23-43.
- Kartiasih, F., Djalal Nachrowi, N., Wisana, I. D. G. K., & Handayani, D. (2023). Inequalities of Indonesia's regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: a spatial and multivariate analysis. *Information Technology for Development*, 29(2-3), 299-328.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset dan Bisnis Ekonomi*. Jakarta: Erlangga 52.
- Kuncoro, M. (2004). *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kuznets, S. (1964). *Economic Growth and The Contribution Of Agriculture*. New York: McGraw-Hill.
- Murthi, N. W. (2023). Gender Responsive: Inequality Development in Islands Bali, Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(16), 119-135.

- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533-1542.
- Novianti, T., & Panjaitan, D. V. (2022). Income inequality in Indonesia: Before and during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 12(3), 29-37.
- Oduanya, I., Onanuga, A., & Akinlo, A. (2020). Income Distribution and Growth Process in Sub-Saharan Africa. *iranian economic review*. <https://doi.org/10.22059/IER.2020.76104>.
- Permanyar, I., & Smits, J. (2020). Inequality in human development across the globe. *Population and Development Review*, 46(3), 583-601. <https://doi.org/10.1111/padr.12343>
- Prawoto, N., & Cahyani, R. D. (2020). Analysis of unequal distribution of population income in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 489-495.
- Puspa, M. Y., Fajri, A. C., & Budi, S. D. (2019). Analysis of the government role for inclusive growth of East Java Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 94(10), 158-165.
- Suseno, D. A. (2023). Analysis of Spatial Autocorrelation and Causality GRDP and Income Inequality in Java. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6(1), 73-83.
- Rachmawatie, D., & Prakoso, A. Y. (2023). The Influence of Human Development Index on The Income Distribution Inequality In Yogyakarta. *Jambura Agribusiness Journal*, 4(2), 67-75.
- Rahayu, H. C., Purwantoro, P., & Setyowati, E. (2021). Measuring the Effect of Inequality and Human Resource Indicators to Poverty Density in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(2), 153-160.
- Sendouw, R. H. E., Lonto, A. L., & Rantung, V. P. (2022). Regency and City Disparity Analysis in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 149, p. 03011). EDP Sciences.
- Setyadi, S., Indriyani, L., & Resmawati, R. T. (2022). Estimating the impact of social and economic factors on income inequality in Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 27(1), 53-63.
- Simbolon, C. M., Nisa, F., Pinem, H. A., Sinaga, D., Lumban Tobing, R. K., & Hidayat, N. (2023). Analysis of the Influence of Poverty, Human Development Index, and Population on Income Inequality in North Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*.
- Sinaga, M. (2020). Analysis of effect of grdp (gross regional domestic product) per capita, inequality distribution income, unemployment and hdi (human development index) on poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309-2317.
- Sofilda, E., Hermiyanti, P., & Hamzah, M. (2015). Determinant variable analysis of human development index in Indonesia (Case for high and low index at period 2004-2013). *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 8(09), 11-28.
- Sutawijaya, A. (2004). Analisis Disparitas Pendapatan Antardaerah dan Potensi Relatif Secara Sektoral. *Jurnal STEI*, (03), 34-51.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia*. Rajawali Press.

- Husni Tamrin, L. M., Irwan, M., & Firmansyah, M. (2023). Balancing Funds, Investment, Length of Schooling, Unemployment Rate and Income Inequality in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(05), 1872-1883.
- Sari, D. W., & Rudi Purwono, D. (2021). Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia. *Economics and Sociology*, 14(1), 103-119.
- Todaro and Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Shi, T., Zang, W., Chen, D., & Xiehu, M. (2021). Income Inequality and Population Health in China: A Longitudinal Study from China Health and Nutrition Survey. PLOS ONE, 17(5). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-482904/v1>
- Wei, Y. D. (2015). Spatiality of regional inequality. *Applied Geography*, 61, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.03.013>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Wildman, J., Rahim, H., & Alam, M. (2023). Income inequality and its association with COVID-19 cases and deaths: a cross-country analysis in the Eastern Mediterranean region. *BMJ Global Health*, 8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012271>.
- Wu, F., & Cai, W. (2019). Influence of Income Disparity on Child and Adolescent Education in China: A Literature Review.. *New directions for child and adolescent development*, 2019 163, 97-113 . <https://doi.org/10.1002/cad.20268>.
- Yuliani, R., Rahman, Y. A., Nuraini, D., & Khotimah, K. (2021, February). Determinants of income inequality in Yogyakarta Province. In *International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)* (pp. 301-305). Atlantis Press.

OPEN ACCESS

Citation:

Kusumawardhani, R. T., & Liana, D. (2025). *Dampak Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Kesehatan Pemerintah Terhadap Sektor Kesehatan Di Indonesia*. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 10(1), 75–93.

Received: April 30, 2025

Accepted: May 10, 2025

Revised: June 18, 2025

Published: June 30, 2025

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

DAMPAK KETIMPANGAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN KESEHATAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR KESEHATAN DI INDONESIA

Impact Of Income Inequality, Economic Growth, and Government Health Expenditure on The Health Sector in Indonesia

Rosalina Tineke Kusumawardhani ¹

Damia Liana ²

Abstract

This study investigates the impact of income inequality, regional economic growth, and government health expenditure on the health across 34 provinces in Indonesia from 2018 to 2022. Using a panel data regression with a fixed effects model, the results show that income inequality has a negative and statistically significant effect on the health sector, while economic growth and government spending have positive and significant effects. Provinces with higher income inequality tend to have lower health sector performance, particularly in terms of health budget allocation and public access to health services. In contrast, regions with sustained economic growth and increased government health expenditure experience improvements in health infrastructure and service delivery. These findings suggest that narrowing income disparities and maintaining consistent economic and fiscal support are essential to improving health sector outcomes at the provincial level in Indonesia. Policy interventions focusing on inclusive economic development and equitable budget distribution can help reduce regional disparities in health services.

Keywords: *economic growth, government expenditure, health sector, income inequality.*

JEL Classification: *D63; H51; I14; I18*

¹ Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran, rosalina.tineke@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, damia.liana-2023@feb.unair.ac.id

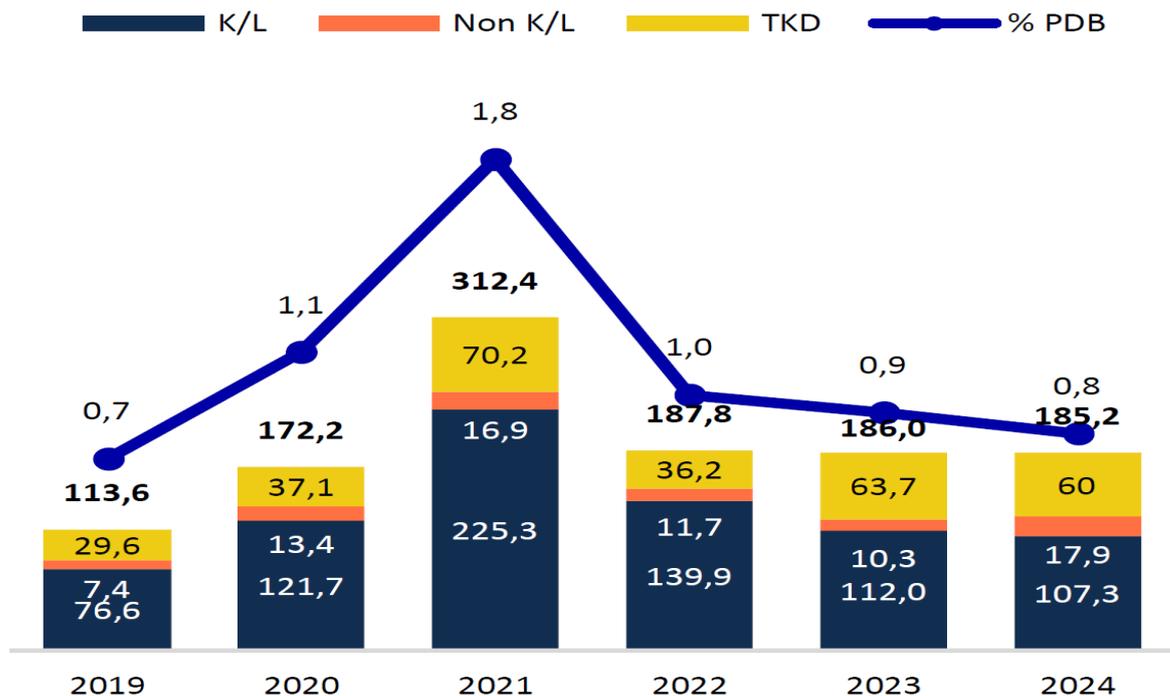
I. PENDAHULUAN

Sektor kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia, kesehatan masyarakat yang baik mencerminkan kualitas hidup yang baik serta merupakan fondasi penting bagi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Indonesia, upaya peningkatan kesehatan telah menjadi prioritas nasional, hal ini tercermin dari alokasi anggaran sektor kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja sektor kesehatan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini tidak hanya berimplikasi pada distribusi ekonomi yang tidak merata, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal atau yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Penduduk dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai karena keterbatasan finansial, yang mengarah pada hasil kesehatan yang lebih buruk dan kesenjangan pada akses terhadap kesehatan (Sarjito, 2024; (Torul, 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia yang digambarkan oleh indeks Gini Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka 0,381, yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang cukup signifikan. Daerah-daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki infrastruktur kesehatan yang lebih baik dan tingkat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan pendapatan lebih rendah. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dapat memperlebar disparitas sektor kesehatan antarwilayah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang kompleks terhadap sektor kesehatan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah, yang pada gilirannya mendorong peningkatan belanja kesehatan. Namun, jika pertumbuhan tidak inklusif, manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, sementara kelompok rentan tetap tertinggal dalam akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan (Hasanah, 2017). Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan terhadap pemerataan kesehatan, diperlukan adanya kebijakan yang secara khusus menargetkan pemerataan kesehatan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan kesehatan untuk semua segmen masyarakat (Satrio *et al.*, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi benar-benar berdampak positif terhadap sektor kesehatan, atau justru memperbesar ketimpangan layanan kesehatan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengeluaran pemerintah, khususnya dalam konteks belanja kesehatan dalam APBN, menjadi instrumen kunci untuk menyeimbangkan ketimpangan ini. Pada 2025, anggaran kesehatan mencapai 6 persen dari total APBN, meskipun kewajiban alokasi anggaran kesehatan (*mandatory spending*) telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Namun, realisasi dan efektivitas penggunaan anggaran ini bervariasi antar provinsi, dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, prioritas pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan.

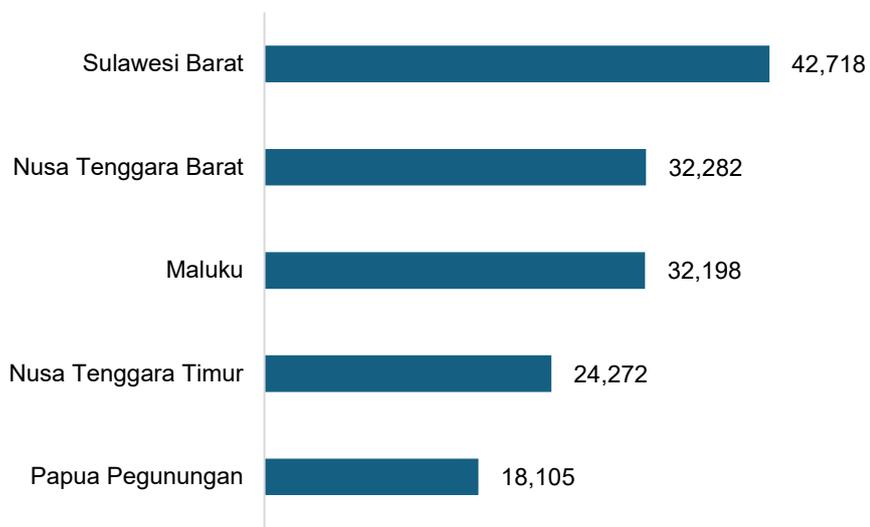


Gambar 1. Perkembangan Anggaran Kesehatan

Sumber: Kemenkeu (2025)

Dukungan anggaran dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun anggaran kesehatan selama periode 2019-2024 mengalami peningkatan dari Rp113,6 triliun menjadi Rp185,2 triliun (Gambar 1). Anggaran kesehatan rata-rata sebesar 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tumbuh secara nominal rata-rata sebesar 0,2 persen. Sedangkan anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2024 memiliki rasio sebesar 5,6 persen terhadap belanja negara dalam APBN. Dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024, kebijakan fiskal difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti sanitasi layak melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu fokus DAK Fisik Bidang Kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.

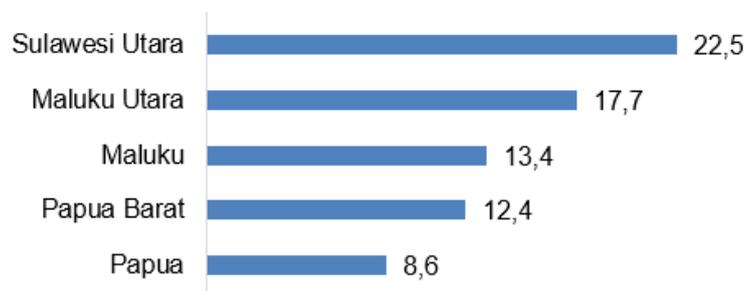
Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat PDRB per kapita dalam hal ini menjadi indikator untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tingginya tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, kesempatan kerja, inflasi, bencana alam, tingkat dan jenis pendidikan, investasi, ketersediaan fasilitas umum, tingkat upah neto, pajak, subsidi, penggunaan teknologi dan lainnya (Amrullah, 2022).



Gambar 2. Lima Provinsi dengan PDRB Terendah (Ribu Rp)

Sumber: BPS, 2025.

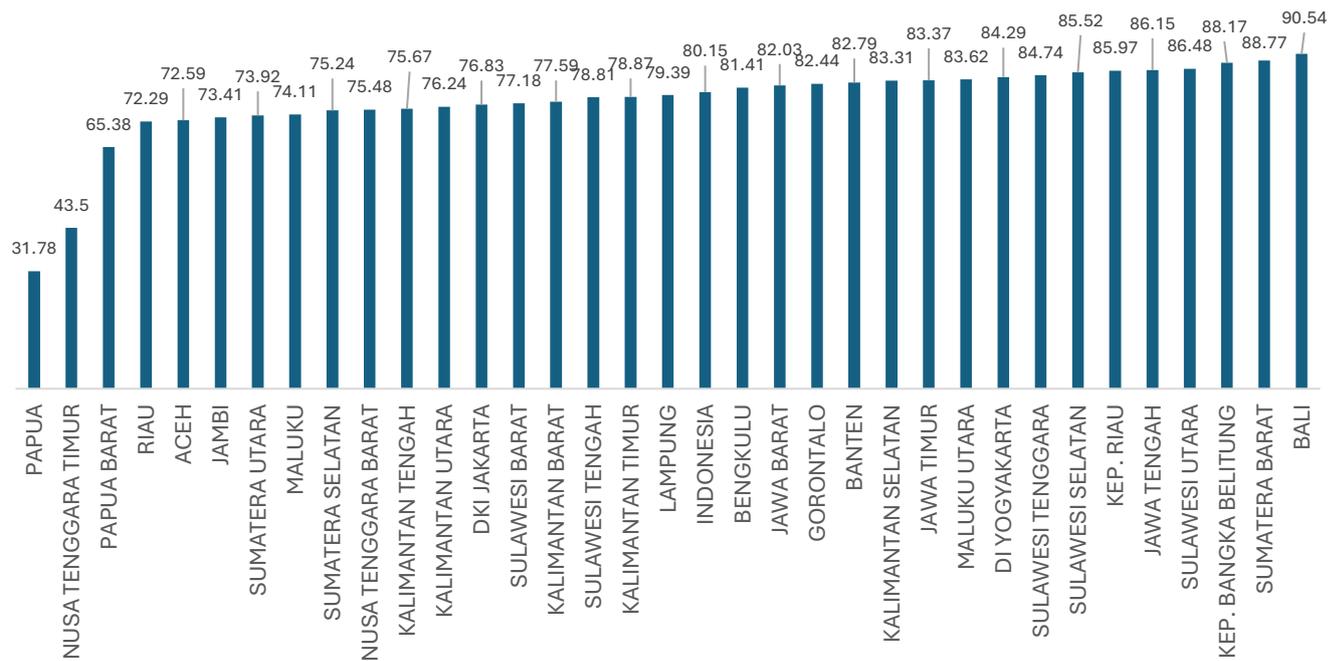
Berdasarkan gambar 3, lima provinsi dengan PDRB terendah berada di Indonesia bagian timur. Jika kita sandingkan dengan lima provinsi terendah dengan puskesmas yang belum memenuhi standar pemerintah juga berada di Indonesia bagian timur (gambar 4). Hal ini menggambarkan distribusi sektor kesehatan di kawasan ini belum merata dan sangat timpang dibandingkan dengan kawasan Indonesia lainnya.



Gambar 3. Lima Provinsi Terendah dengan Puskesmas yang Belum Memenuhi Standar Pemerintah (Persen)

Sumber: BPS, 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar di Indonesia sebesar 80,15 pada 2023 (gambar 2). Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 79,33. Skor tertinggi dimiliki oleh Bali sebesar 90,54. Posisi tertinggi kedua yaitu Sumatera Barat dengan indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar mencapai 88,77 poin. Setelahnya ada Kepulauan Bangka Belitung dengan skor indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar sebesar 88,17. Skor indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar terendah berada di Provinsi Papua (31,78), Nusa Tenggara Timur (43,4), dan Papua Barat (65,38). Terdapat ketimpangan perolehan skor yang cukup jauh antara provinsi tertinggi dan provinsi terendah.



Gambar 4. Indeks Proporsitas Akses Rumah Tangga Terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Sumber: BPS (2024)

Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran kesehatan pemerintah merupakan variabel yang saling terkait secara langsung dalam mempengaruhi sektor kesehatan, di mana ketimpangan pendapatan berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli dan distribusi sumber daya, dan pengeluaran kesehatan pemerintah menentukan ketersediaan serta kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak penelitian telah membahas ketimpangan pendapatan secara umum, namun masih sedikit yang secara mendalam mengkaji bagaimana ketimpangan pendapatan per kapita di Indonesia mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini berpotensi mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi dampak langsung ketimpangan pendapatan terhadap disparitas kualitas layanan kesehatan di berbagai provinsi. Selain itu, meskipun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah banyak diteliti, penelitian yang fokus pada pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif terhadap sektor kesehatan masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi benar-benar mengurangi ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, atau justru memperburuknya. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah: seberapa besar pengaruh anggaran kesehatan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan per kapita pada provinsi di Indonesia? Seberapa besar pengaruh anggaran kesehatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia?

Penelitian ini dilakukan selama periode 2014-2023. Pada tahun 2014, pemerintahan baru mulai menerapkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, sektor kesehatan mengalami perubahan besar dengan pengenalan program jaminan kesehatan yang diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan pada 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi

seluruh lapisan masyarakat, namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan dan distribusi layanan kesehatan perlu dianalisis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Sektor Kesehatan

Teori *Cumulative Causation* yang di kembangkan oleh Myrdal menjabarkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kesehatan dapat membentuk lingkaran setan (*vicious cycle*). Masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap produktivitas dan pendidikan sehingga mereka sulit untuk meningkatkan pendapatan. Untuk itu, tanpa adanya intervensi pemerintah di bidang kesehatan maka ketimpangan pendapatan akan terus meningkat.

Kondisi sosial dan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan, sangat memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Ketimpangan pendapatan menciptakan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan nutrisi, yang pada akhirnya berdampak pada kesenjangan kesehatan (Patel *et al.*, 2018; World Health Organization, 2021). Dalam konteks ekonomi kesehatan, ketimpangan pendapatan mengurangi daya beli kelompok miskin terhadap layanan kesehatan yang layak, baik dalam sistem kesehatan publik maupun privat. Fenomena ini tercermin dalam sejumlah indikator, antara lain kesenjangan pendapatan, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perbedaan dalam kesempatan ekonomi (Garbinti *et al.*, 2021). Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi akan menciptakan stres sosial, kecemasan, dan menurunkan kohesi sosial, yang semuanya berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang buruk.

2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Sektor Kesehatan

Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi suatu negara atau wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah adalah produk domestik bruto (PDB). PDB adalah nilai total dari produksi ekonomi dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output. Pembangunan ekonomi dapat lebih menjelaskan kualitas hidup masyarakat, karena pembangunan ekonomi mencakup aspek kualitatif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia, terutama bagi negara-negara berkembang. Modal manusia mengacu pada kualitas tenaga kerja yang ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Todaro & Smith (2020) menekankan bahwa pentingnya investasi untuk kesehatan dalam meningkatkan modal manusia. Ketersediaan layanan kesehatan yang baik akan mendorong produktivitas tenaga kerja.

Teori pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya modal manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dihasilkan melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan dan inovasi. Sehingga Mankiw, Romer, dan Weil melakukan perbaikan pada model Solow dengan memasukkan *human capital* ke dalam model, sehingga fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi :

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta (A(t)L(t))^{1-\alpha-\beta} \dots\dots\dots(1)$$

dimana Y adalah output (PDB); K adalah modal fisik; H merupakan *human capital*; A adalah teknologi yang bisa dipengaruhi oleh modal manusia; Model ini dikenal sebagai MRW, dan dalam model ini tidak ada kondisi *steady state* dan kemajuan teknologi dianggap sebagai variabel endogen jika $\alpha + \beta = 1$.

3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di sebuah negara. (Bhattacharjee *et al.*, 2017) menjelaskan bahwa pengeluaran kesehatan publik oleh pemerintah memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan regional dibandingkan dengan layanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Hal ini disebabkan sistem kesehatan yang disediakan oleh pemerintah memiliki akses yang lebih merata bagi masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan dari tingkat pendapatan masyarakat.

Pentingnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga diungkapkan oleh (Sultana *et al.*, 2024) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita berperan signifikan dalam meningkatkan angka harapan hidup, sehingga membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan perlu menjadi program prioritas pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

WHO (2023) juga menekankan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor penting, hal ini dikarenakan sektor kesehatan memiliki peran penting dalam memperluas cakupan layanan kesehatan dan mewujudkan target *universal health coverage* (UHC). Diperlukan adanya kebijakan publik yang lebih kuat untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran kesehatan benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip universalitas dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan.

4. Penelitian Terdahulu

Hu & Wang (2024) melakukan penelitian tentang dampak pengeluaran kesehatan publik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD, hasilnya menunjukkan bahwa alam konteks perekonomian dengan tingkat konsumsi rumah tangga, upah tenaga kerja, dan investasi modal fisik yang tinggi, belanja kesehatan publik terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Han (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor kesehatan, peningkatan kesenjangan kemiskinan akan berdampak terhadap peningkatan harapan hidup dan menurunkan angka kematian, hal ini mengindikasikan bahwa adanya mekanisme lain di luar sistem jaminan kesehatan bagi kelompok berpendapatan rendah. oleh karena itu peneliti menekankan terkait dengan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada distribusi pendapatan untuk mengurangi adanya ketimpangan kesehatan secara efektif.

Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan akan berdampak negatif terhadap sektor kesehatan dalam jangka panjang. Perubahan positif dalam ketimpangan pendapatan akan menurunkan harapan hidup, sebaliknya perubahan negatif terhadap kesenjangan pendapatan akan meningkatkan harapan hidup (Chang & Gao, 2021). Wang & Nguyen Thi (2022) menekankan bahwa upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan sebaiknya difokuskan pada peningkatan rasio pengeluaran kesehatan terhadap pendapatan, bukan hanya peningkatan absolut pengeluarannya, serta pentingnya perhatian terhadap

dinamika ini pada kuantil ekstrem. Untuk itu, bentuk kebijakan publik yang dijalankan oleh sebuah negara akan sangat berdampak terhadap sektor kesehatan di negara tersebut. Negara-negara dengan jaring pengaman dan infrastruktur kesehatan publik yang lemah cenderung memiliki hubungan yang lebih lemah antara pendapatan dan kesehatan dengan sistem perlindungan kesehatan yang lebih kuat, serta tingkat pemulihan yang lebih cepat dari masalah kesehatan di kalangan kelompok berpenghasilan rendah (Currie, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh anggaran kesehatan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan per kapita pada provinsi di Indonesia dan pengaruh anggaran kesehatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu maka penelitian ini memiliki dugaan sementara yaitu:

H1: Anggaran kesehatan memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2013-2023.

H2: Anggaran kesehatan memiliki pengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2013-2023.

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan data panel provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2023.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel dari 34 Provinsi Indonesia dari tahun 2014-2023 dengan menggunakan alat bantu Stata 17 untuk menganalisis data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa data 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2014-2023. Data yang diperoleh diantaranya adalah data-data angka harapan hidup, data Rasio Gini, data PDRB ADHK 2010, dan data pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan masing-masing Provinsi di Indonesia. Penelitian ini akan menggabungkan data *time series* yaitu dari 2014-2023 dengan data *cross sectional* yang diperoleh dari 34 Provinsi di Indonesia. Data panel provinsi memungkinkan peneliti untuk melihat variasi antar provinsi secara mendalam.

Variabel dan keterangan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari World Bank.

Tabel 1. Variabel dan Sumber Data

No	Variabel	Satuan	Keterangan	Sumber
1	ahh	indeks	Angka Harapan Hidup digunakan sebagai proksi dari sektor kesehatan	BPS
2	gini	indeks	Rasio Gini digunakan sebagai proksi dari kesenjangan pendapatan	BPS
3	Inpdrb	Rp miliar	PDRB ADHK Konstan 2010 digunakan sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi daerah	BPS

4	Inge	Rp miliar	Realisasi Anggaran Kesehatan digunakan sebagai proksi dari pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan	Kementerian Keuangan
---	------	-----------	--	----------------------

Tabel 2. Penjelasan Variabel

No	Variabel	Penjelasan Variabel
1	ahh	AHH mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan dicapai oleh seseorang berdasarkan kondisi kesehatan suatu populasi. Angka ini menggambarkan secara tidak langsung tingkat keberhasilan sistem kesehatan dalam menjaga kualitas hidup dan mencegah kematian dini akibat penyakit atau faktor lainnya. Semakin tinggi AHH, semakin baik kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap perawatan medis yang diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, AHH yang rendah sering kali menunjukkan adanya masalah dalam sistem kesehatan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya akses terhadap layanan medis, atau tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
2	gini	Ketimpangan pendapatan dapat digambarkan melalui Indeks Gini. Indeks Gini bernilai antara 0-1, semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Indeks Gini memberikan gambaran keseluruhan tentang distribusi pendapatan di seluruh spektrum pendapatan. Dengan sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan dapat dibandingkan antar wilayah atau negara, Indeks Gini menjadi proksi yang efektif untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.
3	Inpdrb	Pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui Inpdrb (Logaritma Natural dari Produk Domestik Regional Bruto), karena PDRB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah, yang mencerminkan kapasitas ekonomi wilayah tersebut. Dengan menggunakan logaritma natural dari PDRB, data ini mampu meratakan fluktuasi yang mungkin terjadi akibat variasi nilai nominal yang tinggi, sehingga memberikan gambaran yang lebih stabil dan komparatif tentang pertumbuhan ekonomi antar wilayah dari waktu ke waktu
4	Inge	Realisasi Anggaran Kesehatan mencerminkan total anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk sektor kesehatan dalam suatu periode. Dengan menggunakan logaritma natural, fluktuasi nilai anggaran yang besar dapat dikendalikan, sehingga mempermudah perbandingan antar periode atau antar wilayah dengan skala ekonomi yang berbeda.

2. Model Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap sektor kesehatan. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel dependen

terhadap variabel independen dengan metode data panel. Adapun persamaan matematika dari penelitian ini adalah:

$$\ln h_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{gini}_{it} + \beta_2 \ln \text{pdrb}_{it} + \beta_3 \ln \text{ge}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- gini_{it} = Rasio Gini di Provinsi i pada periode t
- $\ln \text{pdrb}_2$ = Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi i pada periode t
- $\ln \text{ge}_{it}$ = Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan di provinsi i pada priode t
- i = data *cross section*
- t = data *time series*
- β_0 = konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien
- ε_{it} = *error term*

3. Teknik Analisis

Penelitian ini, menggunakan analisis data panel untuk mengeksplorasi dampak ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap sektor kesehatan di Indonesia. Model analisis data panel memiliki tiga pendekatan utama, yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk memilih teknik analisis yang paling sesuai dengan model regresi pada penelitian ini maka dilakukan tiga pengujian yaitu Uji F Restricted, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji F Restricted, yang bertujuan untuk menentukan apakah model PLS atau FEM, Uji *Hausman*, yang bertujuan untuk memilih antara FEM atau REM, sedangkan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk menguji apakah terdapat efek acak (*random effects*) dalam data, yang akan menentukan apakah model REM adalah model yang tepat. Pengujian data-data tersebut dilakukan dengan menggunakan Stata 17.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian F-statistik secara bersama-sama dan pengujian koefisien regresi secara terpisah terhadap t-statistik untuk melihat kebenaran hipotesis.

a. Pengujian secara parsial (uji-t)

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak, digunakan uji t dengan rumus hipotesis di bawah ini: Ho: variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen H1: variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Jika nilai *prob* > 0,05 (5%) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, artinya menolak Ho. Sedangkan jika nilai *prob* < 0,05 (5%) variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, artinya gagal menolak Ho.

b. Pengujian secara simultan (uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak, digunakan uji F dengan rumus hipotesis di bawah ini:

H_0 : variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika nilai prob f-statistik $> 0,05$ (5%) maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang berarti menolak H_0 . Jika nilai prob f-statistik $< 0,05$ (5%) secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, artinya gagal menolak H_0 .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi dan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kesehatan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan baik secara simultan maupun parsial. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah sektor kesehatan di Indonesia selama periode 2014-2023.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel dengan menggunakan tiga metode, yaitu: metode *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga metode tersebut akan ditentukan metode data panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk menentukan metode data panel yang paling sesuai untuk penelitian ini, maka akan dilakukan beberapa pengujian. Pertama yang dilakukan adalah uji *F-Restricted*, uji *Lagrange Multiplier*, dan Uji *hausmann*. Uji ini dilakukan untuk menentukan model terbaik

2. Pemilihan Model Estimasi

Regresi data panel yang dilakukan dalam pemilihan model ini untuk menentukan model yang tepat, pengujian model menggunakan tiga pendekatan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pertama, untuk menguji model terbaik antara PLS dan FEM maka dilakukan uji *F-Restricted*. Hasil estimasi uji *F-Restricted* menunjukkan bahwa Nilai Prob $> F$ sebesar 0,0000 sebagaimana terlihat pada Tabel 3, artinya nilai probabilitas kurang dari α (5%), sehingga H_0 (PLS) ditolak dan model terbaik untuk digunakan sementara adalah FEM.

Tabel 3. Hasil Uji F Restricted

Fixed-Effect (within) regression
Prob > F = 0,0000

Sumber: diolah penulis, 2025

Kedua, dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*, untuk memilih model yang terbaik antara metode PLS dan REM. Hasil estimasi uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa Nilai Prob > Chi² sebesar 0,0000 sebagaimana terlihat pada Tabel 4, artinya nilai probabilitas kurang dari α (5%), sehingga H₀ (PLS) ditolak dan model terbaik untuk digunakan sementara adalah REM.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Chibar (01)	1424.95
Prob > Chibar2	0.0000

Sumber: diolah penulis, 2025

Ketika, dilanjutkan dengan uji *Hausman*, untuk memilih model yang terbaik antara metode FEM dan REM. Hasil estimasi uji *Hausman* menunjukkan bahwa Nilai Prob > Chi² sebesar 0.2724 sebagaimana terlihat pada Tabel 5, artinya nilai probabilitas lebih dari α (5%), sehingga H₀ (REM) diterima dan model terbaik untuk digunakan sementara adalah REM.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Hausman FEM, REM	
Prob > Chibar2 =	0.2724

Sumber: diolah penulis, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa, metode terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode REM untuk mengestimasi pengaruh variabel ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap sektor kesehatan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2014-2023. Hasil dari pengolahan model estimasi REM adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Estimasi REM

R-Square	Numb. Of Obeservation = 340		
Within: 0.6432	Numb. Of Groups = 34		
Between: 0.2010	F (3,303) = 552.92		
Overall: 0.2176	Prob > F = 0,0000		
Variabel	Coef.	Std. Error	Prob.
gini	-0.1176496	0.0199689	0.0000
Inpdrb	0.0351377	0.00301	0.0000
Inge	0.0041667	0.0006053	0.0000
Konstanta	3.807242	0.034491	0.0000

Sumber: diolah penulis, 2025

Pada Tabel 6 diperoleh nilai koefisien ketimpangan pendapatan (gini) sebesar -0,1176496, pertumbuhan ekonomi daerah (Inpdrb) sebesar 0,0351377 dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Inge) 0,0041667. Seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor kesehatan di Indonesia dari tahun 2014-2023. Nilai probabilitas

variabel independen yang berpengaruh terhadap PDRB yaitu nilai probabilitas jumlah angkatan kerja 0.0000 dan nilai probabilitas PAD 0.0000. Nilai R-squared yang didapatkan 0,6432 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 64,32%, sedangkan sisanya 35,68% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

3. Uji Simultan (uji-F)

Berdasarkan output pengujian model *random effect*, diperoleh nilai probabilitas F-statistik $0.000000 < 0.05$ maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil output regresi di atas pada tabel 5 dapat ditulis persamaan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = -0,1176496 + 0,0351377 + 0,0041667 + 3.807242 + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

4. Uji Parsial (uji-t)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri (parsial). Hasil dari uji-t menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan (gini) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$, artinya variabel tersebut secara parsial mempengaruhi sektor kesehatan di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi daerah (Inpdrb) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$, artinya variabel tersebut secara parsial mempengaruhi sektor kesehatan di Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Inge) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$, artinya variabel tersebut secara parsial mempengaruhi sektor kesehatan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap variabel independen dari hasil uji estimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM):

5. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Nilai koefisien ketimpangan pendapatan sebesar -0.1176496 dengan tingkat signifikansi variabel adalah $0,0000 < \alpha = 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap sektor kesehatan. Ketika terjadi kenaikan 1 unit ketimpangan pendapatan maka sektor kesehatan akan turun sebesar 0.1176496 unit, *ceteris paribus*. Ini berarti, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah, maka semakin buruk pula kondisi sektor kesehatannya.

Pengaruh negatif ketimpangan pendapatan terhadap sektor kesehatan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doan & Giang (2024) yang menemukan bahwa ketimpangan pendapatan juga berkorelasi positif terhadap angka kematian dan berdampak negatif terhadap angka harapan hidup saat lahir. Tingginya angka ketimpangan akan berdampak terhadap memburuknya sektor kesehatan. Rana *et al.* (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendanaan publik yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil kesehatan publik yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan publik dapat mengurangi dampak buruk dari kesenjangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan memengaruhi tabungan, akses terhadap layanan kesehatan, dan standar hidup, yang semuanya merupakan determinan penting bagi kesehatan masyarakat (Zhao *et al.*, 2024).

Di Indonesia, dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap sektor kesehatan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan pada setiap provinsi. Ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatkan malnutrisi, penyebaran penyakit, dan masalah kesehatan fisik, mental, serta

perilaku, sehingga memperburuk kesejahteraan dan memperbesar biaya kesehatan, terutama di kelompok berpendapatan rendah (Taresh *et al.*, 2021).

Kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pendapatan kelompok paling rentan dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka sekaligus menurunkan kesenjangan kesehatan. Selain itu, memprioritaskan pelatihan tenaga medis, khususnya dokter layanan primer, di wilayah dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi juga menjadi strategi penting untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan lokal secara lebih merata dan efektif (Nenow *et al.*, 2022). Upaya mengatasi ketimpangan pendapatan menjadi sangat penting dalam memperkuat sektor kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai determinan kesehatan.

6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sektor kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi model regresi, diperoleh nilai koefisien untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0351377, dengan tingkat signifikansi 0,0000 ($\alpha = 0,05$). Artinya, setiap peningkatan sebesar 1% dalam pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkatkan sektor kesehatan sebesar 0,03%, *ceteris paribus*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas dan kinerja sektor kesehatannya.

Secara konseptual, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan sektor kesehatan dapat dijelaskan melalui dua jalur utama: (1) peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan (2) peningkatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memperluas basis penerimaan pajak daerah, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga medis, serta program promotif dan preventif di bidang kesehatan. Di sisi lain, masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk asuransi kesehatan dan pengobatan preventif (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian oleh Para dan Alam (2024) di negara bagian utara India menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% berkontribusi pada penurunan angka kematian bayi, yang mencerminkan dampak signifikan dari perbaikan indikator ekonomi terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak hanya berdampak terhadap konsumsi dan investasi, tetapi juga terhadap hasil kesehatan (*health outcomes*) seperti angka harapan hidup, status gizi, dan prevalensi penyakit.

Selain itu, studi oleh Zhao *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa di wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah, pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Artinya, dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap sektor kesehatan bahkan lebih nyata di daerah tertinggal, karena terjadi peningkatan akses terhadap layanan dasar dan perbaikan kondisi lingkungan yang sebelumnya sangat terbatas.

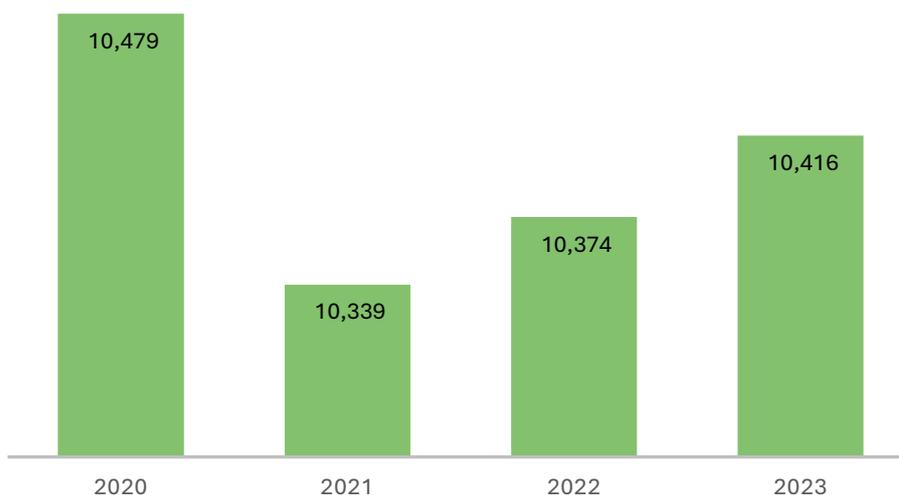
Kondisi ekonomi yang membaik juga mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup, yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Abbasian *et al.* (2021) menegaskan bahwa lingkungan yang sehat mengurangi risiko penyakit, menurunkan beban biaya kesehatan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas ini pada akhirnya memperkuat siklus pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan determinan penting bagi peningkatan kualitas sektor kesehatan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya sinkronisasi antara kebijakan ekonomi dan kesehatan di tingkat daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga alat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui jalur kesehatan.

7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia

Selain ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan turut menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap sektor kesehatan. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 0.0041667 dengan tingkat signifikansi variabel adalah 0,000 pada $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menunjukkan hubungan searah dengan sektor kesehatan. Ketika terjadi kenaikan 1% pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka sektor kesehatan akan naik sebesar 0,004%, *ceteris paribus*.

Peningkatan belanja kesehatan publik secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan, seperti penurunan angka kematian bayi dan balita serta peningkatan harapan hidup serta dapat meringankan dampak pandemi kesehatan, seperti COVID-19 (Kofi Boachie *et al.*, 2018; Vadlamannati *et al.*, 2023). Untuk itu, pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dengan meningkatkan akses merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, pengeluaran pemerintah setiap tahun semakin besar hal ini dilakukan agar pelayanan publik terhadap penduduk semakin baik. Realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu serta nantinya dapat pula meningkatkan pembangunan manusia. Realisasi dana itu dialokasikan salah satunya untuk meningkatkan dan memperbanyak fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Puskesmas Keliling.



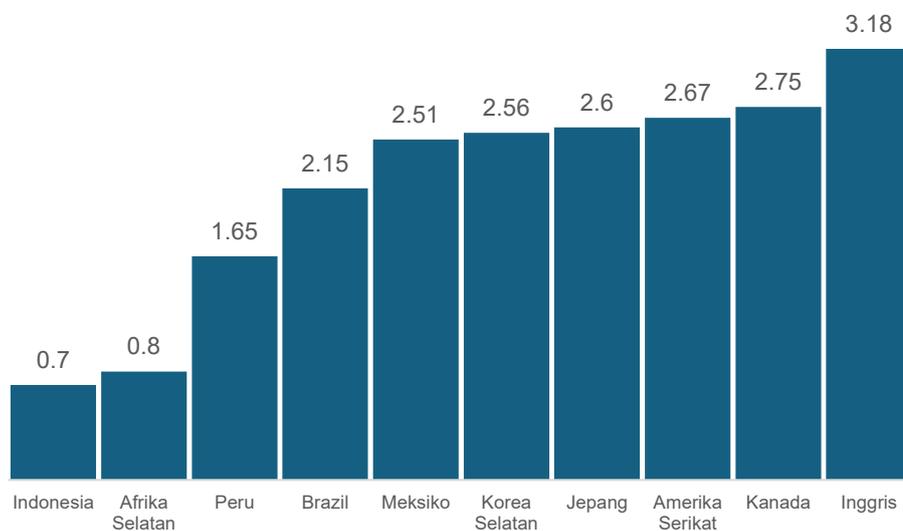
Gambar 5. Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2020-2023

Sumber: Kemenkes, 2024.

Fasilitas kesehatan (faskes) dasar merupakan faskes tingkat pertama yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk mendapatkan kegiatan promotif dan preventif, penilaian kesehatan, diagnosis, pengobatan serta pelayanan rehabilitasi. Fasilitas kesehatan dasar

mencakup Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), poliklinik atau balai pengobatan, dan tempat praktik dokter. Jumlah puskesmas selama 3 tahun terakhir belum melampaui jumlah puskesmas tahun 2020 (gambar 5). Pada tahun 2020 terdapat 10.479 puskesmas. Namun, tahun 2021 jumlah puskesmas mengalami penurunan menjadi 10.339 puskesmas. Walaupun tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah puskesmas tahun 2023 masih di bawah tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses fasilitas kesehatan masyarakat puskesmas ini masih perlu menjadi perhatian.

Rasio dokter per jumlah penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas layanan kesehatan suatu negara. Angka ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia untuk melayani populasi penduduk tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan keterbatasan dalam infrastruktur kesehatan, kurangnya pelatihan medis, dan masalah distribusi tenaga kesehatan.



Gambar 6. Negara dengan Rasio Dokter Terendah

Sumber: OECD, 2023.

Menurut laporan dari OECD (2023), rasio dokter Indonesia merupakan terendah di dunia dengan hanya sekitar 0,7 dokter per 1.000 penduduk. Artinya dengan rasio tersebut kurang dari 1 dokter di Indonesia harus melayani 1.000 penduduk. Dengan kata lain 1 dokter harus melayani sekitar 1.400 penduduk. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata atau standar yang ditetapkan WHO yang mencapai 1 dokter per 1.000 penduduk.

Meningkatnya alokasi anggaran kesehatan secara langsung berdampak pada kualitas layanan, ketersediaan fasilitas, serta pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Investasi pemerintah dalam bidang ini menjadi sangat penting, terutama untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan yang bergantung pada layanan kesehatan publik. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan strategi krusial untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap sektor kesehatan di Indonesia selama periode 2014–2023, dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian model dengan uji *F-Restricted*, *Lagrange Multiplier*, dan *Hausman*, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor kesehatan:

- a. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sektor kesehatan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu daerah, semakin menurun kualitas sektor kesehatannya. Temuan ini memperkuat bukti bahwa distribusi pendapatan yang timpang berdampak terhadap keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor kesehatan. Peningkatan ekonomi daerah menciptakan kapasitas fiskal yang lebih besar dan daya beli masyarakat yang lebih tinggi, sehingga mendorong peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan.
- c. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan berkontribusi pada penyediaan fasilitas kesehatan dasar, peningkatan jumlah tenaga medis, serta pemerataan akses layanan kesehatan antarwilayah.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 64,32% variasi sektor kesehatan di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal dan sosial yang berfokus pada pengurangan ketimpangan serta peningkatan investasi publik di sektor kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sektor kesehatan nasional perlu disertai dengan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengalokasian anggaran kesehatan yang lebih merata, khususnya di wilayah dengan ketimpangan tinggi.

2. Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati yaitu ruang lingkup penelitian hanya mencakup data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2014–2023. Oleh karena itu, hasilnya belum dapat merepresentasikan dinamika sektoral di tingkat kabupaten/kota yang mungkin menunjukkan pola berbeda. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar analisis dilakukan pada tingkat wilayah yang lebih mikro, seperti kabupaten/kota, serta mempertimbangkan dimensi spasial dan temporal secara simultan menggunakan model spasio-temporal panel. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang relevan, seperti tingkat pendidikan, urbanisasi, atau indikator lingkungan, yang juga berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi interaksi antara ketimpangan pendapatan dan pengeluaran kesehatan untuk mengetahui apakah peningkatan pengeluaran mampu menetralkan dampak negatif dari ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per kapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(1).
- Bhattacharjee, A., Shin, J. K., Subramanian, C., & Swaminathan, S. (2017). Healthcare investment and income inequality. *Journal of Health Economics*, 56, 163–177. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2017.08.007>
- Chang, S., & Gao, B. (2021). A Fresh Evidence of Income Inequality and Health Outcomes Asymmetric Linkages in Emerging Asian Economies. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.791960>
- Currie, J. (2024). Health and inequality. *Oxford Open Economics*, 3(Supplement_1), i549–i556. <https://doi.org/10.1093/ooec/odad041>
- Doan, T. T. N., & Giang, L. T. (2024). Income Inequality and Health Outcomes Among Ten Asian Countries, 1990-2016. *Economic Alternatives*, 30(3), 475–489. <https://doi.org/10.37075/EA.2024.3.01>
- Garbinti, B., Goupille-Lebret, J., & Piketty, T. (2021). Accounting for Wealth-Inequality Dynamics: Methods, Estimates, and Simulations for France. *Journal of the European Economic Association*, 19(1), 620–663. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa025>
- Han, S. (2024). Economic Growth, Poverty Gap, and Health Inequality: Implications Based on Panel Analysis of Organization for Economic Cooperation and Development Data. *Kesmas National Public Health Journal*, 19(4). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v19i4.2116>
- Hasanah, U. (2017). PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENDAPATAN PER KAPITA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN TERHADAP SEKTOR KESEHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5504>
- Hu, Q., & Wang, L. (2024). Economic growth effects of public health expenditure in OECD countries: An empirical study using the dynamic panel threshold model. *Heliyon*, 10(4), e25684. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25684>
- Kofi Boachie, M., Ramu, K., & Pölajeva, T. (2018). Public Health Expenditures and Health Outcomes: New Evidence from Ghana. *Economies*, 6(4), 58. <https://doi.org/10.3390/economies6040058>
- Nenow, J., Nenow, A., Priest, A., Campbell, K. M., & Tumin, D. (2022). Local Economic Inequality and the Primary Care Physician Workforce in North Carolina. *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 35(1), 35–43. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2022.01.210117>
- OECD. (2023). *Health at a Glance 2023*. OECD. <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>
- Patel, V., Burns, J. K., Dhingra, M., Tarver, L., Kohrt, B. A., & Lund, C. (2018). Income inequality and depression: a systematic review and meta-analysis of the association and a scoping review of mechanisms. *World Psychiatry*, 17(1), 76–89. <https://doi.org/10.1002/wps.20492>

- Rana, R. H., Alam, K., & Gow, J. (2018). Development of a richer measure of health outcomes incorporating the impacts of income inequality, ethnic diversity, and ICT development on health. *Globalization and Health*, 14(1), 72. <https://doi.org/10.1186/s12992-018-0385-2>
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 13(1), 397–416.
- Satrio, M. K., Amar, S., & Aimon, H. (2019). Determinants of Inclusive Growth on the Inequality. *Proceedings of the Third Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/piceeba-19.2019.17>
- Sultana, S., Hossain, Md. E., Khan, Md. A., Saha, S. M., Amin, Md. R., & Haque Prodhan, Md. M. (2024). Effects of healthcare spending on public health status: An empirical investigation from Bangladesh. *Heliyon*, 10(1), e24268. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24268>
- Taresh, A., Sari, D., & Purwono, R. (2021). Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia. *Economics & Sociology*, 14(1), 103–119. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-1/7>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Addison-Wesley, Pearson.
- Torul, O. (2020). *On Health Expenditure and Income Inequality* (pp. 117–151). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2329-2.ch005>
- Vadlamannati, K. C., Cooray, A., & de Soysa, I. (2023). Can bigger health budgets cushion pandemics? An empirical test of COVID-19 deaths across the world. *Journal of Public Policy*, 43(1), 33–58. <https://doi.org/10.1017/S0143814X22000216>
- Wang, K.-M., & Nguyen Thi, T.-B. (2022). Quantile panel-type analysis for income inequality and healthcare expenditure. *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*, 35(1), 873–893. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1948436>
- WHO. (2018). *Public Spending on Health: A Closer Look at Global Trends*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276728/WHO-HIS-HGF-HF-WorkingPaper-18.3-eng.pdf>
- World Health Organization. (2021). *World health statistics 2021: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. <https://iris.who.int/handle/10665/342703>
- Zhao, J., Yang, W., & Zhao, K. (2024). The Impact of Income Inequality on Health Levels: Empirical Evidence from China:2002–2016. *Social Work in Public Health*, 39(4), 335–351. <https://doi.org/10.1080/19371918.2024.2325560>

OPEN ACCESS

Citation:
Cahyono, J. P., & Rasyid, M. (2025).
*Hubungan Dinamis Antara Inflasi
Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi
Kerentanan Makroekonomi Di
ASEAN 5. Jurnal Budget: Isu Dan
Masalah Keuangan Negara, 10(1),
95–113.*

Received: April 30, 2025
Accepted: May 10, 2025
Revised: June 18, 2025
Published: June 30, 2025

© The Author(s)



*This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.*

HUBUNGAN DINAMIS ANTARA INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KERENTANAN MAKROEKONOMI DI ASEAN 5

Dynamic Relationship Between Inflation and Economic Growth: A Study of Macroeconomic Vulnerability in Asean 5

Jordan Putra Cahyono¹,

Mohtar Rasyid²

Abstract

This study investigates the nonlinear relationship between inflation and economic growth in ASEAN-5 countries, with a focus on identifying country-specific inflation thresholds and analyzing macroeconomic resilience before and after the COVID-19 pandemic. The study aims to evaluate how inflation shocks above certain thresholds influence economic stability under dynamic global conditions. Quarterly data from 2000 to 2023 including inflation rates, real GDP growth, and lending interest rates were analyzed using Threshold Autoregressive (TAR), Panel Threshold Regression (PTR), and Vector Autoregression (VAR) models. Impulse Response Functions (IRF) and Chow tests were employed to assess dynamic interactions and structural shifts across time. Results reveal heterogeneous inflation thresholds: 0.13% (Singapore), 2.11% (Malaysia), 2.39% (Philippines), and 3.25% (Thailand), while Indonesia exhibits a volatile threshold of -1.11%, reflecting structural instability. When inflation exceeds these thresholds, real GDP declines significantly, with Indonesia showing a contraction of up to 1.2% over four quarters. Post-pandemic impacts are notably stronger, indicating reduced economic resilience. The study highlights the need for adaptive, threshold-based monetary policy tailored to each country's structural profile. Regional policy harmonization should be reconsidered in favor of context-specific responses, including inflation-targeting frameworks, commodity price stabilization, and economic diversification to strengthen resilience amid global uncertainty.

Keywords: *Inflation threshold, macroeconomic resilience, ASEAN-5, Nonlinear analysis, Monetary policy adaptation*

JEL Classification: *E31, E52, O47*

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia email: jordan.putra.cahyono-2023@feb.unair.ac.id

² Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia email: mohtar.rasyid@trunojoyo.ac.id

I. PENDAHULUAN

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua faktor utama yang berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, hubungan antara keduanya sering kali bersifat nonlinier dan sangat dipengaruhi oleh konteks spesifik, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan struktural, seperti negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand). Secara teoritis, inflasi rendah (2-3%) diyakini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara menstabilkan harga dan mendorong investasi (S. Fischer, 1993; He, 2023). Sebaliknya, inflasi tinggi (lebih dari 5%) berpotensi menyebabkan distorsi ekonomi, termasuk arus keluar modal dan penurunan daya saing ekspor (Kremer et al., 2013). Penelitian klasik yang dilakukan oleh M. S. Khan & Senhadji (2001) mengidentifikasi ambang batas inflasi yang berbeda antara negara maju (1-3%) dan negara berkembang (7-11%). Namun, temuan ini belum sepenuhnya mencerminkan tantangan yang khas dihadapi oleh negara-negara ASEAN-5, seperti ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas, keberagaman kebijakan moneter, serta kerentanannya terhadap guncangan eksternal yang kompleks.

Penelitian terkini di kawasan ini, termasuk studi oleh Manurung & Yuniasih (2022) di Indonesia dan Wong & Pinjaman (2025) di Malaysia, mengungkapkan adanya ambang batas inflasi yang lebih spesifik pada sektor tertentu, yakni 4% untuk sektor manufaktur dan 3,5% untuk sektor jasa. Meskipun demikian, pendekatan linier dan asumsi mengenai ambang batas yang bersifat statis dalam penelitian-penelitian tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika kompleks yang terjadi selama masa krisis berganda, seperti pandemi COVID-19 dan ketegangan energi pasca-invasi Rusia ke Ukraina (Katsampos et al., 2024). Perubahan dalam peta ekonomi dunia, terutama setelah pandemi COVID-19 dan diikuti oleh ketegangan energi serta kebijakan moneter yang ketat dari Federal Reserve, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami hubungan antara inflasi dan pertumbuhan sebelum dan setelah pandemi. Fenomena global seperti invasi Rusia ke Ukraina dan kenaikan harga komoditas dunia memperparah tekanan inflasi dan mengganggu kestabilan harga di negara-negara berkembang (Chen, 2023). Oleh karena itu, memahami ketahanan ekonomi yang sesungguhnya memerlukan pendekatan yang membedakan respons makroekonomi sebelum dan sesudah pandemi.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat penting dalam menentukan stabilitas makroekonomi suatu negara. Namun, hubungan ini sering kali tidak linier, tergantung pada kondisi spesifik negara yang sedang diteliti. Penelitian oleh Hidhiir et al. (2024) menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat ambang batas, di mana inflasi yang lebih tinggi dari 5% dapat memperburuk ketahanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara mungkin memiliki toleransi yang berbeda terhadap inflasi, dan oleh karena itu memerlukan kebijakan yang lebih adaptif untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Selain itu, menurut Eichengreen et al. (2024), kemampuan negara untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan inflasi dapat menentukan seberapa kuat menghadapi guncangan global yang semakin memperkuat pentingnya pengelolaan inflasi yang tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi. Penelitian ini berfokus pada negara-negara ASEAN-5, yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, dan menguji apakah ambang batas inflasi yang lebih rendah atau lebih tinggi mempengaruhi ketahanan ekonomi mereka dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti krisis energi atau pandemi.

Selain itu, perubahan dinamika ekonomi global dan krisis eksternal seperti pandemi dan fluktuasi harga energi semakin memperburuk ketahanan makroekonomi di negara-negara ASEAN-5. Penelitian oleh Tan et al. (2024) menyatakan bahwa Pemulihan ekonomi pasca-

pandemi di negara-negara ASEAN-5 sangat terganggu oleh tekanan inflasi yang terus berlangsung, yang memengaruhi baik pengeluaran konsumen maupun aliran investasi. Hal ini menggambarkan bahwa inflasi yang melebihi ambang batas tertentu tidak hanya mempengaruhi daya beli domestik, tetapi juga merusak daya tarik investasi yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian oleh Blazsek et al. (2024) mengemukakan bahwa efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sering kali bersifat nonlinier, memerlukan model yang dapat mengakomodasi ambang batas stabilitas ekonomi yang berbeda-beda. Temuan ini semakin menekankan pentingnya penerapan model analisis yang lebih fleksibel dan dinamis dalam mengukur dampak inflasi terhadap ketahanan ekonomi negara-negara dengan karakteristik yang beragam, terutama dalam menghadapi krisis global yang sering kali tidak terduga.

Dalam konteks ini, analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku dinamis inflasi dan pertumbuhan ekonomi diperlukan melalui segmentasi waktu, mengingat banyak negara mengalami perubahan drastis dalam struktur permintaan, aliran modal, dan kebijakan fiskal. Penelitian ini menyoroti pentingnya menilai hubungan antara inflasi dan pertumbuhan dalam dua periode utama, yaitu sebelum dan setelah pandemi COVID-19, guna mengidentifikasi pergeseran ambang batas dan struktur ketahanan ekonomi yang sebelumnya tidak terlihat. Selain itu, model analisis harus secara eksplisit mempertimbangkan transmisi antar negara yang dipengaruhi oleh variabel seperti nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar di negara-negara ASEAN-5 yang sangat terbuka terhadap perdagangan internasional dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian terdahulu belum secara sistematis menyertakan peran nilai tukar dalam kerangka makroekonomi yang terus berkembang (Bao & Le, 2021; Hillebrand et al., 2023). Misalnya, penurunan tajam nilai tukar selama krisis energi global dapat menyebabkan inflasi impor, yang kemudian menambah tekanan harga domestik dan menurunkan daya beli masyarakat.

Meskipun literatur yang ada telah mengakui pentingnya efek ambang batas inflasi, terdapat tiga celah penting yang belum mendapat perhatian yang memadai. Pertama, ambang batas inflasi sering kali diasumsikan bersifat homogen di antara negara-negara, padahal perbedaan struktural seperti tingkat diversifikasi ekonomi, kebijakan moneter, dan ketergantungan pada impor energi seharusnya menghasilkan titik kritis yang bersifat heterogen. Kedua, interaksi dinamis antara variabel-variabel makroekonomi, seperti suku bunga, nilai tukar, dan investasi, dalam mentransmisikan guncangan inflasi sering kali diabaikan, meskipun efek umpan balik (*feedback loops*) tersebut dapat memperburuk kerentanannya. Ketiga, ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN-5 terhadap inflasi dalam situasi krisis dinamis, seperti lonjakan inflasi dari 2,1% pada tahun 2019 menjadi 5,8% pada tahun 2022, belum diteliti secara memadai, khususnya dalam konteks perubahan ambang batas inflasi setelah pandemi dan variasi respons pertumbuhan ekonomi antarnegara (Romero-Leiton et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi celah-celah yang ada dalam literatur dengan mengintegrasikan analisis dinamika sistem yang lebih komprehensif. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai inflasi dan ketahanan ekonomi cenderung menggunakan model linier yang tidak mampu menggambarkan kompleksitas hubungan antara variabel-variabel makroekonomi yang dinamis dan saling berinteraksi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan: pertama, penerapan model Threshold Autoregressive (TAR) dan Panel Threshold Regression (PTR) memungkinkan identifikasi ambang batas inflasi yang bersifat spesifik untuk

masing-masing negara dan sektor ekonomi. Kedua, integrasi dengan model Vector Autoregression (VAR) dan Impulse Response Function (IRF) memberikan pemahaman mengenai saluran transmisi inflasi yang bersifat dinamis. Ketiga, penelitian ini menekankan pada kombinasi indikator makroekonomi (inflasi, PDB, dan suku bunga) yang jarang dikaji secara simultan dalam pendekatan nonlinier, serta pembagian analisis pada periode pra- dan pascapandemi untuk menangkap perubahan struktural dalam ketahanan ekonomi.

Literatur yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara mendalam menjelaskan bagaimana struktur ekonomi negara berkembang merespons tekanan inflasi dalam jangka panjang. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai ambang batas inflasi, masih ada kekurangan dalam menjelaskan mekanisme transmisi, interaksi dengan variabel lain, dan kaitannya dengan krisis global yang kompleks. Penelitian empiris dan teoritis mengenai respons negara terhadap guncangan eksternal dalam konteks ASEAN masih kurang memadai. Gap ini menegaskan pentingnya penyelidikan lebih mendalam terhadap faktor struktural dan eksogen, termasuk perbedaan kebijakan moneter, komposisi ekspor, dan tingkat fleksibilitas kebijakan fiskal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara inflasi dan ketahanan ekonomi, tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan moneter harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing negara untuk mengelola inflasi secara lebih efektif, terutama dalam menghadapi krisis global yang dinamis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN-5.

Berdasarkan temuan yang ada, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis yang perlu diuji. Pertama, ambang batas inflasi di negara-negara ASEAN-5 bersifat heterogen (H1), di mana setiap negara memiliki ambang batas inflasi yang dipengaruhi oleh faktor struktural yang khas. Kedua, inflasi yang melampaui ambang batas tertentu dapat mengurangi ketahanan ekonomi melalui saluran transmisi suku bunga dan investasi (H2), sebagaimana tercermin pada dampak inflasi tinggi terhadap PDB di Indonesia. Ketiga, penerapan kebijakan moneter adaptif yang berbasis ambang batas inflasi spesifik negara berpotensi meningkatkan pertumbuhan inklusif sebesar 0,5-1,2% per tahun (H3). Terakhir, perubahan ambang batas inflasi antara periode pra-pandemi dan pasca-pandemi mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN-5 sebagai respons terhadap krisis dinamis (H4). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam merancang kebijakan moneter yang lebih responsif dan berbasis data di negara-negara ASEAN-5, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Ambang Batas dan Hubungan Inflasi–Pertumbuhan Ekonomi

Teori hubungan nonlinier antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi berakar pada pemikiran bahwa efek inflasi tidak bersifat proporsional terhadap pertumbuhan pada seluruh rentang nilainya. Teori *threshold effects* yang diinisiasi oleh M. S. Khan & Senhadji (2001) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hansen (1999) menjelaskan bahwa terdapat tingkat inflasi optimal (*threshold*) di bawah atau di atasnya efek terhadap pertumbuhan dapat berubah drastis. Hal ini sesuai dengan pendekatan *Threshold Regression* yang digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian, sebagian besar studi masih mengasumsikan ambang batas yang homogen

antarnegara atau hanya menguji kasus negara tunggal (Paul & Philips, 2022). Padahal, dalam konteks ASEAN-5 yang memiliki struktur ekonomi heterogen, kebijakan fiskal dan moneter yang berbeda, serta ketergantungan yang beragam terhadap ekspor dan energi, pendekatan tersebut tidak lagi memadai. Oleh karena itu, model Panel Threshold Regression menjadi lebih relevan untuk mengevaluasi heterogenitas struktural yang mempengaruhi ambang batas inflasi.

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi fokus utama dalam literatur ekonomi makro. Banyak teori yang menyatakan bahwa inflasi moderat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Teori konvensional yang dikemukakan oleh Tobin (1965) dan Mundell (1963) berargumen bahwa inflasi moderat dapat merangsang permintaan agregat dan investasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini dibantah oleh konsep crowding-out effect yang diajukan oleh Friedman (1977), yang berpendapat bahwa inflasi tinggi dapat merusak alokasi sumber daya dan menciptakan ketidakpastian kebijakan yang merugikan perekonomian. Penelitian empiris awal oleh S. Fischer (1993) menunjukkan adanya hubungan berbentuk U-terbalik antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana tingkat inflasi optimal untuk pertumbuhan berada pada kisaran 2-3%, sementara inflasi di atas 5% dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme seperti penurunan produktivitas dan peningkatan ketidakpastian ekonomi. Temuan ini didukung oleh Kremer et al. (2013), yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat inflasi lebih dari 11 hingga 12 persen mengalami stagnasi ekonomi jangka panjang.

Penelitian mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 menunjukkan hubungan yang tidak selalu linear, dengan inflasi tinggi yang melebihi ambang batas tertentu dapat mengurangi stabilitas ekonomi. Hidthiir et al. (2024) menemukan bahwa dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN sangat bergantung pada tingkat ambang batas, di mana inflasi yang lebih tinggi dari 5% dapat memperburuk ketahanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi guncangan eksternal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang berbasis ambang batas inflasi yang spesifik sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam penelitian oleh Dany-Knedlik & Garcia (2018), mereka mengemukakan bahwa "The main drivers of inflation dynamics in ASEAN-5 economies include supply-side factors such as oil prices and demand-side factors, which together influence inflation thresholds and macroeconomic stability". Penelitian ini menekankan pentingnya faktor eksternal, seperti fluktuasi harga energi, yang dapat mempengaruhi ambang batas inflasi dan akhirnya stabilitas ekonomi ASEAN. Hal ini semakin mendukung argumen bahwa pengelolaan inflasi harus memperhitungkan ketergantungan pada komoditas energi yang dapat memicu ketidakseimbangan ekonomi.

2. Mekanisme Transmisi Guncangan (*Shock Transmission Mechanism*)

Kerangka konseptual penelitian ini juga didasarkan pada teori mekanisme transmisi guncangan, yang menjelaskan bagaimana guncangan inflasi dapat mempengaruhi variabel-variabel makroekonomi lainnya, seperti suku bunga dan output. Chowdhury et al. (2003) menyatakan bahwa guncangan harga (*cost-push inflation*) dapat menular ke sektor riil melalui jalur suku bunga (*interest rate channel*) dan investasi (*investment channel*), di mana kebijakan moneter ketat untuk menekan inflasi berujung pada kontraksi permintaan agregat.

Selain itu, menurut Blanchard & Galí (2010), respon kebijakan terhadap guncangan eksternal harus mempertimbangkan *expectations channel*, yaitu bagaimana ekspektasi inflasi masyarakat dapat memperkuat efek guncangan terhadap pertumbuhan. Hal ini memperkuat

urgensi pendekatan VAR dan IRF dalam penelitian ini untuk mensimulasikan jalur-jalur transmisi tersebut secara empiris. Penelitian oleh Eichengreen et al. (2024) menekankan bahwa negara yang berhasil memitigasi efek transmisi inflasi memiliki sistem moneter yang lebih adaptif dan kredibel. Dalam konteks ASEAN-5, penelitian oleh Hidhiir et al. (2024) dan Tan et al. (2024) menunjukkan bahwa efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyerap guncangan eksternal melalui transmisi suku bunga dan nilai tukar.

Studi terbaru menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN-5 memiliki ketahanan yang berbeda terhadap guncangan eksternal, yang dipengaruhi oleh ambang batas inflasi masing-masing negara. Penelitian oleh Hidhiir et al. (2024) menemukan bahwa guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan krisis energi dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama jika inflasi melampaui ambang batas tertentu. Mereka menyatakan bahwa "countries with a higher inflation tolerance, such as Thailand and Malaysia, exhibited greater resilience during the global energy crisis of 2022" (Hidhiir et al., 2024). Sebagai tambahan, dalam analisis oleh Tan et al. (2024), "Economic policies in ASEAN countries need to adapt to these nonlinear thresholds in inflation dynamics to enhance economic resilience". Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan ekonomi yang fleksibel untuk merespons perubahan inflasi yang dipengaruhi oleh guncangan global yang tidak dapat diprediksi.

Secara keseluruhan, meskipun literatur telah banyak membahas hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa kesenjangan penting yang perlu diatasi, terutama dalam konteks negara-negara ASEAN-5 yang memiliki karakteristik ekonomi yang sangat beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan dinamis dan nonlinier yang lebih tepat, serta menawarkan wawasan baru mengenai ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN-5 dalam menghadapi guncangan eksternal yang kompleks.

3. Kesenjangan Metodologis dan Relevansi Model Nonlinier Dinamis

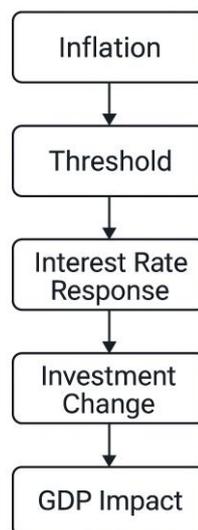
Secara metodologis, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan model linier (OLS, VAR klasik) yang tidak mampu menangkap perubahan struktur hubungan antarvariabel saat terjadi guncangan besar. Penelitian ini menjawab kesenjangan tersebut dengan menggabungkan tiga pendekatan: Panel Threshold Regression, Threshold Autoregressive, dan VAR-IRF. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang bersifat state-dependent, yaitu efek inflasi pada pertumbuhan tergantung pada level inflasinya. Hansen (1999), melalui model threshold regression, membuka kemungkinan identifikasi titik kritis inflasi berbasis data, namun aplikasi model ini masih terbatas pada studi negara tunggal, seperti yang dilakukan oleh Paul & Philips (2022) di Vietnam. Di sisi lain, pendekatan Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) yang digunakan oleh Reicher (2016) untuk menganalisis guncangan energi di Asia Tenggara, meskipun berguna, kurang fleksibel dalam mengakomodasi heterogenitas struktural negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan integrasi model Threshold Autoregressive (TAR) dengan VAR untuk menganalisis dinamika sistem ekonomi di negara-negara ASEAN-5, dengan tujuan memberikan kerangka metodologis yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan nonlinier antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan makroekonomi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan model linier untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun model tersebut tidak mampu menangkap kompleksitas hubungan nonlinier, terutama di negara-negara berkembang. Sebagai

contoh, Nookhwun & Waiyawatjakorn (2024) menggunakan model Threshold Autoregressive (TAR) untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketahanan ekonomi di ASEAN-5, yang menunjukkan bahwa respon terhadap guncangan inflasi dapat bervariasi tergantung pada apakah inflasi melebihi ambang batas atau tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan dinamis seperti TAR sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana inflasi mempengaruhi ketahanan ekonomi di negara-negara ASEAN. Blazsek et al. (2024) juga menyatakan, "The effects of inflation on economic growth and resilience are often nonlinear, requiring models that account for varying thresholds of economic stability". Mereka menekankan bahwa untuk memahami secara mendalam dinamika inflasi dalam konteks ASEAN-5, penggunaan model threshold regression yang lebih fleksibel diperlukan untuk menangkap efek yang lebih halus dari perubahan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan literatur empiris, kerangka konseptual penelitian ini memetakan hubungan antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme transmisi nonlinier.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Kerangka ini bersifat dinamis, dengan perbedaan pola yang dianalisis dalam dua periode (pra- dan pascapandemi). VAR dan IRF digunakan untuk mensimulasikan shock propagation, sementara model threshold mengidentifikasi titik kritis perubahan arah hubungan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah metodologis dan konseptual dalam literatur mengenai ketahanan ekonomi ASEAN-5, sekaligus menawarkan alat ukur yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *mixed-method sequential explanatory* untuk menganalisis hubungan nonlinier antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Data yang digunakan berupa data makroekonomi kuartalan (triwulanan) sepanjang periode 2000–2023, meliputi variabel inflasi (diukur melalui indeks harga konsumen), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil, dan suku bunga kredit perbankan. Data ini diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti World Bank, IMF, dan masing-masing bank sentral negara ASEAN-5. Mengingat

keterbatasan ketersediaan data triwulanan untuk beberapa variabel, proses interpolasi dilakukan dari data tahunan menggunakan metode *Quadratic Match-Sum*, agar mampu meningkatkan resolusi temporal yang dibutuhkan dalam analisis VAR.

Tahapan analisis dilakukan dalam tiga fase utama. Tahap pertama dimulai dengan pra-estimasi, yang mencakup uji stasioneritas terhadap semua variabel menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar variabel menjadi stasioner pada diferensiasi pertama atau kedua, sehingga dapat digunakan dalam model. Selanjutnya, pemilihan lag optimal dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria statistik seperti Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), dan Hannan-Quinn (HQ). Hasil seleksi menunjukkan bahwa lag optimal untuk model VAR adalah empat kuartal (VAR(4)).

Pada tahap kedua, model Threshold Autoregressive (TAR) dan Panel Threshold Regression (PTR) digunakan untuk mengestimasi ambang batas inflasi spesifik bagi masing-masing negara. Ambang batas diestimasi menggunakan teknik grid search, yaitu dengan mencari nilai ambang (γ) yang meminimalkan nilai Sum of Squared Residuals (SSR). Model PTR diimplementasikan dengan asumsi efek tetap antarnegara untuk menangkap heterogenitas struktural yang khas di kawasan ASEAN-5.

Model TAR diestimasi dengan rumus berikut untuk mengidentifikasi ambang batas inflasi yang memisahkan dua rezim pertumbuhan ekonomi (Hansen, 1999):

$$GDP_t = \alpha + \beta_1 Inflation_t \cdot I(Inflation_t \leq \gamma) + \beta_2 Inflation_t \cdot I(Inflation_t > \gamma) + \theta LENDR_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots(1)$$

Di mana $I(\cdot)$ merupakan fungsi indikator, dan γ diestimasi melalui grid search yang meminimalkan *sum of squared residuals* (SSR). Model PTR diterapkan untuk data panel dengan efek tetap (*fixed effects*) dan spesifikasi sebagai berikut:

$$GDP_t = \alpha + \beta_1 Inflation_t \cdot I(Inflation_t \leq \gamma) + \beta_2 Inflation_t \cdot I(Inflation_t > \gamma) + \theta X_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Tahap ketiga melibatkan analisis dinamika sistem menggunakan model Vector Autoregression (VAR), yang dirancang untuk menangkap hubungan simultan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga. Penulisan model VAR dilakukan dalam bentuk sistem persamaan dinamis, dengan setiap variabel endogen dijelaskan oleh nilai lag-nya sendiri dan variabel lain (M. M. Fischer et al., 2023). Untuk menjamin validitas model, dilakukan uji stabilitas VAR dengan menilai akar karakteristik dari sistem (Luo & Griffin, 2025). Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh eigenvalue berada dalam lingkaran satuan, yang mengindikasikan bahwa sistem dalam keadaan stabil secara dinamis.

Selain itu, digunakan pula analisis *Impulse Response Function* (IRF) untuk mensimulasikan dampak guncangan inflasi terhadap PDB dan suku bunga dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk menguji perubahan struktural sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, dilakukan analisis komparatif antarperiode dengan membagi data menjadi pra-pandemi (2000–2019) dan pasca-pandemi (2020–2023). Uji Chow Test digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme hubungan antarvariabel makroekonomi tersebut di dua periode berbeda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji stasioneritas yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian (PDB, LENDR, INF) di negara-negara ASEAN-5 telah stasioner setelah mengalami diferensiasi pertama atau kedua. Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) menunjukkan hasil signifikan pada tingkat 1%, yang menandakan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, semua variabel stasioner pada perbedaan pertama, sementara di Singapura, LENDR memerlukan diferensiasi kedua.

Tabel 1 Hasil Uji Stasioneritas

	Negara	Variabel		
		PDB	LENDR	INF
Indonesia	ADF	-3.633	-4.597**	-7.001**
	Prob	0.0052	0.0001	0.0000
	Sig. Level	1%	1%	1%
Malaysia	ADF	-5.307	-3.605***	-4.521
	Prob	0.0000	0.0057	0.0002
	Sig. Level	1%	1%	1%
Singapura	ADF	-4.792	-6.203	-5.626**
	Prob	0.0001	0.0000	0.0000
	Sig. Level	1%	1%	1%
Philipines	ADF	-4.797	-4.595**	-3.466
	Prob	0.0001	0.0001	0.0089
	Sig. Level	1%	1%	1%
Thailand	ADF	-4.006	-2.951**	-3.973
	Prob	0.0014	0.0397	0.0016
	Sig. Level	1%	1%	1%

Sumber: Stata 17, diolah (2025)

** stasioner pada level *1st difference*, *** stasioner pada level *2nd difference*

Hasil uji *Vector Autoregression* (VAR) dalam Tabel 2 menunjukkan adanya hubungan dinamis yang signifikan antar variabel makroekonomi, meskipun tingkat ketergantungannya bervariasi antar negara. Di Indonesia dan Filipina, inflasi menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara di Malaysia dan Thailand, pengaruh inflasi terhadap suku bunga lebih menonjol.

Tabel 2 : Hasil Uji VAR

Model		SSR Squared of residuals		
		PDB	LENDR	INF
Indonesia	VAR	56.16543	15.49785	107.1946
Malaysia	VAR	154.9539	4.177208	39.26368

Singapura	VAR	232.2278	0.029259	75.44964
Philippines	VAR	257.6588	54.34203	66.46633
Thailand	VAR	193.6040	7.323141	76.66365

Sumber: Stata 17, diolah (2025)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Threshold Autoregressive (TAR) dan Panel Threshold Regression (PTR), ditemukan bahwa ambang batas inflasi berbeda secara signifikan antar negara ASEAN-5. Misalnya, ambang batas inflasi di Malaysia dan Filipina masing-masing berada pada 2,11% dan 2,39%, sedangkan Thailand memiliki ambang batas tertinggi, yaitu 3,25%. Sementara itu, Singapura menunjukkan ambang batas terendah, yaitu 0,13%, menandakan sensitivitas ekstrem terhadap perubahan harga. Adapun Indonesia menunjukkan ambang batas negatif yaitu -1,11%, yang secara empiris mencerminkan volatilitas ekstrem dan kondisi harga yang tidak stabil akibat faktor struktural seperti ketergantungan pada harga energi dan pangan.

Untuk memperjelas klasifikasi dalam studi ini:

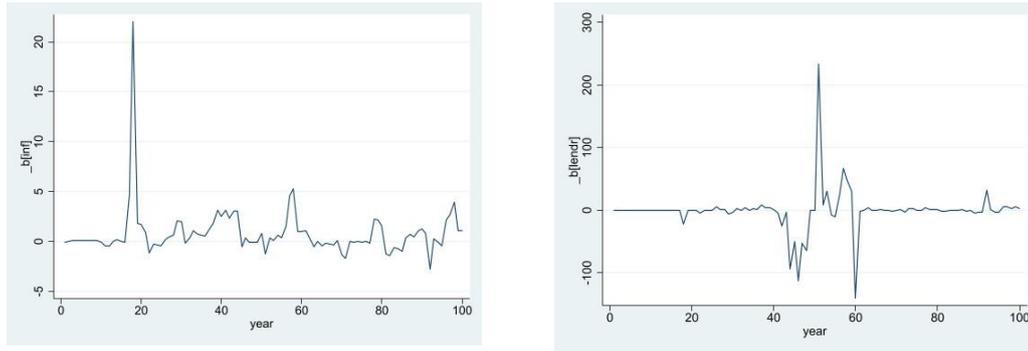
1. Inflasi rendah: di bawah 2% – cenderung mendorong pertumbuhan melalui stabilitas harga dan kepercayaan investor.
2. Inflasi tinggi: di atas 3,5% – diasosiasikan dengan tekanan biaya, fluktuasi kebijakan moneter, dan penurunan investasi.
3. Inflasi fluktuatif: inflasi yang tidak konsisten melewati batas ambang bawah dan atas secara periodik, sering kali menyebabkan ketidakpastian pasar dan respon kebijakan yang tidak optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa toleransi terhadap inflasi sangat bergantung pada struktur ekonomi dan kerangka kebijakan masing-masing negara, dan memperkuat hipotesis heterogenitas ambang batas yang dijelaskan oleh Kremer et al. (2013) dan Blazsek et al. (2024).

Tabel 3 : Hasil Uji Threshold

Negara	Estimasi Threshold	SSR	Prob_cons	
			$\leq \pi$	$> \pi$
Indonesia	-1.11	45.4152	0.128	0.000
Malaysia	2.11	56.0496	0.028	0.183
Singapura	0.13	225.7902	0.829	0.731
Philippines	2.39	109.6215	0.000	0.000
Thailand	3.25	120.8269	0.130	0.058

Sumber: Stata 17, diolah (2025)



Gambar 2 Impulse Response Function

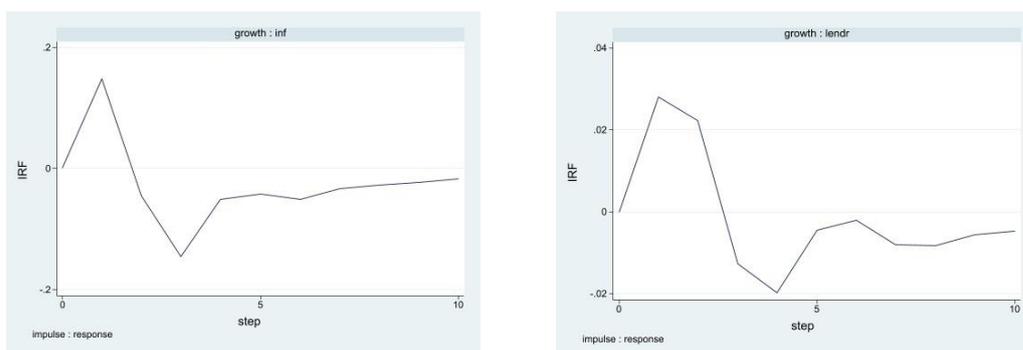
Sumber: Stata 17, diolah (2025)

Analisis *Impulse Response Function* (IRF) yang ditampilkan dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa guncangan inflasi yang melebihi ambang batas tertentu berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara, dengan variasi respons kebijakan moneter yang berbeda antara negara-negara ASEAN-5.

Tabel 4 : Hasil Uji Chow pra-pandemi vs pasca-pandemi

Variabel	Chi-Squared	p-value
Inflation	16.11	0.0001
lendr	0.94	0.3330

Hasil uji Chow yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan perubahan signifikan dalam dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara periode pra-pandemi dan pasca-pandemi, dengan *p-value* yang sangat kecil untuk variabel inflasi (0.0001). Sebaliknya, tidak ada perubahan signifikan dalam hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi selama kedua periode tersebut.



Gambar 3 Rolling Window 5 Tahun

Hasil uji Chow yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan perubahan signifikan dalam dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara periode pra-pandemi (2000–2019) dan pasca-pandemi (2020–2023), khususnya pada variabel inflasi (*p-value* = 0,0001). Sebaliknya, tidak ada perubahan signifikan dalam hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi selama kedua periode tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi berubah secara signifikan setelah pandemi, yang mempertegas

pentingnya adaptasi kebijakan ekonomi dalam menghadapi kondisi yang dinamis. Sebagaimana dijelaskan oleh Wulandari & Ajija (2023), "Negara dengan kebijakan moneter yang responsif terhadap guncangan eksternal, seperti yang terlihat di Thailand dan Singapura, lebih resilien dalam menghadapi krisis inflasi". Temuan ini sangat relevan untuk negara-negara ASEAN-5, yang memiliki ambang batas inflasi yang bervariasi dan struktur ekonomi yang beragam. Penyesuaian terhadap kebijakan inflasi dan suku bunga dapat memperkuat ketahanan ekonomi di tengah guncangan eksternal yang lebih sering terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Eichengreen et al. (2024), yang menyatakan bahwa "kemampuan negara untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan inflasi dapat menentukan seberapa kuat mereka menghadapi guncangan global".

Secara umum, ambang batas inflasi menurun setelah pandemi, yang menandakan bahwa struktur perekonomian menjadi lebih rentan terhadap tekanan harga. Hal ini sangat terlihat di negara seperti Singapura dan Filipina, di mana IRF menunjukkan bahwa inflasi di atas 3% pascapandemi menghasilkan kontraksi ekonomi lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai perbandingan, penelitian oleh Nookhwun & Waiyawatjakorn (2024) yang menggunakan model TAR di ASEAN juga mencatat bahwa respons inflasi terhadap output lebih tajam pascapandemi, tetapi mereka tidak membagi respons berdasarkan tahapan ambang batas seperti dalam penelitian ini. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi konseptual melalui analisis ambang adaptif, yang menyoroti pergeseran struktur ketahanan inflasi sebagai respons terhadap krisis eksternal.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan inflasi yang lebih terencana dan adaptif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif, sebagaimana diungkapkan oleh Kremer et al. (2013), "Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dalam jangka panjang jika tidak ada kebijakan moneter yang sesuai untuk mengatasinya". Hasil uji VAR dan IRF juga mengonfirmasi bahwa guncangan inflasi yang melebihi ambang batas tertentu berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan inflasi dalam kerangka kebijakan ekonomi yang lebih adaptif terhadap situasi global yang berubah (Atigala et al., 2022; N. Khan, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak ambang batas inflasi terhadap ketahanan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 dalam menghadapi guncangan dinamis, seperti pandemi COVID-19 dan krisis energi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat sejumlah temuan penting yang mendukung hipotesis yang diajukan dalam latar belakang penelitian. Hasil uji threshold yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa ambang batas inflasi di negara-negara ASEAN-5 bervariasi secara signifikan. Misalnya, Indonesia memiliki ambang batas negatif inflasi pada -1,11%, sementara Malaysia berada pada 2,11%, dan Singapura memiliki ambang batas yang sangat rendah, yaitu 0,13%. Temuan ini menggambarkan bahwa ambang batas inflasi di setiap negara ASEAN-5 tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang unik di masing-masing negara.

Temuan ini mendukung hipotesis pertama bahwa ambang batas inflasi di negara-negara ASEAN-5 bersifat heterogen dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti ketergantungan pada komoditas dan kebijakan moneter yang berbeda-beda antar negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Manurung & Yuniasih (2022), "Ambang batas inflasi sektoral, seperti 4% untuk manufaktur di Indonesia, mencerminkan keragaman dalam faktor struktural yang mempengaruhi setiap negara." Selain itu, variasi ambang batas inflasi ini juga tercermin dalam ketahanan ekonomi negara-negara tersebut terhadap inflasi yang lebih tinggi, yang

menunjukkan bahwa kebijakan inflasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal sangat diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh Rasyid et al. (2021) "Ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN-5 sangat dipengaruhi oleh kebijakan inflasi yang disesuaikan dengan karakteristik struktural dan kebutuhan ekonomi masing-masing."

Penelitian ini mengungkapkan bahwa negara-negara dengan ambang batas inflasi yang lebih tinggi, seperti Thailand dan Indonesia, lebih mampu menahan dampak inflasi dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti krisis energi global dan ketidakstabilan pasar internasional. Sebagai contoh, Indonesia dengan ambang batas inflasi sebesar -1,11% menunjukkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga komoditas energi, namun berhasil mengurangi dampak tersebut melalui kebijakan moneter yang adaptif dan penyesuaian sektor manufaktur yang lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Baba et al. (2024), yang menyatakan bahwa negara dengan ambang batas inflasi yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan global karena fleksibilitas dalam menanggapi fluktuasi harga.

Selain itu, negara-negara dengan ambang batas inflasi yang lebih rendah, seperti Singapura (0,13%), lebih rentan terhadap dampak inflasi yang melebihi ambang batas ini, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka. Singapura, dengan ketergantungan yang tinggi pada perdagangan dan sektor jasa, memerlukan kebijakan moneter yang sangat responsif untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah guncangan eksternal (Shim, 2023). Sebagaimana diungkapkan oleh Tan et al. (2024), Kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan inflasi diperlukan untuk mengelola ketahanan ekonomi negara-negara dengan ambang batas inflasi yang rendah seperti Singapura. Penelitian ini semakin menekankan pentingnya kebijakan inflasi yang tidak hanya mengakomodasi fluktuasi harga global, tetapi juga mempertimbangkan faktor struktural dan kebutuhan ekonomi masing-masing negara..

Hasil uji VAR (Tabel 2) dan IRF (Gambar 1) menunjukkan bahwa guncangan inflasi yang melebihi ambang batas tertentu memang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Di Indonesia, misalnya, inflasi yang melebihi 5% memicu penurunan PDB sebesar 1,2% dalam empat kuartal, sementara suku bunga mengalami lonjakan sebagai respons terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat. Hal ini mendukung hipotesis bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi ketahanan ekonomi melalui transmisi suku bunga dan penurunan investasi. Sebagaimana dijelaskan oleh S. Fischer (1993), bahwa Inflasi yang tinggi cenderung mengganggu alokasi sumber daya, mengurangi daya saing ekspor, dan mengurangi kepercayaan investor. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Kremer et al. (2013), yang menyatakan bahwa Inflasi yang tinggi di atas 11 hingga 12 persen dapat menyebabkan stagnasi ekonomi jangka panjang.

Selain itu, hasil uji Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa setelah terjadinya guncangan inflasi yang melebihi ambang batas, dampaknya terhadap variabel makroekonomi lainnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, setelah inflasi mencapai 5%, Indonesia mengalami penurunan investasi yang signifikan, yang berlanjut hingga kuartal berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan investasi. Penurunan investasi ini, pada gilirannya, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini selaras dengan temuan Zhang & Zhou (2025), yang mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi yang tajam dapat memperburuk kestabilan makroekonomi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena dampaknya terhadap keputusan investasi dan konsumsi.

Model VAR(4) yang dibangun menunjukkan adanya interaksi yang signifikan antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan PDB di seluruh negara ASEAN-5, dengan arah pengaruh yang bervariasi. Berdasarkan hasil Impulse Response Function (IRF), guncangan inflasi yang melebihi ambang batas menghasilkan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di semua negara, meskipun besarnya dampak bervariasi. Sebagai contoh, di Indonesia, ketika inflasi melebihi 5%, IRF menunjukkan penurunan PDB sebesar 1,2% dalam empat kuartal berikutnya. Hal ini sejalan dengan temuan Zhang & Zhou (2025) yang menyatakan bahwa inflasi tinggi memperlambat investasi dan konsumsi domestik. Di sisi lain, Thailand, dengan ambang batas yang lebih tinggi (3,25%), menunjukkan daya tahan yang relatif lebih baik terhadap guncangan inflasi, mendukung argumen Hidthiir et al. (2024) bahwa negara dengan toleransi inflasi lebih tinggi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih besar. Perbedaan respons ini mencerminkan variasi dalam shock transmission mechanism di masing-masing negara. Di Malaysia, misalnya, transmisi lebih dominan melalui interest rate channel, sedangkan di Filipina dan Indonesia efek lebih kuat melalui investment channel. Ini sesuai dengan model Blanchard & Galí (2010), yang menekankan bahwa saluran ekspektasi dan suku bunga berperan penting dalam menengahi dampak inflasi terhadap output riil.

Penemuan ini juga didukung oleh Baharin & Mohamed Noor (2023) yang menyatakan bahwa "negara-negara ASEAN yang lebih resisten terhadap inflasi cenderung memiliki kebijakan yang lebih stabil dan kapasitas yang lebih besar untuk bertahan terhadap guncangan eksternal, seperti yang terlihat dalam pengalaman Malaysia dan Singapura pasca-pandemi" (Baharin & Mohamed Noor, 2023). Penemuan ini menunjukkan bahwa negara dengan ambang batas inflasi yang rendah, seperti Singapura, memiliki keterbatasan dalam menangani inflasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing ekonomi mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tan et al. (2024), yang mengungkapkan bahwa kebijakan moneter yang tepat dan pengelolaan inflasi yang ketat menjadi kunci bagi ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN-5. Temuan ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan inflasi yang responsif dan kebijakan moneter yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara-negara ASEAN-5.

Penelitian ini juga menguji peran kebijakan moneter adaptif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan ambang batas inflasi, seperti yang terlihat di Thailand dan Singapura, memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menanggulangi guncangan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa kebijakan moneter yang adaptif dapat membantu meningkatkan pertumbuhan inklusif (Martín-Legendre et al., 2023; Wu et al., 2024). Sebagaimana disebutkan oleh Sari et al. (2023) Kebijakan moneter yang fleksibel dan berbasis data dapat menyeimbangkan antara mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan inflasi yang lebih terencana dan adaptif akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti krisis energi global dan dampak pandemi COVID-19, telah memperburuk ketahanan ekonomi di negara-negara ASEAN-5, terutama ketika inflasi melampaui ambang batas tertentu. Dalam analisis yang dilakukan oleh Az-Zahra & Widarjono (2022), ditemukan bahwa inflasi yang tinggi, terutama yang melebihi 5%, dapat memperburuk kestabilan ekonomi melalui transmisi suku bunga yang lebih tinggi, penurunan daya saing ekspor, dan berkurangnya investasi domestik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Purnomo & Wibowo (2024), yang menyatakan bahwa meskipun ada pemulihan

pasca-pandemi, inflasi yang tinggi tetap menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5. Penemuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan inflasi yang tepat, terutama di negara-negara dengan ambang batas inflasi yang lebih rendah, seperti Singapura, yang lebih rentan terhadap dampak inflasi tinggi pasca-pandemi, yang dapat menghambat proses pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Tan et al. (2024) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa pemulihan pasca-pandemi di negara-negara ASEAN-5 terhambat oleh tekanan inflasi yang terus berlangsung, memengaruhi pengeluaran konsumen dan aliran investasi. Selain itu, penelitian oleh Che Yahya et al. (2024) mempertegas pentingnya penyesuaian kebijakan moneter yang lebih fleksibel di negara-negara ASEAN-5, dengan menyatakan bahwa pengelolaan inflasi yang efektif selama pemulihan pasca-pandemi memerlukan kebijakan yang menyeimbangkan stabilisasi jangka pendek dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi pasca-pandemi di kawasan ini sangat bergantung pada kemampuan negara-negara ASEAN-5 untuk mengelola inflasi secara efektif, mempertahankan daya beli konsumen, dan mendukung pemulihan investasi. Sementara itu, menurut Sunge et al. (2024), inflasi yang sangat tinggi dalam periode pasca-pandemi di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, menyebabkan penurunan signifikan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang memerlukan kebijakan yang lebih fleksibel untuk merespons dampak inflasi tersebut. Temuan ini memperkuat analisis yang menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan pasca-pandemi, inflasi tetap menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk ketahanan ekonomi di negara-negara ASEAN-5.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan inflasi berbasis ambang batas spesifik negara sangat krusial. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia dapat menoleransi inflasi sedikit lebih tinggi tanpa mengorbankan pertumbuhan, sementara negara seperti Singapura memerlukan kebijakan moneter yang sangat responsif bahkan terhadap fluktuasi harga yang kecil. Magnitudo dampak menunjukkan bahwa kenaikan inflasi 1% di atas ambang batas dapat mengurangi PDB kuartalan sebesar 0,3%–0,6% tergantung pada negara, dan menaikkan suku bunga rata-rata sebesar 0,5–1,1 poin persentase. Artinya, inflasi yang tidak terkendali akan memicu kebijakan moneter kontraktif yang justru memperparah pelemahan ekonomi melalui transmisi biaya modal. Dalam konteks ini, temuan penelitian ini mendukung rekomendasi dari Sari et al. (2023) bahwa kebijakan suku bunga perlu didesain secara state-contingent, artinya menyesuaikan dengan posisi inflasi terhadap ambangnya, bukan semata-mata berbasis target inflasi tahunan. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan stabilisasi harga pangan dan energi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan harga global (Egli et al., 2021; Wang et al., 2024).

V. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 bersifat tidak linier dan dipengaruhi oleh ambang batas inflasi yang berbeda-beda di setiap negara. Temuan ini didasarkan pada model Threshold Autoregressive (TAR), Panel Threshold Regression (PTR), dan Vector Autoregression (VAR), yang menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki sensitivitas tersendiri terhadap tekanan inflasi. Misalnya, Singapura memiliki ambang batas inflasi yang sangat rendah sebesar 0,13%, menandakan bahwa tekanan inflasi kecil saja sudah dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, sementara Thailand menunjukkan toleransi yang lebih besar dengan ambang batas 3,25%. Hal ini

menegaskan bahwa pengelolaan inflasi tidak bisa diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan struktur ekonomi dan kapasitas respon kebijakan masing-masing negara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ambang batas inflasi di negara-negara ASEAN-5 bersifat heterogen, dengan variasi signifikan antarnegara yang dipengaruhi oleh faktor struktural masing-masing, seperti ketergantungan pada komoditas dan kebijakan moneter. Inflasi yang melebihi ambang batas tertentu terbukti mengurangi ketahanan ekonomi, terutama melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan transmisi suku bunga, yang berpotensi menurunkan investasi. Kebijakan moneter yang adaptif, yang berbasis pada ambang batas inflasi spesifik negara, terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan inklusif dan membantu negara-negara ASEAN-5 mengatasi guncangan inflasi. Selain itu, perubahan ambang batas inflasi antara periode pra-pandemi dan pasca-pandemi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam ketahanan ekonomi, yang memperkuat pentingnya kebijakan moneter yang fleksibel dalam menghadapi krisis. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah ditemukannya perbedaan perilaku ketahanan ekonomi antara periode pra-pandemi dan pasca-pandemi. Setelah pandemi COVID-19, struktur hubungan antara inflasi dan pertumbuhan mengalami perubahan signifikan, yang ditunjukkan oleh hasil uji Chow dan analisis Impulse Response Function (IRF). Guncangan inflasi pasca-pandemi menunjukkan dampak yang lebih tajam terhadap pertumbuhan, yang mencerminkan penurunan daya tahan ekonomi akibat disrupsi pasokan global dan meningkatnya ketidakpastian harga. Perubahan ini menjadi pembuktian bahwa ambang batas inflasi bersifat adaptif dan tidak bisa dianggap sebagai parameter tetap dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan ambang dinamis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual baru dalam memahami ketahanan ekonomi pascakrisis.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah penetapan kebijakan moneter yang disesuaikan dengan ambang batas inflasi spesifik setiap negara di ASEAN-5, pengembangan kebijakan ekonomi yang fleksibel dan adaptif untuk merespons dinamika inflasi dan guncangan eksternal, serta upaya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi inflasi global, terutama di negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas analisis ekonomi berbasis data dengan model dinamis, seperti rolling window dan threshold, untuk memahami ketahanan ekonomi secara lebih mendalam, serta menekankan pertumbuhan inklusif dalam kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu negara-negara ASEAN-5 meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkuat literatur mengenai ketahanan makroekonomi dengan menunjukkan bahwa pengaruh inflasi tidak hanya bergantung pada level nominalnya, tetapi juga pada seberapa jauh level tersebut melampaui batas toleransi struktural di tiap negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transmisi inflasi terhadap PDB dan suku bunga terjadi melalui mekanisme yang berbeda-beda, baik melalui saluran suku bunga, investasi, maupun ekspektasi, sehingga penting bagi otoritas moneter untuk merancang kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap jenis guncangan yang terjadi. Selain menyumbang pada pengembangan model ekonomi berbasis ambang adaptif, penelitian ini juga memberikan arah kebijakan yang

kelas: bank sentral perlu menyesuaikan instrumen moneter dengan ambang batas inflasi spesifik negara, serta menghindari kebijakan yang bersifat seragam dan generalistik di kawasan ASEAN.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar model threshold yang digunakan dapat dikembangkan menjadi *time-varying threshold* model agar lebih mampu menangkap dinamika perubahan ambang batas seiring waktu. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan memasukkan indikator ekspektasi inflasi dan ketidakpastian global, serta melibatkan dimensi sektoral untuk menguji bagaimana guncangan inflasi mempengaruhi sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan jasa. Dengan begitu, analisis ketahanan makroekonomi dapat ditingkatkan tidak hanya dari sisi makro agregatif, tetapi juga dari sisi mikro dan sektoral yang lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga serta Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa dalam penelitian ini. Kolaborasi yang terjalin antara kedua institusi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan penelitian ini, baik dari segi pemikiran, sumber daya, maupun fasilitas yang telah disediakan. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi di masa mendatang. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atigala, P., Maduwanthi, T., Gunathilake, V., Sathsarani, S., & Jayathilaka, R. (2022). Driving the pulse of the economy or the dilution effect: Inflation impacting economic growth. *PLoS ONE*, 17(8 August). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0273379>
- Az-Zahra, Q., & Widarjono, A. (2022). Determinants of Financial System Stability in ASEAN Countries. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.35384/JKP.V19I1.347>
- Baba, C., Duval, R., Lan, T., & Topalova, P. (2024). The 2021-22 inflation surge in Europe: a Phillips-curve-based dissection. *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2303383>
- Baharin, R., & Mohamed Noor, N. (2023). Covid-19 Impact: Fiscal and Monetary Policies in Malaysia, Singapore, and Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/V12-I4/18642>
- Bao, H. H. G., & Le, H. P. (2021). ASEAN's trade balance with the whole EU-28 at industry level: The role of vehicle currency. *Journal of Economic Asymmetries*, 24. <https://doi.org/10.1016/J.JECA.2021.E00230>
- Blanchard, O., & Galí, J. (2010). Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynesian Model with Unemployment. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2), 1–30. <https://doi.org/10.1257/MAC.2.2.1>
- Blazsek, S., Licht, A., Ayala, A., & Liu, S. P. (2024). Core Inflation Rate for China and the ASEAN-10 Countries: Smoothed Signal for Score-Driven Local Level Plus Scale Models. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, 29(2), 177–212. https://doi.org/10.1515/SNDE-2023-0042/DOWNLOADASSET/SUPPL/J_SNDE-2023-0042_SUPPL_001.ZIP

- Che Yahya, N., Mohd Zaki, B., Nur Aqilah Ab Wahab, S., Hazdaniel Bin Roslan, M., Bt Fauzi Mat Rawi, F., & Author, C. (2024). Determinants of Inflation Rate Fluctuations in Five ASEAN Nations. *Information Management and Business Review*, 16(3S(I)a), 817–830. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S\(I\)a.4238](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S(I)a.4238)
- Chen, Q. (2023). Inflation and Energy Crisis under Ukraine Conflict. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 32(1), 1–7. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/32/20231553>
- Chowdhury, I., Hoffmann, M., & Schabert, A. (2003). Inflation Dynamics and the Cost Channel of Monetary Transmission. *Working Papers*. https://ideas.repec.org/p/gla/glaewp/2003_19.html
- Dany-Knedlik, G., & Garcia, J. A. (2018). Monetary Policy and Inflation Dynamics in ASEAN Economies. *Discussion Papers of DIW Berlin*. <https://ideas.repec.org/p/diw/diwwpp/dp1755.html>
- Egli, L., Mehrabi, Z., & Seppelt, R. (2021). More farms, less specialized landscapes, and higher crop diversity stabilize food supplies. *Environmental Research Letters*, 16(5). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ABF529>
- Eichengreen, B., Park, D., & Shin, K. (2024). Economic resilience: Why some countries recover more robustly than others from shocks. *Economic Modelling*, 136. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2024.106748>
- Fischer, M. M., Hauzenberger, N., Huber, F., & Pfarrhofer, M. (2023). General Bayesian time-varying parameter vector autoregressions for modeling government bond yields. *Journal of Applied Econometrics*, 38(1), 69–87. <https://doi.org/10.1002/JAE.2936>
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. *Journal of Political Economy*, 85(3), 451–472. <http://www.jstor.org/stable/1830192>
- Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(99\)00025-1](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(99)00025-1)
- He, Q. (2023). The inverted-U effect of inflation on growth: Cross-country evidence. *Economic Modelling*, 128, 106501. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2023.106501>
- Hidhiir, M. H. bin, Ahmad, Z., Junoh, M. Z. M., & Yusof, M. F. Bin. (2024). Dynamics of economic growth in ASEAN-5 countries: a panel ARDL approach. *Discover Sustainability*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/S43621-024-00351-X/TABLES/9>
- Hillebrand, E., Mikkelsen, J. G., Spreng, L., & Urga, G. (2023). Exchange rates and macroeconomic fundamentals: Evidence of instabilities from time-varying factor loadings. *Journal of Applied Econometrics*, 38(6), 857–877. <https://doi.org/10.1002/JAE.2984>
- Katsampoxakis, I., Xanthopoulos, S., Basdekis, C., & Christopoulos, A. G. (2024). Can ESG Stocks Be a Safe Haven during Global Crises? Evidence from the COVID-19 Pandemic and the Russia-Ukraine War with Time-Frequency Wavelet Analysis. *Economies*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES12040089>
- Khan, M. S., & Senhadji, A. S. (2001). Threshold Effects in the Relationship between Inflation and Growth. In *IMF Working Paper*. <https://papers.ssrn.com/abstract=879840>
- Khan, N. (2022). Does Inflation Targeting Really Promote Economic Growth? *Review of Political Economy*, 34(3), 564–584. <https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1902165>

- Kremer, S., Bick, A., & Nautz, D. (2013). Inflation and growth: New evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Empirical Economics*, 44(2), 861–878. <https://doi.org/10.1007/S00181-012-0553-9>/METRICS
- Luo, Y., & Griffin, J. E. (2025). Bayesian Inference of Vector Autoregressions with Tensor Decompositions. *Journal of Business & Economic Statistics*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/07350015.2024.2447302>
- Manurung, M. S., & Yuniasih, A. F. (2022). Estimation of Inflation Threshold of Indonesia and Its Effect on Economic Growth Periode 1981-2019. *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 2021(1), 683–690. <https://doi.org/10.34123/ICDSOS.V202111.230>
- Martín-Legendre, J. I., Castellanos-García, P., & Sánchez-Santos, J. M. (2023). Should the monetary authorities be sensitive to inequality concerns? Empirical evidence for a panel of 62 countries. *Journal of Economic Studies*, 50(7), 1428–1449. <https://doi.org/10.1108/JES-05-2022-0262>
- Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4), 475–485. <https://doi.org/10.2307/139336>
- Nookhwun, N., & Waiyawatjakorn, R. (2024). Flexible Inflation Targeting and Macroeconomic Performance: Evidence from ASEAN. *Asian Economic Policy Review*, 19(2), 198–219. <https://doi.org/10.1111/AEPR.12459>;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER
- Paul, H. L., & Philips, A. Q. (2022). What goes up must come down: Theory and model specification of threshold dynamics. *Social Science Quarterly*, 103(5), 1273–1289. <https://doi.org/10.1111/SSQU.13191>
- Purnomo, D. K., & Wibowo, W. (2024). The Effect of Interest Rates and Inflation on Economic Growth in ASEAN-5 Countries. *Journal of Developing Economies*, 9(2), 217–229. <https://doi.org/10.20473/JDE.V9I2.52413>
- Rasyid, M., Kristina, A., Ayu, P., & Purwanti, P. (2021). Optimal Price Level Under Slowing Economic Performance Using Simple Growth-Inflation Threshold Models. *KnE Social Sciences*, 2021, 1-10–11–10. <https://doi.org/10.18502/KSS.V5I8.9342>
- Reicher, C. A. (2016). A Note on the Identification of Dynamic Economic Models with Generalized Shock Processes. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 78(3), 412–423. <https://doi.org/10.1111/OBES.12115>
- Romero-Leiton, J. P., Mesa, M. J., Acosta-Minoli, C. A., & Aristizabal, J. M. (2025). Resilience after COVID-19: A Global Review of Recovery Strategies and their impact on Demographic and Economic Sectors. *Problemy Ekorożwoju*, 20(1), 74–95. <https://doi.org/10.35784/PREKO.6754>
- Sari, D. M., Asngari, I., Hidayat, A., & Andaiyani, S. (2023). The Effect of Interest Rates, Exchange Rates and Output Gap on Inflation in Five ASEAN Countries: A Panel Data Evidence. *Journal of Applied Economic Research*, 22(1), 6–29. <https://doi.org/10.15826/VESTNIK.2023.22.1.001>
- Shim, J. H. (2023). Monetary Policy and Net Exports Externalities in the Small Open Economy. *Journal of Money, Credit and Banking*. <https://doi.org/10.1111/JMCB.13047>
- Sunge, R., Mudzingiri, C., & Mkhize, N. (2024). The COVID-19 pandemic and economic recovery: The mediating role of governance, a global perspective. *Heliyon*, 10(22), e39869. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E39869>
- Tan, S. R., Jang, H., & Wood, J. (2024). Economic Growth and Development in the Tropics. *Economic Growth and Development in the Tropics*, 1–286.

<https://doi.org/10.4324/9781003349204/ECONOMIC-GROWTH-DEVELOPMENT-TROPICS-JACOB-WOOD-SOOK-REI-TAN-HAEJIN-JANG/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>

- Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. *Econometrica*, 33(4), 671–684. <https://doi.org/10.2307/1910352>
- Wang, Q., Rossignoli, C. M., Dompok, E. B., Su, J., Griffiths, D., Htoo, K. K., Nway, H. M., Akester, M., & Gasparatos, A. (2024). Diversification strategies have a stabilizing effect for income and food availability during livelihood shocks: Evidence from small-scale aquaculture-agriculture systems in Myanmar during the COVID-19 pandemic. *Agricultural Systems*, 217. <https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2024.103935>
- Wong, V. K., & Pinjaman, S. (2025). Inflation Threshold Effects on Stock Prices: Evidence from the Plantation Sector in Malaysia. *Business and Economic Research*, 15(1), 148–161. <https://doi.org/10.5296/BER.V15I1.22452>
- Wu, B., Ding, Y., Xie, B., & Zhang, Y. (2024). FinTech and Inclusive Green Growth: A Causal Inference Based on Double Machine Learning. *Sustainability (Switzerland)*, 16(22). <https://doi.org/10.3390/SU16229989>
- Wulandari, C. R., & Ajija, S. R. (2023). Impact of Covid-19 Cases on Inflation in ASEAN. *Journal of Developing Economies*, 8(2), 431–443. <https://doi.org/10.20473/JDE.V8I2.45863>
- Zhang, R., & Zhou, Z. (2025). The Effect of Inflation on Economic Growth. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 148(1), 31–35. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.LD19195>



PA3KN

#Menyala

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram:@pa3kn.bkdprri

Youtube:PA3KN BK DPR RI